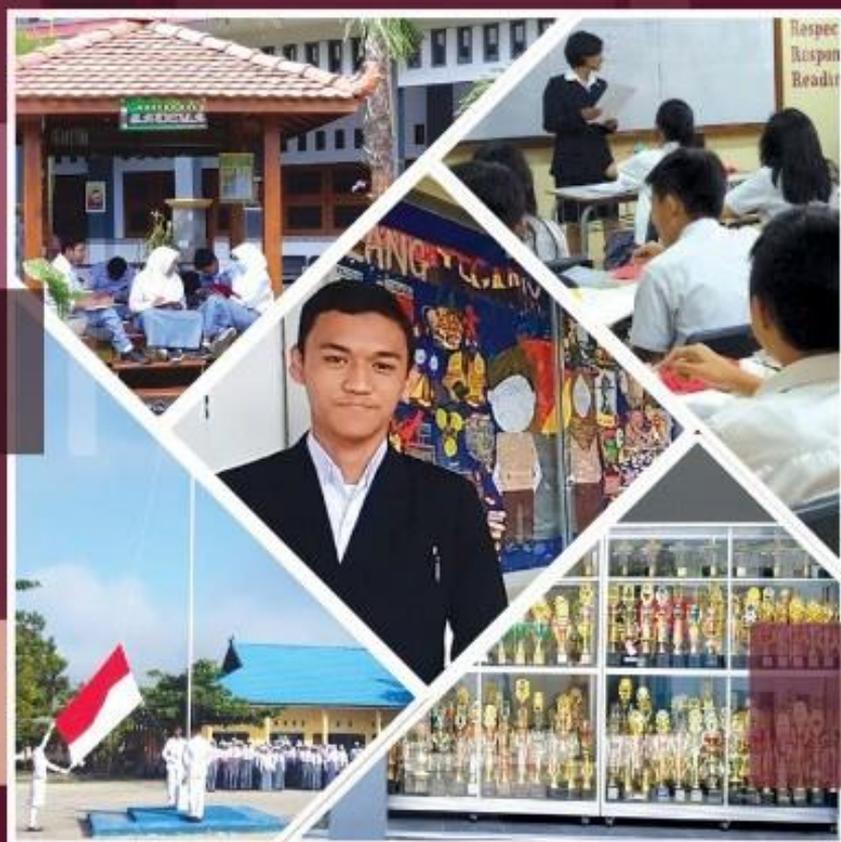


MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH ATAS



PROFIL SMA

**MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS)
SEKOLAH MENENGAH ATAS**

DIREKTORAT PEMBINAAN SMA
DITJEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMA

©2018 Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pengarah:

Purwadi Sutanto (Direktur Pembinaan SMA)

Penanggungjawab:

Suhadi (Kasubdit Program dan Evaluasi)

Kontributor:

Harizal
Juandanilsyah
Suharlan

Tim Penulis:

Dirjo Ardiansyah
Mujakir
Akhmad Reza Fathan

Editor:

Agus Salim
Augustin Wardhani
Jim Bar Pen
Nurul Mahfudi
Wiwiet Heriyanto
Uce Veriyanti
Muhammad Adji Susilo Nugroho
Akhmad Supriyatna

Diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMA
Jl. RS Fatmawati Cipete Jakarta Selatan
Telp: 021-75911532
www.pasma.kemdikbud.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan buku yang berjudul “Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMA”. Buku ini merupakan salah satu dari sejumlah buku yang ditulis pada tahun 2018 untuk menampilkan hasil program yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA dalam meningkatkan partisipasi dan mutu pendidikan. Manajemen Berbasis Sekolah merupakan model penyelenggaraan pendidikan SMA dengan pemberian otonomi yang cukup besar bagi pengelola sekolah.

Dalam buku ini ditampilkan konsep MBS secara utuh, khususnya di SMA, serta kaitannya dengan program peningkatan mutu. Melalui otonomi yang cukup besar kepada manajemen sekolah, diharapkan sekolah memiliki kemampuan untuk melakukan proses pendidikan sesuai dengan konteks lokalnya. Bagaimanapun juga potensi, keunggulan dan kearifan lokal merupakan salah satu kekuatan yang dapat menjadi keunggulan sekolah. Melalui MBS pada akhirnya diharapkan dapat tercipta kemandirian sekolah.

Selain hal yang terkait konsep MBS, pada buku ini juga dipotret model pengelolaan sekolah yang saat ini terjadi di berbagai sekolah di Tanah Air. Pemilihan sekolah dilakukan atas dasar sampling, mengingat pada dasarnya setiap sekolah memiliki karakteristik pengelolaan yang khas.

Buku ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pembaca, untuk memahami konsep MBS di SMA sekaligus membandingkannya dengan potret pengelolaan sekolah yang ada, sehingga muncul gagasan baru atau penguatan dalam manajemen SMA di masa yang akan datang.

Melalui buku ini pula diharapkan muncul spirit untuk terus menyediakan layanan SMA bermutu yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga pemenuhan hak masyarakat terhadap pendidikan dapat dipenuhi.

Jakarta, November 2018
Direktur Pembinaan SMA



Purwadi Sutanto
NIP: 19610404 1985031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	2
B. PENGERTIAN MBS.....	3
C. TUJUAN MBS	3
D. RUANG LINGKUP MBS.....	3
BAB II KONSEP MBS	7
A. POLA BARU MANAJEMEN PENDIDIKAN MASA DEPAN	8
B. KONSEP DASAR MPMBS	9
C. MANFAAT MBS.....	11
D. ASUMSI DAN PRINSIP MBS.....	12
E. FUNGSI-FUNGSI YANG DIDESENTRALISASIKAN KE SEKOLAH	13
F. PENGERTIAN MUTU PENDIDIKAN.....	15
G. TAHAPAN IMPLEMENTASI MBS	17
BAB III IMPLEMENTASI MBS DI SMA	21
A. PENYELENGGARAAN SMA.....	22
B. PRINSIP PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN	23
C. PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN SMA	25
D. RUANG LINGKUP OPERASIONAL MBS.....	30
E. KEWAJIBAN SEKOLAH PEMERINTAH	39
F. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN	39
BAB IV PROFIL MBS DI SMA.....	43
BAB V PENUTUP	167



BAB I PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Manajemen Berbasis Sekolah atau disingkat MBS merupakan istilah yang banyak diungkap dalam dunia pendidikan. Istilah MBS atau *School Based Management* mulai berkembang di Amerika Serikat sebagai dampak dari tuntutan masyarakat terhadap pendidikan yang relevan dengan kehidupan. Dengan kondisi itu, maka setiap sekolah dituntut untuk mengelola sendiri aktivitas satuan pendidikannya dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah. Sekolah diberi kewenangan untuk mengelola sendiri kondisi sumberdaya yang ada di sekolahnya sehingga dapat menghasilkan *outcome* yang memiliki relevansi bagi kehidupan nyata.

Melalui MBS, kewenangan dalam pengelolaan sekolah, bertumpu kepada sekolah dan *stakeholder* terkait langsung. Dengan basis ini, fungsi manajemen sekolah lebih terbuka dan optimal, menghindarkan format sentralisasi dan birokratisasi yang dapat menyebabkan hilangnya fungsi manajemen sekolah.

MBS juga didasarkan pada kenyataan bahwa setiap sekolah, layaknya setiap individu, memiliki keunikannya sendiri. Setiap sekolah memiliki karakteristik yang tidak dimiliki sekolah lain. Setiap sekolah memiliki konteks dan kondisi lokal yang berbeda satu dengan yang lain. Oleh karena itu, untuk optimalnya proses pendidikan di tiap sekolah, maka sekolah perlu mengelola sekolah sesuai konteks lokal tersebut.

Demikian pula dengan pengelolaan sekolah. Untuk optimalnya pengelolaan pendidikan di satu sekolah, maka diperlukan manajemen pengelolaan yang unik yang disesuaikan dengan konteks lokal tersebut. Bagaimana setiap sekolah dikelola, selayaknya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah, kondisi dan kebutuhan peserta didik, daya dukung lingkungan serta berbagai faktor lokal yang mewarnai. Atas dasar itulah kemudian muncul sebuah model pengelolaan sekolah dengan basis kondisi dan konteks sekolah itu sendiri, yang kemudian dikenal sebagai Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Di Indonesia konsep ini muncul pertama kali pada tahun 2000. Secara resmi konsep ini tertuang dalam dokumen Undang-undang No. 25 tahun 2000 Rencana Strategis Pembangunan Nasional tahun 2000-2004, selanjutnya tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Pasal 51 UU Sistem Pendidikan Nasional tercantum bahwa "Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah." Di sini jelas bahwa Manajemen Berbasis Sekolah merupakan prinsip dalam pengelolaan satuan pendidikan. Atas dasar itu-

lah, maka prinsip MBS perlu disosialisasikan kepada seluruh sekolah agar dapat dipahami sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan.

B. PENGERTIAN MBS

MBS adalah salah satu basis manajemen pengelolaan sekolah yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan bersama secara partisipatif dari semua warga sekolah dan masyarakat di sekitarnya dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan. Model manajemen demikian ditujukan untuk memberikan kemandirian kepada sekolah serta meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.

Melalui MBS, setiap satuan pendidikan dapat menentukan kebijakan sendiri untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dengan mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah dalam membentuk pribadi peserta didik. Pendekatan manajemen ini, merupakan satu sistem pengelolaan yang luas dalam berbagai aspek.

C. TUJUAN MBS

MBS bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada sekolah untuk mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif. Lebih rincinya, MBS bertujuan untuk:

1. meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia;
2. meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama;
3. meningkatkan tanggungjawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah;
4. meningkatkan kompetisi yang sehat antarsekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.

D. RUANG LINGKUP MBS

Melalui MBS, pihak manajemen sekolah diberi keleluasaan untuk mengatur dirinya sendiri dalam berbagai hal. Berhasil tidaknya sebuah sekolah dalam men-

jalankan proses pendidikan sepenuhnya tergantung pada manajemen sekolah. Ibarat nakhoda yang berlayar di tengah lautan, si nakhoda lah yang menentukan ke mana arah kapalnya menuju dan bagaimana teknisnya mengarungi lautan. Tentu, ada manual yang menjadi *guidance* bagaimana caranya mengendalikannya kapal, tapi teknis apa dan bagaimana yang harus dilakukan ketika berlayar, sepenuhnya tanggungjawab nakhoda, dibantu oleh anak buah kapal.

MBS memiliki ruang lingkup yang luas meliputi berbagai aspek:

1. MBS merupakan otonomi satuan pendidikan dalam mengelola pendidikan di satuan pendidikan yang bersangkutan. Dalam hal ini, kepala sekolah dan guru dibantu komite sekolah dalam mengelola pendidikan.
2. Kewenangan kepala sekolah untuk menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yang dikelolanya dalam bidang manajemen, yang meliputi rencana strategis dan operasional, struktur organisasi dan tata kerja, sistem audit dan pengawasan internal; dan sistem penjaminan mutu internal.

Hal-hal tersebut merupakan ruang lingkup MBS di mana setiap satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk mengelola kegiatan pendidikan di satuan pendidikan.

Hanya saja konsep desentralisasi model MBS itu kerap kali belum dipahami secara mendasar dan filosofis. Akibatnya, manajemen sekolah yang semestinya dapat melakukan berbagai hal secara mandiri, mereka tidak bisa melakukannya karena perlu dukungan aturan sebagai langkah melakukan kebijakan di sekolah. Hal demikian menyebabkan MBS tidak optimal. Seolah sekolah itu dikendalikan secara “autopilot” oleh pemerintah selaku pengelola pendidikan di satu wilayah.

Selain itu, MBS itu juga kerap diinterpretasikan secara beragam sehingga belum ditemukan model yang paling sesuai dengan kondisi nyata setiap sekolah di setiap kondisi yang sesuai dengan konteks lokalnya. Oleh karena itu perlu sebuah naskah tentang MBS yang disusun secara konseptual dan relevan sesuai dengan kondisi nyata di sekolah. □





BAB II

KONSEP MBS

A. POLA BARU MANAJEMEN PENDIDIKAN MASA DEPAN

Perubahan merupakan sebuah keniscayaan. Demikian pula manajemen pengelolaan sekolah. Banyaknya bukti empirik tentang lemahnya pola lama manajemen pendidikan nasional dan digulirkannya otonomi daerah, membawa konsekuensi pada perubahan manajemen sekolah. Sebuah konsekuensi logis untuk dilakukan penyesuaian manajemen pengelolaan sekolah dari pola lama menuju pola baru. Pola baru manajemen pendidikan juga dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan zaman yang lebih bernuansa otonomi dan demokratis. Dimensi perubahan dapat dilihat Pada Tabel 2.1.

Table 2.1 Dimensi-Dimensi Perubahan Pola Manajemen Pendidikan

Pola Lama	Menuju	Pola Baru
Subordinasi	----->	Otonom
Pengambilan keputusan terpusat	----->	Pengambilan keputusan partisipatif
Ruang gerak kaku	----->	Ruang gerak luwes
Pendekatan birokratik	----->	Pendekatan profesional
Sentralistik	----->	Desentralistik
Diatur	----->	Motivasi diri
Overregulasi	----->	Deregulasi
Mengontrol	----->	Mempengaruhi
Mengarahkan	----->	Memfasilitasi
Menghindari resiko	----->	Mengelola resiko
Gunakan uang semuanya	----->	Gunakan uang seefisien mungkin
Individual yang cerdas	----->	Teamwork yang cerdas
Informasi terpribadi	----->	Informasi terbagi
Pendelegasian	----->	Pemberdayaan
Organisasi hierarkis	----->	Organisasi datar

Departemen Pendidikan Nasional (2001)

Berdasarkan pola baru tersebut, sekolah memiliki wewenang lebih besar dalam pengelolaan lembaganya. Hal tersebut membawa perubahan pada banyak hal. Di antaranya pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif. Demikian pula partisipasi masyarakat juga makin besar, sekolah lebih luwes dalam mengelola lembaganya, pendekatan profesionalisme lebih diutamakan daripada pendekatan birokrasi, pengelolaan sekolah lebih desentralistik, perubahan seko-

lah lebih didorong oleh motivasi diri sekolah daripada diatur dari luar sekolah, regulasi pendidikan lebih sederhana, peran pusat bergeser dari mengontrol menjadi mempengaruhi dan dari mengarahkan ke memfasilitasi, dari menghindari resiko menjadi mengolah resiko, penggunaan uang lebih efisien karena sisa anggaran tahun ini dapat digunakan untuk anggaran tahun depan (*efficiency based budgeting*), lebih mengutamakan pemberdayaan, dan struktur organisasi lebih datar sehingga lebih efisien.

B. KONSEP DASAR MPMBS

Pada prinsipnya, MBS merupakan model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengembalian keputusan secara partisipatif untuk memenuhi *kebutuhan mutu* sekolah atau untuk mencapai *tujuan mutu* sekolah dalam kerangka pendidikan nasional. Oleh karena itu, terdapat sejumlah kata kunci terkait MBS, yakni *otonomi sekolah, pengambilan keputusan partisipatif untuk mencapai sasaran mutu sekolah*.

1. Otonomi

Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan/kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri, dan mereka tidak tergantung pada pihak manapun. Jadi otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku.

Tentu saja kemandirian yang dimaksud harus didukung oleh sejumlah kemampuan. Yaitu kemampuan mengambil keputusan yang terbaik, kemampuan berdemokrasi/menghargai perbedaan pendapat, kemampuan memobilisasi sumber daya, kemampuan memilih cara pelaksanaan yang terbaik dan kemampuan berkomunikasi dengan cara yang efektif. Selain itu juga kemampuan memecahkan persoalan-persoalan sekolah, kemampuan adaptasi dan antisipasi, kemampuan bersinergi dan berkolaborasi dan kemampuan memenuhi kebutuhannya sendiri.

2. Pengambilan keputusan partisipatif

Pengambilan keputusan partisipatif adalah suatu cara untuk mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis oleh warga sekolah (guru, siswa, karyawan, orangtua siswa, tokoh masyarakat).

kat). Warga sekolah didorong untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sekolah. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa jika seseorang dilibatkan (berpartisipasi) dalam pengambilan keputusan, maka yang bersangkutan akan mempunyai “rasa memiliki” terhadap keputusan tersebut sehingga yang bersangkutan juga akan bertanggungjawab dan berdedikasi sepenuhnya untuk mencapai tujuan sekolah. Singkatnya: makin besar tingkat partisipasi, makin besar pula rasa tanggungjawab; dan makin besar rasa memiliki, makin besar pula rasa tanggungjawab dan makin besar rasa tanggung jawab, makin besar pula dedikasinya. Tentu saja pelibatan warga sekolah dalam pengambilan keputusan harus mempertimbangkan keahlian, batas kewenangan, dan relevansinya dengan tujuan pengambilan keputusan sekolah.

Dengan pengertian di atas, sekolah memiliki kewenangan dan kemandirian lebih besar dalam mengelola sekolahnya untuk mencapai mutu pendidikan. Dengan kata lain, sekolah merupakan unit utama pengelolaan proses pendidikan. Sedangkan unit-unit di atasnya, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pendidikan di daerah merupakan unit pendukung dan pelayan sekolah.

Sekolah yang mandiri atau berdaya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tingkat kemandirian tinggi/tingkat ketergantungan rendah;
2. Bersifat adaptif dan antisipatif proaktif sekaligus;
3. Memiliki jiwa kewirausahaan tinggi (ulet, inovatif, gigih, berani mengambil risiko, dan sebagainya);
4. Bertanggungjawab terhadap kinerja sekolah;
5. Memiliki kontrol yang kuat terhadap input manajemen dan sumber dayanya;
6. Memiliki kontrol yang kuat terhadap kondisi kerja;
7. Komitmen yang tinggi pada dirinya; dan prestasi merupakan acuan bagi penilainya.

Selanjutnya, bagi sumber daya manusia sekolah yang berdaya, pada umumnya memiliki ciri-ciri: pekerjaan adalah miliknya, dia bertanggungjawab, pekerjaannya memiliki kontribusi, dia tahu posisinya di mana, dia memiliki kontrol terhadap pekerjaannya, dan pekerjaannya merupakan bagian dari hidupnya.

Contoh tentang hal-hal yang dapat memandirikan/memberdayakan warga sekolah adalah dengan pemberian kewenangan, pemberian tanggung jawab,

pekerjaan yang bermakna, pemecahan masalah sekolah secara *teamwork*, variasi tugas, hasil kerja yang terukur, kemampuan untuk mengukur kinerjanya sendiri, tantangan, kepercayaan, didengar, ada pujian, menghargai ide-ide, mengetahui bahwa dia adalah bagian penting dari sekolah, kontrol yang luwes, dukungan, komunikasi yang efektif, umpan balik bagus, sumber daya yang dibutuhkan ada, dan warga sekolah diberlakukan sebagai manusia ciptaan-Nya yang memiliki murtabat tertinggi.

C. MANFAAT MBS

Melalui MBS diperoleh berbagai keuntungan, antara lain:

1. Kebijakan dan kewenangan sekolah bersumber dari kondisi nyata yang dialami sekolah dan membawa pengaruh langsung kepada siswa, orang tua, dan guru;
2. Sumberdaya lokal dapat termanfaatkan secara optimal dan relevan;
3. Pengelolaan pendidikan dapat berjalan lebih efektif;
4. Adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan yang memiliki dampak langsung kepada guru, manajemen sekolah, rancang ulang sekolah, perubahan perencanaan;
5. MBS memberikan peluang kepada guru dan kepala sekolah dalam mengelola sekolah menjadi lebih efektif karena adanya partisipasi dan rasa kepemilikan dan keterlibatan yang tinggi dalam membuat keputusan. Pengelola sekolah akan mempunyai kendali dan akuntabilitas terhadap lingkungan sekolah. Pengelola pendidikan tingkat pusat dan dasar hanya berperan dalam melayani kebutuhan sekolah.
6. MBS akan menciptakan berbagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta sekolah yang memerlukan penataan secara hati-hati yang dilandasi semangat kerjasama dan konsisten dalam kewajiban, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing.

Dalam konsep MBS pemerintah pusat berkewajiban dalam merumuskan cita-cita dan strategi nasional pendidikan, kurikulum nasional, publikasi buku-buku pelajaran tertentu, serta pertanggungjawaban dalam mutu edukatif. Sedangkan pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan SDM (guru dan kepala sekolah), mengatur rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, pengembangan karier, pemindahan, kenaikan pangkat, dan pemberhentian guru. Sekolah berkewajiban untuk mengatur jam pelajaran, dikelas mana pelajaran diberikan atau tidak dalam mengelola kurikulum nasional, to-

lak ukur apa yang digunakan untuk menilai pencapaian kurikulum, keleluasaan dalam mengelola sumber daya sekolah dan dalam menyertakan masyarakat dalam meningkatkan kinerja sekolah.

D. ASUMSI DAN PRINSIP MBS

Penerapan MBS di setiap satuan pendidikan didasarkan atas asumsi dan prinsip pengelolaan sekolah sebagai berikut:

1. Asumsi Dasar MBS

Terdapat asumsi dasar dalam penerapan MBS yakni:

- a. MBS memandang sekolah sebagai suatu lembaga yang harus dikembangkan. Sekolah dipandang sebagai suatu lembaga layanan jasa pendidikan di mana kepala sekolah sebagai manajer pendidikan yang dituntut untuk bertanggungjawab atas seluruh komponen sekolah, dan harus berupaya meningkatkan mutu pelayanan dan mutu hasil belajar yang berorientasi kepada pemakai, baik internal (siswa) atau eksternal (masyarakat), pemerintah maupun lembaga industri dan dunia kerja (*stakeholder*). Dalam konsep MBS harus memperhatikan aspek-aspek mutu yang harus dikendalikan secara komprehensif yaitu: 1) karakteristik mutu pendidikan (input, proses, output); 2) pembiayaan; 3) metode atau sistem penyampaian bahan/materi pelajaran; 4) pelayanan kepada siswa dan orang tua, serta masyarakat.
- b. MBS dapat efektif diterapkan jika didukung oleh sistem berbagi kekuasaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam pengelolaan sekolah. Agar hasil outputnya baik, maka (dalam konsep MBS) sekolah dipandang sebagai suatu unit manajemen yang utuh dan memerlukan perlakuan khusus dalam upaya pengembangannya. Dimana perlakuan khusus tersebut akan berbeda untuk setiap sekolah. Hal inilah yang melandasi keyakinan bahwa pengambilan keputusan dalam merancang dan mengelola pendidikan seharusnya dilakukan di tingkat sekolah.

2. Prinsip Dasar MBS

Dalam MBS, konsep yang diterapkan adalah konsep otonomi yang merupakan tindakan desentralisasi yang dilakukan oleh lembaga yang lebih tinggi ke tingkat bawah. Hal ini merupakan proses pendelegasian kekuasaan mulai dari tingkat nasional (pusat) sampai dengan tingkat sekolah, bahkan sampai di tingkat kelas (guru kelas).

MBS menuntut kesiapan pengelola di berbagai level untuk melakukan perannya sesuai dengan kewajiban, kewenangan, dan tanggungjawabnya. MBS akan efektif diterapkan jika para pengelola pendidikan mampu melibatkan *stakeholder* terutama peningkatan peran serta masyarakat dalam menentukan kewenangan, pengadministrasian, dan inovasi kurikulum yang dilakukan oleh masing-masing sekolah.

Inovasi kurikulum lebih menekankan kepada peningkatan kualitas dan keadilan (equitas), pemerataan (equalitas) bagi semua peserta didik yang didasarkan atas kebutuhan peserta didik dan masyarakat lingkungannya. MBS merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kinerja unggul sekolah yang didukung oleh anggaran, SDM, dan kurikulum atau pengajaran yang memadai. Syarat yang harus ditempuh dalam melaksanakan MBS adalah :

- a. adanya kebutuhan untuk berubah atau inovasi;
- b. adanya desain ulang organisasi pendidikan;
- c. proses perubahan sebagai proses belajar;

Semua hal tersebut harus dilakukan secara sadar untuk melakukan perubahan.

E. FUNGSI-FUNGSI YANG DIDESENTRALISASIKAN KESEKOLAH

Tidak seluruh aspek dalam manajemen, secara kebijakan dapat didesentralisasi ke sekolah. Pembagian kewenangan dalam pengelolaan sekolah telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010. Adapun aspek-aspek yang dapat digarap oleh sekolah dalam kerangka MBS ini meliputi: (1) Perencanaan dan evaluasi program sekolah; (2) Pengelolaan kurikulum; (3) Pengelolaan proses pembelajaran; (4) Pengelolaan ketenagaan; (5) Pengelolaan peralatan dan perlengkapan; (6) Pengelolaan keuangan; (7) Pelayanan siswa; (8) Hubungan sekolah-masyarakat; serta (9) Pengelolaan iklim sekolah.

1. Perencanaan dan Evaluasi

Sekolah diberi kewenangan untuk melakukan perencanaan dan penyusunan program sekolah sesuai dengan kebutuhannya (*school based plan*). Kebutuhan yang dimaksud, misalkan, kebutuhan untuk meningkatkan mutu pendidikan, kualitas layanan dan tata kelola.

Sekolah diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, khususnya evaluasi yang dilakukan secara internal. Evaluasi internal dilakukan oleh warga sekolah untuk memantau proses pelaksanaan dan untuk mengevaluasi hasil program-program yang telah dilaksanakan. Evaluasi semacam ini sering disebut evaluasi diri. Evaluasi diri harus jujur dan transparan agar benar-benar dapat mengungkap informasi yang sebenarnya.

2. Pengelolaan Kurikulum

Kurikulum yang diterapkan di sekolah merupakan kurikulum yang sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait kurikulum. Kebijakan kurikulum yang dibuat oleh Pemerintah Pusat adalah standar yang berlaku secara nasional. Mengingat kondisi sekolah sangat beragam, maka dalam implementasinya, sekolah dapat mengembangkan (memperdalam, memperkaya, dan memodifikasi) implementasi kurikulum dengan mengacu pada kebijakan kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, Pemerintah Daerah dan atau sekolah diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal.

3. Pengelolaan Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran merupakan kegiatan utama sekolah. Sekolah diberi kebebasan memilih strategi, metode, dan teknik-teknik pembelajaran dan pengajaran yang paling efektif, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, karakteristik guru, dan kondisi nyata sumber daya yang tersedia di sekolah. Secara umum, strategi, metode, teknik pembelajaran harus berpusat pada siswa (*student-centered*) sehingga lebih mampu memberdayakan pembelajaran oleh peserta didik.

4. Pengelolaan Ketenagaan

Pada prinsipnya, pengelolaan ketenagaan, mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan, *reward and punishment*, hubungan kerja, sampai evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan oleh sekolah. Namun untuk sekolah pemerintah, beberapa kegiatan terkait dengan ketenagaan seperti rekrutmen dan pengupahan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Kendati demikian, pengelolaan teknis terkait ketenagaan dapat diatur oleh satuan pendidikan disesuaikan dengan konteks lokalnya.

5. Pengelolaan Fasilitas

Pengelolaan fasilitas sudah seharusnya dilakukan oleh sekolah, mulai dari

pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan, hingga sampai pengembangan. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa sekolahlah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas, baik kecukupan, kesesuaian, maupun kemitakhiran.

6. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan, terutama pengalokasian/penggunaan dana dilakukan oleh sekolah dengan mengacu pada aturan yang berlaku. Hal ini juga didasari oleh kenyataan bahwa sekolahlah yang paling memahami kebutuhannya sehingga desentralisasi pengalokasian/penggunaan uang sudah seharusnya dilimpahkan ke sekolah. Sekolah juga harus diberi kebebasan untuk melakukan “kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan” (*income generating activities*) atau “kegiatan kreatif yang tidak tergantung pada dana sekolah” sehingga sumber keuangan sekolah tidak semata-mata tergantung pada pemerintah.

7. Pelayanan Siswa

Pelayanan siswa, mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan/pembinaan/pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan sekolah atau untuk memasuki dunia kerja hingga sampai pada pengurusan alumni, sebenarnya dari dahulu memang sudah didesentralisasikan. Karena itu, yang diperlukan adalah peningkatan intensitas dan ekstensitasnya.

8. Hubungan Sekolah-Masyarakat

Esensi hubungan sekolah-masyarakat adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat terutama dukungan moral dan finansial. Dalam arti yang sebenarnya, hubungan sekolah-masyarakat dari dahulu sudah didesentralisasikan. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah peningkatan intensitas dan ekstensitas hubungan sekolah-masyarakat.

9. Pengelolaan Iklim Sekolah

Iklim sekolah, baik secara fisik dan non-fisik, yang kondusif merupakan prasyarat bagi terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, optimis dan harapan/ekspetasi yang tinggi dari warga sekolah, kesehatan sekolah, dan kegiatan-kegiatan yang berpusat pada siswa (*student-centered activities*) adalah contoh-contoh iklim sekolah yang dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. Iklim sekolah sudah merupakan kewenangan sekolah sehingga yang diperlukan adalah upaya-upaya yang lebih intensif dan ekstensif.

F. PENGERTIAN MUTU PENDIDIKAN

Secara umum, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan yang mencakup *input*, *proses*, dan *ouput* pendidikan.

1. Input pendidikan

Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses pendidikan, baik berupa sumberdaya, perangkat lunak, serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses pendidikan.

a. Input sumberdaya

Input sumber daya meliputi sumber daya manusia yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik, dan sumber daya lainnya seperti peralatan, perlengkapan, uang, bahan belajar, dan lain sebagainya. Dalam konteks Standar Nasional Pendidikan, setiap satuan pendidikan diharapkan dapat memenuhi input sumber daya ini seperti termaktub dalam Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Standar Sarana Prasarana.

b. Input perangkat lunak

Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana-rencana, program, struktur kurikulum, kompetensi yang harus dicapai, materi ajar, dan lain sebagainya. Setiap satuan pendidikan diharapkan dapat memenuhi input perangkat lunak ini dalam bentuk kesiapan pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan secara lengkap.

c. Input harapan-harapan

Input harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah. Input harapan ini juga tertuang dalam standar pengelolaan.

Kesiapan input sangat diperlukan agar proses pendidikan dapat berlangsung dengan baik dan layanan pendidikan dapat berlangsung efektif guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi kesiapan input, makin tinggi pula mutu input satuan pendidikan tersebut. Oleh karena itu, pengukuran mutu pendidikan yang paling mudah dilakukan didasarkan

pada mutu input tersebut.

2. Proses pendidikan

Proses pendidikan merupakan berubahnya “sesuatu” menjadi “sesuatu yang lain”. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input utama, sedang sesuatu dari hasil proses disebut output utama. Dengan demikian proses pendidikan merupakan merubahnya input utama menjadi output utama.

Dalam pendidikan berskala mikro (tingkat sekolah), proses yang menjadi aktivitas inti dalam proses pendidikan adalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan proses untuk menghasilkan profil peserta didik yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Untuk mendukung proses tersebut, dibutuhkan proses pendukung seperti proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembangaan, proses pengelolaan pembelajaran, proses monitoring dan evaluasi, dan proses pendukung lainnya.

Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengoordinasian dan penyerasian serta pemaduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan, dan sebagainya) dilakukan secara harmonis sehingga mampu menciptakan:

- suasana pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*),
- mendorong motivasi dan minat belajar secara berkelanjutan,
- memberdayakan peserta didik tidak sekedar menguasai pengetahuan, memiliki kemampuan mempraktekkan, melainkan mampu mengamalkan pengetahuan dan keterampilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari sebagai sebuah kompetensi yang utuh;
- suasana yang efektif dalam penguatan karakter dan literasi; serta
- menguatkan kemampuan peserta didik untuk mampu belajar bagaimana cara belajar dan mampu mengembangkan dirinya sendiri.

3. Ouput pendidikan

Ouput pendidikan merupakan profil peserta didik sesuai makna pendidikan itu sendiri. Yakni, “*peserta didik yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.*”

Akan tetapi, pencapaian profil tersebut dihasilkan dari kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektifitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya.

Khusus yang berkaitan dengan mutu output sekolah, dapat dijelaskan bahwa output sekolah dikatakan berkualitas/bermutu tinggi, jika prestasi sekolah, khususnya prestasi peserta didik, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam:

1. Prestasi akademik, berupa nilai Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), karya ilmiah, hasil tes masuk perguruan tinggi, serta aneka lomba-lomba akademik lainnya; dan
2. Prestasi non-akademik, seperti misalnya menunjukkan ketaatan pada agama secara konsisten, karakter yang kuat, akhlak mulia, pengembangan bakat dan potensi melalui aneka lomba non akademik, penguasaan keterampilan hidup, dan lain sebagainya.

Untuk mencapai output tersebut, banyak sekali hal yang mempengaruhi dan saling berhubungan. Baik itu mutu input maupun mutu proses, seperti misalnya, tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta evaluasi, yang selalu konsisten pada pencapaian output sekolah.

G. IMPLEMENTASI MBS

Dalam menerapkan MBS di sekolah, maka perlu langkah-langkah yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi sekolah. Dalam tahapan ini perlu dicermati tahap implementasi dan indikator pencapaian hasilnya.

1. Tahap Implementasi

Secara umum, implementasi MBS dikelompokkan menjadi tiga tahap, yaitu tahap pemahaman, tahap implementasi dan tahap penguatan.

a. Tahap Pemahaman

Mencakup ide dasar MBS pada jajaran Kemdikbud dan *stakeholder*, kejelasan karir dan kebijakan yang menjadi wewenang pusat, daerah dan sekolah. Perubahan pola hubungan sub-ordinasi, perubahan sikap dan perilaku baik pimpinan jajaran birokrasi maupun masyarakat, deregulasi aturan, dan transparansi serta akuntabilitas.

b. Tahap Implementasi

Tahap implementasi dapat dilakukan dengan berbagai syarat, di antaranya.

- i. Pihak sekolah dapat menerima informasi tentang MBS secara lengkap dan dapat diterima (akseptabel) maknanya secara filosofis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- ii. Melakukan *benchmarking* ke sekolah yang telah menerapkan MBS terlebih dahulu, dan mengidentifikasi semua persoalan yang dihadapi;
- iii. Menyusun tahapan implementasi dalam ruang lingkup yang termudah terlebih dahulu.
- iv. Memulai implementasi sesuai dengan konteks lokal;

c. Tahap Penguatan

Penguatan implementasi MBS dilakukan secara simultan dari waktu ke waktu dengan melakukan evaluasi dan penguatan berkala, sehingga diperoleh model implementasi yang benar-benar sesuai.

2. Indikator keberhasilan MBS

Keberhasilan MBS dicirikan dengan sejumlah indikator, antara lain:

1. Menguatnya kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan oleh sekolah;
3. Munculnya *team work* yang tinggi di dalam manajemen sekolah;
4. Meningkatnya kemandirian sekolah dalam menghadapi berbagai tantangan dalam dunia pendidikan. □



BAB II IMPLEMENTASI MBS DI SMA

ETOS KERJA SMA NEGERI 71 JAKARTA
1. FOCUS
2. SEMANGAT
3. TANGGUH
4. BERPRESTASI

GERAKAN PRAMUKA
GUGUB DEPAN
NO. 07-38597.318
JALAN KH. HANUNG
JAKARTA

ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH
(OSIS)

SMA NEGERI 71
JAKARTA



XII-MIPA-2

XII-MIPA-2

XII-MIPA-1

Terdapat dua terminologi penting dalam proses pendidikan, yakni “pengelolaan pendidikan” dan “penyelenggaraan pendidikan”. Tatkala mengupas tentang manajemen sekolah, maka tidak dapat dilepaskan dengan dua hal tersebut. Untuk lebih memahami implementasi MBS, maka perlu diurai dari dua hal tersebut.

A. PENYELENGGARAAN SMA

Dalam rangka memberikan layanan pendidikan sebagai pemenuhan hak warga negara, maka dilakukan kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh satuan pendidikan yang memiliki karakteristik sendiri sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakannya. Jalur pendidikan terdiri atas jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Jenjang pendidikan meliputi jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan jenis pendidikan, khususnya di jenjang pendidikan menengah, meliputi pendidikan umum dan kejuruan.

Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan jenis layanan pendidikan menengah umum pada jenjang pendidikan formal sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

Penyelenggara SMA terbagi menjadi dua kelompok yakni pemerintah dan masyarakat. Penyelenggaraan oleh pemerintah, meliputi penyelenggaraan SMA oleh Pemerintah Provinsi. Sedangkan penyelenggaraan oleh masyarakat terdapat dalam berbagai bentuk lembaga masyarakat, seperti yayasan, lembaga pendidikan, organisasi, atau lembaga kerjasama.

Sesuai peraturan perundangan yang berlaku, khususnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perizinan sekolah SMA yang didirikan oleh masyarakat diberikan oleh Pemerintah Provinsi. Sebelumnya perizinan ini diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan perizinan sekolah masyarakat yang lembaganya merupakan satuan pendidikan kerjasama diberikan oleh Pemerintah Pusat.

B. PENGELOLAAN SMA

Untuk berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan yang efektif sesuai dengan tujuan pendidikan, maka dilakukan pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/

kota, penyelenggara pendidikan swasta, dan sekolah SMA baik negeri maupun swasta agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pengelolaan pendidikan meliputi pengelolaan pendidikan oleh pemerintah/pemerintah daerah dan pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan.

Pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan merupakan hal yang sangat penting mengingat hal tersebut menentukan keberhasilan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Pengelolaan SMA oleh pemerintah meliputi pengelolaan di tingkat nasional oleh Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan di tingkat provinsi yang dilakukan oleh instansi yang memiliki wewenang melakukan pengelolaan pendidikan SMA. Secara legal formal, kewenangan pengelolaan oleh pemerintah terhadap SMA dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.

Sedangkan pengelolaan SMA di tingkat satuan pendidikan diterapkan dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah oleh manajemen sekolah. Manajemen sekolah SMA dapat dibedakan dalam dua jenis sekolah berdasarkan jenis penyelenggara, yakni SMA yang diselenggarakan oleh Pemerintah (sekolah negeri) dan SMA yang diselenggarakan oleh masyarakat (sekolah swasta). Dua jenis penyelenggara ini memiliki perbedaan dalam organ sekolah sesuai karakteristiknya. Berikut perbedaan organ SMA negeri dan SMA Swasta.

1. Organ SMA Negeri

Sebagai satuan pendidikan menengah umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah, SMA Negeri paling sedikit memiliki dua organ yang terdiri atas:

- a. Kepala sekolah yang menjalankan fungsi manajemen satuan pendidikan menengah; dan
- b. Komite sekolah yang menjalankan fungsi pengarahan, pertimbangan, dan pengawasan akademik.

2. Organ SMA Swasta

Organ dan pengelolaan satuan pendidikan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di-

selenggarakan berdasarkan prinsip pengelolaan satuan pendidikan secara umum.

C. PRINSIP PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN

Meski terdapat perbedaan organ penyelenggara satuan pendidikan antara Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta, pengelolaan satuan pendidikan di Indonesia harus mengacu pada prinsip sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010.

Pengelolaan SMA di Indonesia harus mengacu pada prinsip yakni:

1. Nirlaba

Satuan pendidikan harus dikelola dengan prinsip nirlaba. Maksudnya, tujuan utama penyelenggaraan satuan pendidikan tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih dari hasil kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan di sekolah tersebut. Dengan demikian, kehadiran sekolah tidak untuk mencetak laba.

2. Akuntabel

Setiap sekolah, baik negeri maupun swasta, harus dapat mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan. Pertanggungjawaban oleh sekolah negeri ditujukan kepada pemangku kepentingan, yakni pemerintah selaku penyelenggara sekolah dan masyarakat yang direpresentasikan oleh komite sekolah serta orang tua peserta didik. Sedangkan pertanggungjawaban sekolah swasta adalah pemerintah selaku pembina, lembaga atau yayasan selaku penyelenggara, komite sekolah serta orang tua peserta didik.

3. Berorientasi pada Penjaminan mutu

Secara prinsip setiap satuan pendidikan harus memiliki sistem penjaminan mutu, baik dalam aspek input, layanan atau proses pendidikan, serta pencapaian hasil (output) yang terus meningkat. Salah satu indikator penjaminan mutu adalah pencapaian Standar Nasional Pendidikan yang terus didorong secara berkelanjutan.

4. Transparan

Pengelolaan satuan pendidikan harus dilakukan secara terbuka dan setiap satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan.

5. Menyediakan akses yang berkeadilan

Satuan pendidikan pada prinsipnya harus memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian. Satuan pendidikan juga wajib memberikan layanan pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi. Selain itu, setiap satuan pendidikan wajib menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang membutuhkan pendidikan khusus, dan layanan khusus.

D. PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN SMA

1. Pengelolaan Sekolah Negeri

a. Tata Kelola Sekolah

Pengelolaan satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah menggunakan tata kelola sebagai berikut:

1. Kepala sekolah menjalankan manajemen berbasis sekolah untuk dan atas nama Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Komite sekolah memberi bantuan pengarahannya, pertimbangan, dan melakukan pengawasan akademik kepada dan terhadap kepala sekolah.

Setiap sekolah wajib menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang mengikat:

- a. Satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- b. Lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- c. Peserta didik satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- d. Orang tua/wali peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- e. Pendidik dan tenaga kependidikan di satuan atau program pendidikan.

- kan yang bersangkutan; dan
- f. Pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan.

Dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, setiap sekolah wajib mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sistem informasi pendidikan sekolah merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional. Sistem informasi pendidikan dimaksudkan untuk memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

b. Kebijakan Pendidikan

Pengelolaan satuan pendidikan menengah umum dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Setiap satuan pendidikan SMA harus bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di satuan pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan “kebijakan pendidikan” dalam lingkup sekolah.

Yang dimaksud kebijakan pendidikan di sini adalah segala hal terkait kebijakan dalam pengelolaan pendidikan di sekolahnya yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS); dan peraturan satuan pendidikan.

Semua dokumen kebijakan sekolah itu harus menjadi acuan yang sifatnya mengikat bagi semua pihak yakni:

- a. sekolah yang bersangkutan;
- b. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan yang bersangkutan;
- c. peserta didik di satuan pendidikan yang bersangkutan;
- d. orang tua/wali peserta didik di satuan pendidikan yang bersangkutan;
- e. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
- f. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan.

Kebijakan tersebut harus selaras dengan kebijakan pemerintah, kebi-

jakan pemerintah provinsi.

c. Anggaran

Setiap sekolah diwajibkan mengalokasikan anggaran agar proses pendidikan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Alokasi anggaran yang ditetapkan berasal dari berbagai sumber yang sah, yakni pemerintah, pemerintah daerah, serta berasal dari sumbangan dan bantuan masyarakat. Manajemen sekolah memiliki otonomi untuk mengelola anggaran sekolah sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing sekolah. Setiap sekolah wajib menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal pelayanan pendidikan di sekolahnya.

d. Jaminan layanan

Setiap SMA, sesuai dengan kewenangannya wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus.

Secara terinci kewajiban sekolah negeri adalah sebagai berikut:

- » Wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berke-warganegaraan Indonesia, yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru.
- » Wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi.
- » Wajib menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi dan yang orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi. Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik.

e. Jaminan Mutu

Setiap SMA wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan. Dan dalam melaksanakan tugasnya, SMA bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.

Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan SMA, sesuai dengan keten-

tuan peraturan perundang-undangan, mengikuti:

1. Akreditasi satuan pendidikan;
2. Sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
3. Sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

f. Pembinaan Siswa Berkelanjutan

Setiap sekolah wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.

Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan dan/atau program pendidikan melakukan secara teratur kompetisi di satuan atau program pendidikan dalam bidang:

- a. Ilmu pengetahuan;
- b. Teknologi;
- c. Seni; dan/atau
- d. Olahraga.

Satuan atau program pendidikan memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengelolaan Sekolah Swasta

a. Tata Kelola

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan pendidikan.

Menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi:

- a. Yayasan/lembaga/organisasi yang bersangkutan;

- b. Satuan pendidikan;
- c. Lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan;
- d. Peserta didik;
- e. Orang tua/wali peserta didik;
- f. Pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- g. Pihak lain yang terikat dengan sekolah.

Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di satuan atau program pendidikan, sekolah swasta mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sistem informasi ini merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional dan memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan dan/atau program pendidikan.

b. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan yang ditempuh sekolah swasta harus mengacu pada kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Kebijakan pendidikan tersebut dituangkan dalam peraturan sekolah swasta tersebut, di mana peraturan tersebut menjadi pedoman bagi:

- a. Yayasan/lembaga/organisasi yang bersangkutan;
- b. Satuan pendidikan;
- c. Lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan;
- d. Peserta didik;
- e. Orang tua/wali peserta didik;
- f. Pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- g. Pihak lain yang terikat dengan sekolah.

Sekolah swasta juga mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan satuan pendidikan yang terkait sesuai dengan kebijakan pendidikan.

c. Anggaran

Sekolah swasta wajib mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

d. Jaminan layanan

Sekolah swasta menjamin kebijakan peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus.

e. Jaminan mutu

Penyelenggara sekolah swasta juga menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan.

Dalam melaksanakan tugasnya sekolah swasta bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan. Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan pihak penyelenggara memfasilitasi:

- a. akreditasi satuan pendidikan;
- b. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
- c. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Dalam konteks sekolah berbasis keunggulan lokal, maka penyelenggara sekolah swasta memfasilitasi, membina, dan melindungi sekolah berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan satuan pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan atau program pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

Dalam konteks penjaminan mutu, penyelenggara sekolah swasta juga memfasilitasi sertifikasi internasional pada satuan pendidikan

f. Pembinaan Siswa Berkelanjutan

Penyelenggara sekolah swasta juga memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.

Selain itu, juga menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur

dan mandiri kompetisi di satuan pendidikan dalam bidang:

- a. Ilmu pengetahuan;
- b. Teknologi;
- c. Seni; dan/atau
- d. Olahraga.

E. RUANG LINGKUP OPERASIONAL MBS

Pada prinsipnya, sesuai kebijakan pemerintah, pengelolaan sekolah oleh manajemen satuan pendidikan meliputi lingkup yang luas. Secara lebih terinci masing-masing uraian mengenai otonomi sekolah dalam masing-masing bidang manajemen adalah sebagai berikut:

1. Rencana strategis dan operasional;

Setiap sekolah pada prinsipnya memiliki kewenangan dalam merencanakan mau di bawa ke mana sekolah yang dikelolanya. Sekolah menentukan rencana strategis yang akan dicapai di masa yang akan datang. Sekolah menyusun roadmap sendiri dengan tujuan yang ditetapkan dengan tetap mengacu pada kebijakan daerahnya.

a. Menentukan Visi Sekolah

Sekolah memiliki tanggungjawab dan wewenang untuk menentukan dan mengembangkan visi sekolahnya. Dikomandoi oleh Kepala Sekolah, dengan melibatkan kedua organ sekolah, setiap sekolah menentukan sendiri visi sekolah, berupa arah mau di bawa ke mana sekolah. Oleh karena itu, visi sekolah:

- a. merupakan cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam penyusunan visi sekolah, melibatkan semua warga sekolah.
- b. harus mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan
- c. dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional;
- d. diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan memperhatikan masukan komite sekolah;

- e. disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan;
- f. ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

b. Menentukan Misi Sekolah

Sekolah merumuskan dan menetapkan misi serta mengembangkannya sesuai dengan kondisi dan perkembangan. Oleh karena itu, misi sekolah:

- a. memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah madrasah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
- b. merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu;
- c. menjadi dasar program pokok sekolah/madrasah;
- d. menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah/madrasah;
- e. memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program sekolah/madrasah;
- f. memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan unit sekolah/madrasah yang terlibat;
- g. dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah;
- h. disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan;
- i. ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

c. Menentukan Tujuan Sekolah

Sekolah merumuskan dan menetapkan Tujuan sekolah serta mengembangkannya sesuai dengan kondisi dan perkembangan. Oleh karena itu, Tujuan sekolah:

- a. menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan);
- b. mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat;

- c. mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah/madrasah dan Pemerintah;
- d. mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah; disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan.

d. Merancang Rencana Kerja Sekolah

Sebagai bagian dari Manajemen Berbasis sekolah, maka setiap sekolah dituntut membuat:

- a. rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan;
- b. rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah.
- c. Rencana kerja jangka menengah dan tahunan sekolah:
 - i. disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah/madrasah dan disahkan berlakunya oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Pada sekolah/madrasah swasta rencana kerja ini disahkan berlakunya oleh penyelenggara sekolah madrasah;
 - ii. dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait.
 - iii. Rencana kerja empat tahun dan tahunan disesuaikan dengan persetujuan rapat dewan pendidik dan pertimbangan komite sekolah/madrasah.
 - iv. Rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan sekolah/madrasah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
 - v. Rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai:
 - a. kesiswaan;
 - b. kurikulum dan kegiatan pembelajaran;

- c. pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya;
- d. sarana dan prasarana;
- e. keuangan dan pembiayaan;
- f. budaya dan lingkungan sekolah;
- g. peranserta masyarakat dan kemitraan;
- h. rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu.

2. Struktur organisasi dan tata kerja;

Struktur organisasi sekolah berisi tentang sistem penyelenggaraan dan administrasi yang diuraikan secara jelas dan transparan. Semua pimpinan, pendidik, dan tenaga kependidikan mempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas tentang keseluruhan penyelenggaraan dan administrasi sekolah/madrasah.

a. Kepemimpinan Sekolah

- i. Setiap sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah. Penetapan kriteria kepala sekolah mengacu kepada ketentuan dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan.
- ii. Kepala SMA dibantu minimal tiga wakil kepala sekolah untuk bidang akademik, sarana-prasarana, dan kesiswaan. Dalam hal tertentu atau sekolah yang masih dalam taraf pengembangan, kepala sekolah madrasah dapat menugaskan guru untuk melaksanakan fungsi wakil kepala sekolah. Pemerintah, sebagai pengelola, juga dapat menentukan jumlah wakil kepala sekolah sesuai kebutuhan dan kondisi sekolah;
- iii. Wakil kepala sekolah dipilih oleh dewan pendidik, dan proses pengangkatan serta keputusannya, dilaporkan secara tertulis oleh kepala sekolah kepada institusi di atasnya. Dalam hal sekolah swasta, institusi dimaksud adalah penyelenggara sekolah (yayasan).
- iv. Kepala dan wakil kepala sekolah memiliki kemampuan memimpin yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan sesuai dengan

Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan.

- v. Tugas Kepala sekolah:
 - a. menjabarkan visi ke dalam misi target mutu;
 - b. merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai;
 - c. menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah;
 - d. membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu;
 - e. bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah;
 - f. melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting sekolah madrasah. Dalam hal sekolah madrasah swasta, pengambilan keputusan tersebut harus melibatkan penyelenggara sekolah/madrasah;
 - g. berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - h. menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sanksi atas pelanggaran peraturan dan kode etik;
 - i. menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik;
 - j. bertanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum;
 - k. melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah madrasah;
 - l. meningkatkan mutu pendidikan;
 - m. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
 - n. memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah;

- o. membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan;
- p. menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien, dan efektif;
- q. menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat;
- r. memberi contoh/teladan/tindakan yang bertanggung jawab.
- s. Kepala sekolah dapat mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangan kepada wakil kepala sekolah sesuai dengan bidangnya.

b. Prinsip dasar Organisasi Sekolah

Hal yang mengatur tentang Struktur organisasi sekolah:

- a. memasukkan unsur staf administrasi dengan wewenang dan tanggungjawab yang jelas untuk menyelenggarakan administrasi secara optimal;
- b. dievaluasi secara berkala untuk melihat efektifitas mekanisme kerja pengelolaan sekolah;
- c. diputuskan oleh kepala sekolah dengan mempertimbangkan pendapat dari komite sekolah.

3. Sistem audit dan pengawasan internal

Secara internal, pihak sekolah harus memiliki system audit dan pengawasan internal. Sistem ini untuk menjamin keterlaksanaan proses pendidikan

a. Program Pengawasan

- i. Program pengawasan internal setiap sekolah disusun secara mandiri oleh sekolah. Sekolah menyusun program pengawasan secara obyektif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
- ii. Penyusunan program pengawasan di sekolah didasarkan pada

Standar Nasional Pendidikan.

- iii. Program pengawasan disosialisasikan ke seluruh pendidik dan tenaga kependidikan. Pengawasan pengelolaan sekolah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- iv. Pemantauan pengelolaan sekolah dilakukan oleh komite sekolah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkelanjutan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan.
- v. Supervisi pengelolaan akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah.
- vi. Guru melaporkan hasil evaluasi dan penilaian sekurang-kurangnya setiap akhir semester yang ditujukan kepada kepala sekolah dan orang tua/wali peserta didik.
- vii. Tenaga kependidikan melaporkan pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing sekurang-kurangnya setiap akhir semester yang ditujukan kepada kepala sekolah. kepala sekolah, secara terus menerus melakukan pengawasan pelaksanaan tugas tenaga kependidikan.
- viii. Kepala sekolah melaporkan hasil evaluasi kepada komite sekolah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- ix. Pengawas sekolah melaporkan hasil pengawasan di sekolah kepada bupati/walikota melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan sekolah yang bersangkutan, setelah dikonfirmasi pada sekolah terkait.
- x. Setiap pihak yang menerima laporan hasil pengawasan menindaklanjuti laporan hasil pengawasan tersebut dalam rangka meningkatkan mutu sekolah madrasah, termasuk memberikan sanksi atas penyimpangan yang ditemukan.
- xi. Sekolah mendokumentasikan dan menggunakan hasil pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan serta catatan tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja sekolah/madrasah, dalam pengelolaan pembelajaran dan pengelolaan secara keseluruhan.

b. Evaluasi Diri

Sekolah menetapkan prioritas indikator untuk mengukur, menilai kinerja, dan melakukan perbaikan dalam rangka pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan dan secara periodik melakukan evaluasi diri. Adapun langkah yang dilakukan adalah:

1. Evaluasi proses pembelajaran secara periodik, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, pada akhir semester akademik;
2. Evaluasi program kerja tahunan secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, pada akhir tahun anggaran sekolah.

Evaluasi diri sekolah dilakukan secara periodik berdasar pada data dan informasi yang sah.

c. Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum

Proses evaluasi dan pengembangan KTSP dilaksanakan secara:

- » komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir;
- » berkala untuk merespon perubahan kebutuhan peserta didik dan masyarakat, serta perubahan sistem pendidikan, maupun perubahan sosial;
- » integratif dan monolitik sejalan dengan perubahan tingkat mata pelajaran;
- » menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak meliputi: dewan pendidik, komite sekolah, pemakai lulusan, dan alumni.

d. Evaluasi Pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- » Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan direncanakan secara komprehensif pada setiap akhir semester dengan mengacu pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
- » Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi kesesuaian penugasan dengan keahlian, keseimbangan beban kerja, dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas.
- » Evaluasi kinerja pendidik harus memperhatikan pencapaian prestasi dan perubahan-perubahan peserta didik.

e. Akreditasi Sekolah

Sekolah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengikuti akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekolah meningkatkan status akreditasi, dengan menggunakan lembaga akreditasi eksternal yang memiliki legitimasi. Sekolah harus terus meningkatkan kualitas kelebagaannya secara holistik dengan menindaklanjuti saran-saran hasil akreditasi.

4. Sistem penjaminan mutu internal

Standar pelayanan minimal merupakan batas minimal pemenuhan standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan dasar dan menengah, serta pencapaian target pembangunan pendidikan nasional.

Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

F. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN

Akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan wajib diwujudkan paling sedikit dengan:

1. menyelenggarakan tata kelola satuan pendidikan berdasarkan prinsip tata kelola satuan pendidikan.
2. menyeimbangkan jumlah peserta didik, kapasitas sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan serta sumber dayalainnya;
3. menyelenggarakan pendidikan tidak secara komersial; dan
4. menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan laporan keuangan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. □



DISPLAY
BUKU BARU

RUANG BACA

BAB IV

PROFIL MBS DI SMA



Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMA ditemukan sangat beragam bentuknya. Terdapat sekolah yang sangat mandiri dengan sistem pengelolaan berbasis sekolah yang kuat, tapi tidak sedikit yang masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada manajemen di pemerintah atau pada pihak penyelenggaranya. Oleh karena itu, untuk memotret bagaimana implementasi MBS di SMA, pada bab ini akan disajikan profil sekolah dengan fokus pada pengelolaan, khususnya pada kemandirian

Pemilihan sekolah yang ditampilkan profilnya dilakukan secara acak, karena pada prinsipnya setiap sekolah dikelola secara khas menyesuaikan dengan kondisi di daerahnya. Hanya saja, masih belum semua sekolah memahami tentang MBS secara komprehensif, sehingga pengungkapan MBS tidak diperoleh secara utuh.



Oleh karena itu, penyajian profil sekolah ini semata hanya untuk melihat sampai sejauh mana aplikasi MBS oleh sekolah, apa yang menjadi tantangan, hambatan dan peluang yang dimiliki sekolah. Juga untuk melihat perbedaan implementasi antara sekolah pemerintah dan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Sajian profil sekolah ini, belum mewakili semua sekolah di seluruh provinsi, akan tetapi paling tidak mewakili kondisi sekolah yang sangat beragam di Tanah Air. Mulai dari sekolah besar, sekolah kecil, sekolah di kota besar, sekolah di kota kecil dan dengan beragam penerapan dalam manajemennya.

Semoga sajian ini membuka khazanah baru dalam pengelolaan satuan pendidikan SMA di Tanah Air. □



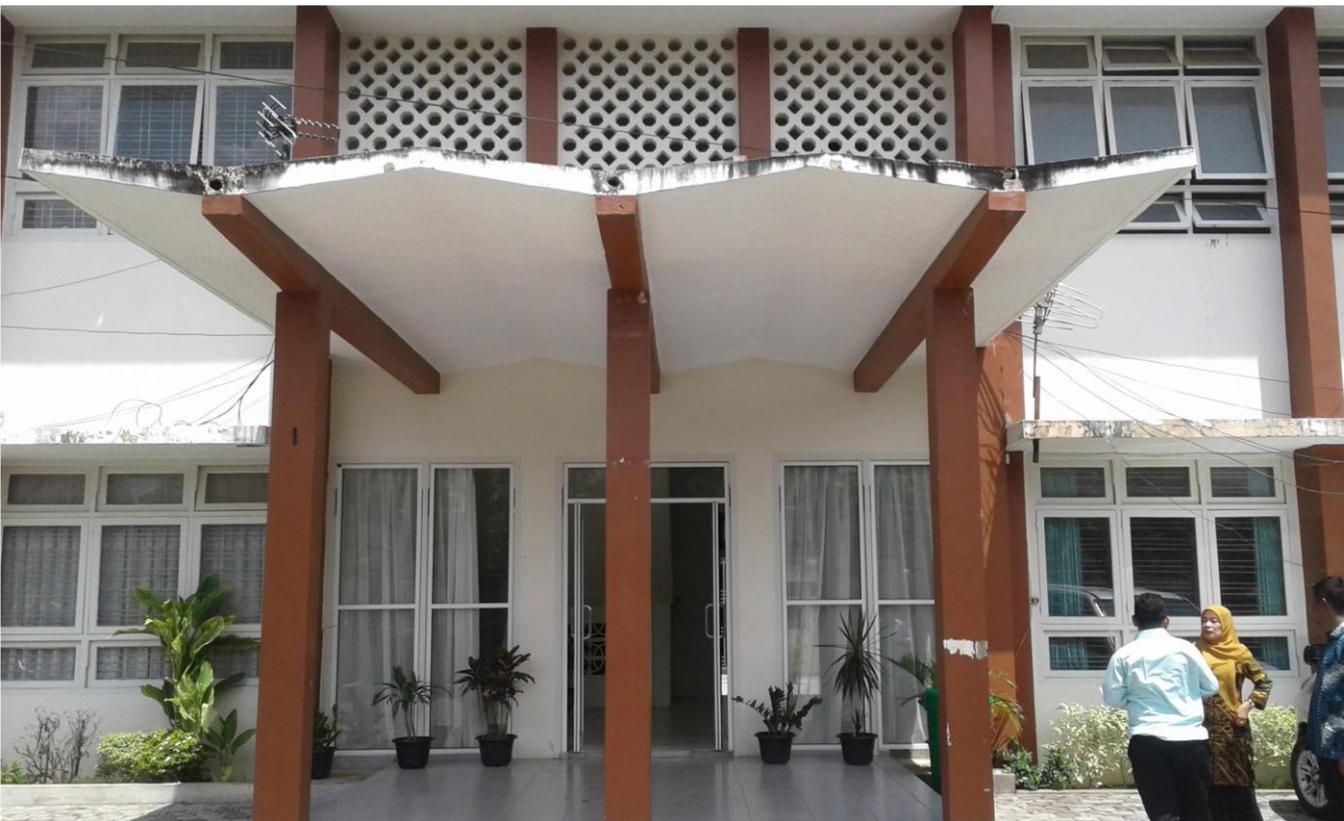


SMA CUT MEUTIA BANDA ACEH - ACEH

Fokus Membangun Semangat Bersama

Sekolah yang memiliki enam rombongan belajar ini punya tantangan besar dalam penyelenggaraan layanan pendidikan: membangun semangat peserta didik dan menjaga keberlangsungan sekolah.

SMA Cut Meutia berlokasi di Jalan Tgk Cik Ditiro Dusun Pahlawan, Kelurahan Ateuk Pahlawan, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Sekolah yang didirikan pada tahun 1987 ini adalah SMA swasta yang bersaing ketat dalam memberikan layanan pendidikan tingkat SMA dengan 38 SMA yang ada di Banda Aceh, baik SMA negeri maupun swasta. Tentu saja, “kompetisi” yang cu-



Wajah dan tampak depan SMA Cut Meutia (kiri dan atas)

kup ketat tersebut menjadi tantangan besar bagi para penyelenggaranya. Pun demikian dengan SMA Cut Meutia, mereka sangat merasakan betapa upaya memberikan layanan pendidikan di Banda Aceh menghadapi tantangan yang cukup berat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala SMA Cut Meutia, Novarina, sejauh ini jumlah peserta didik yang belajar di sekolahnya berkisar di bawah 10 rombongan belajar saja. Untuk tahun pelajaran 2018-2019, lanjut Novarina, peserta didik SMA Cut Meutia ada 58 siswa yang terdiri dari 29 laki-laki, 29 perempuan. “Dalam operasional kami didukung oleh 15 pendidik dan tenaga kependidikan,” jelasnya.

SMA Cut Meutia yang memiliki peserta didik dengan enam rombongan belajar ini memang menjadi tantangan sendiri. Bagaimana dengan siswa yang mencapai 58 peserta didik tersebut bisa terlayani dengan maksimal. “Namun ini bukan hal yang mudah, selain keterbatasan ruang untuk memberikan layanan pendidikan, karakter peserta didik juga cukup unik apalagi peserta didik laki-laki,” ujar



Peserta didik SMA Cut Meutia

Novarina.

MEMBANGUN KEBERSAMAAN

Dalam pengelolaan sekolah, menurut Novarina, sekolah menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS). “Kami menerapkan MBS juga dilatarbelakangi oleh kurangnya minat siswa untuk bersekolah di sini. Peserta didik yang ada juga selama ini harus terus dibangun semangat belajarnya. Karena itu, semangat bersama baik antarsiswa maupun guru menjadi agenda penting agar sekolah lebih maju lagi ke depannya,” ujarnya.

Langkah MBS yang dilakukan, lanjut Novarina, melalui pola penerapan pembentukan tim guru yang fokus dalam melaksanakan pengembangan kurikulum, melaksanakan supervisi guru di kelas, dan menyusun perangkat pembelajaran Kurikulum 2013. “Penerapan MBS ini dengan target adanya peningkatan mutu sekolah dan seluruh ekosistem SMA Cut Meutia mampu mengimplementasikannya dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Di luar itu untuk menambah daya tampung sekolah, kami juga melakukan jemput bola,” kata Novarina.

Meski sekolah kecil, ihwal penyelenggaraan pendidikan, sekolah tetap bersikap independen. “Sekolah tak bisa diintervensi pihak luar, termasuk dari yayasan,” kata Novarina. Ia menambahkan, dalam rangka menyelesaikan persoalan yang dihadapi sekolah dalam proses pembelajaran, misalnya, sekolah memecahkan berbagai persoalan secara sendiri. “Keputusan diambil melalui musyawarah atau rapat, jadi merupakan kesepakatan bersama,” ujarnya.

Kemudian, Novarina menuturkan, acuan pengelolaan merujuk pada beberapa acuan. Di antaranya mengacu pada visi dan misi sekolah, pola penerapan KTSP, pengawasan, serta pengembangan sekolah. Namun di balik semua itu, dengan



Suasana di dalam kelas

peserta didik yang masih terbatas, sejauh ini dari sisi finansial SMA Cut Meutia belum memiliki kemandirian. Sekolah belum sepenuhnya mandiri dan masih mengandalkan pada bantuan finansial dari APBN serta dana masyarakat.

“Pemenuhan kebutuhan disiasati dari dana yang ada. Terus terang kami belum bisa berinovasi karena siswa juga terbatas,” jelasnya. Ia menambahkan, dalam beberapa hal, sekolah berkerja sama dengan komite sekolah dalam pengembangan sekolah. “Upaya ini kami harapkan mampu menjadi jalan untuk pihak sekolah berkomunikasi dengan masyarakat dan warga sekolah sehingga bisa meningkatkan kualitas yang baik dan bisa menghasilkan peserta didik yang berkualitas.” □

Upaya Merampingkan Birokrasi Sekolah

Cara kerja partisipatif diterapkan SMAN 1 Sukawati dengan melakukan kerja sama dengan banyak pihak. Ke depan, pihak sekolah ingin memangkas birokrasi agar lebih ramping dan mampu menjadi sekolah unggul.



Lokasi SMAN 1 Sukawati di Kabupaten Gianyar Bali terbilang strategis. Tak jauh dari salah satu pasar Sukawati yang menjadi primadona turis lokal maupun internasional. Sejak 2004, SMAN ini sudah menerapkan MBS. “Hal ini dilatarbelakangi karena efektivitas proses belajar mengajar belum tinggi, mutu sekolah belum baik dan partisipasi warga sekolah masih rendah,” tutur Ketut Kaptika, wakasek SMAN 1 Sukawati. Intinya, tegas Kaptika, penerapan MBS adalah untuk memperbaiki kualitas pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang

sudah diatur dalam kebijakan pemerintah, bentuk penerapan MBS berupa otonomi, keputusan partisipatif, dan pendekatan profesional.

Melalui pendekatan profesional dan humanistik, sejauh ini, menurut Kaptika, implementasi kegiatan pembelajaran berjalan efektif. Dalam pengambilan keputusan dilakukan mulai dari forum rapat dewan guru secara rutin dan partisipasi warga sekolah terus diupayakan agar optimal. Meski mengusung konsep partisipatif, ada ranah tertentu yang menjadi hak penuh sekolah tanpa campur tangan pihak luar. “Hal-hal yang tidak bisa diintervensi antara lain pembagian tugas mengajar, peningkatan sumber daya sekolah, dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hasil belajar peserta didik,” terang Kaptika.

Prinsip partisipatif dilakukan sekolah ini dalam pengambilan keputusan terkait program sekolah. “Contohnya, program yang terkait dengan peserta didik, keputusannya kami ambil setelah melibatkan partisipasi warga sekolah melalui rapat rutin atau rapat dewan guru,” jelasnya. Adapun acuan pengelolaan sekolah, merujuk pada regulasi yang mengatur tentang otonomi sekolah.

UPAYA MEMANDIRIKAN SEKOLAH

Ibarat dua sisi mata uang, di satu sisi kemandirian sejumlah bidang sudah ter-



Gerbang depan SMAN 1 Sukawati (kiri), suasana di dalam perpustakaan (atas)



Aktivitas peserta didik di dalam perpustakaan.

bentuk, sementara di sisi lain belum sepenuhnya mandiri. Kaptika mengakui bahwa sekolah belum sepenuhnya mandiri karena masih ada pengaruh dari warga sekolah, lingkungan sekolah, komite sekolah, instansi atasan sekolah, dan kebijakan Disdik Provinsi. Masih menurut Kaptika, kemandirian di sekolah SMAN 1 Sukawati mencakup bidang pengelolaan kurikulum dan bidang tenaga didik. Sebaliknya, yang belum mandiri adalah bidang sumber dana dan pengelolaan peserta didik. Sebagai konsekuensinya, dalam bidang finansial, masih bergantung pada sumber dana bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yakni dan BOS, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan dana dari orangtua siswa.

Sejauh ini, upaya untuk memenuhi kebutuhan sekolah dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), serta mencari sponsor untuk kegiatan tertentu. Pihak sekolah, lanjut Kaptika, belum melakukan upaya inovatif untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sekolah. “Kami baru pada taraf berkreasi mencari sponsor,” ujar Kaptika.

Adapun dalam pembelajaran, sekolah melakukan perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kemudian kebutuhan fasilitas ruang belajar dan guru dikelola secara mandiri. Lalu, upaya sekolah untuk memenuhi kualifikasi dan kompetensi PTK adalah dengan memotivasi



Aktivitas peserta didik SMAN 1 Sukawati (atas dan kanan)

guru yang belum berkualifikasi S1 dan dalam merekrut tenaga honor, baik guru maupun pegawai, disesuaikan dengan standar yang ada. Terkait pemenuhan kebutuhan sarana prasarana, pihak



sekolah melakukan dua cara. Dalam hal ini, sekolah terlebih dahulu melakukan analisis kebutuhan sarana prasarana. Selanjutnya, sekolah akan mengkoordinasikan dengan komite jika menggunakan dana komite, dan menuangkannya dalam RKAS di setiap sarana prasana yang dibutuhkan.

Guna memajukan kualitas sekolah sekaligus dalam konteks MBS, pihak sekolah juga melakukan kerja sama dengan banyak pihak antara lain BLH, Dinas Kebersihan dan Keajaaran untuk mengadakan Kantin Kejujuran, lalu dengan BKKBN untuk Sekolah Siaga Kependudukan. “Kerja sama dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara sekolah dan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan dan selalu melakukan evaluasi setiap akhir tahun pelajaran,” papar wakaseknya. Sejalan dengan itu, komite sekolah selalu siap bekerja sama dalam hal program sekolah seperti terlibat dalam rapat yang berkaitan dengan kebijakan sekolah. “Komite sekolah juga terlibat aktif dalam penggalangan dana dari orangtua siswa,” ucap Kaptika lagi. Harapan ke depan, targetnya kualitas sekolah menjadi unggul dengan merampingkan hal-hal yang bersifat birokratis. □



SMA DIAN HARAPAN - BANTEN

Memburu Harapan di Dian Harapan

Sempat ditutup oleh pihak yayasan karena pembentukan unit pendidikan yang lain, SMAS Dian Harapan kembali dibuka atas desakan masyarakat dan para orangtua siswa yang sangat membutuhkan kehadirannya.

Sekolah yang sempat ditutup pada tahun 2010 ini, didirikan pada tahun 1997. Alasan penutupannya ketika itu karena yayasan mendirikan dan membentuk UPH College. Namun, pada tahun 2017, berdasarkan dorongan dari orangtua dan masyarakat, SMA Dian Harapan, yang berada di kawasan Lippo Village, Tangerang, Banten, ini, dibuka kembali dan diakreditasi pada November 2018.

Adapun kurikulum SMAS Dian Harapan tetap mengacu pada kurikulum 2013.



Lapangan (kiri) salah satu sudut sekolah (kanan atas) gerbang depan sekolah (kanan bawah)

Namun, pihak yayasan memiliki tim pengembang kurikulum sendiri. Atas dasar kurikulum 2013, mereka membangun kurikulum SMAS Dian Harapan yang disesuaikan dengan misi dan visi Dian Harapan.

Atas dasar kurikulum inilah pemberlakuan manajemen berbasis sekolah di SMAS Dian Harapan dibangun secara otonomi dan mandiri. Sebagai contoh, dalam pengelolaannya, di SMAS Dian Harapan, yang ada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH), sekolah menggunakan kurikulum 2013 yang dipadukan dengan visi dan misi sekolah, yang berorientasi pada keutamaan kristus dalam menciptakan lulusan yang memiliki pandangan sesuai dengan firman Tuhan.

PEMBAGIAN KEWENANGAN

Sebenarnya, Dian Harapan tidak hanya menyelenggarakan pendidikan di jenjang SMA saja. Ada juga TK, SD, dan SMP. Dan, dalam penyelenggaraannya pula Dian Harapan lebih mengedepankan nilai-nilai kristen dan menciptakan hubungan yang baik bukan hanya antara guru dan murid, tetapi juga antara



Aktivitas pembelajaran di dalam kelas

guru dan orangtua. Untuk mengatur hubungan ini, terdapat buku khusus yang tentang sejauh mana peranan orangtua dan guru dalam mendukung pembelajaran siswa di sekolah.

Dalam pengelolannya, sekolah mengacu pada ketetapan yayasan. Secara manajemen, yayasan membolehkan satu kepala sekolah untuk SMP dan SMA. Tetapi peraturan pemerintah tidak memperbolehkan hal ini. Maka, secara ke-dinasan, sekolah memiliki wakil kepala sekolah bagian kurikulum yang diakui sebagai kepala sekolah. Selain kepala sekolah, ada *head of school* yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan mengenai keuangan. *Head of school* ini ditunjuk oleh yayasan, sementara kepala sekolah bertanggung jawab pada pendisiplinan dan pembuatan program sekolah.

Yang menarik, di SMAS Dian Harapan pembagian tugas dan kewenangannya jelas antara yayasan dan sekolah. Misalnya, soal dana sekolah, pengelolannya dilakukan secara mandiri oleh sekolah. Tetapi, ada beberapa hal yang tetap harus didiskusikan dengan yayasan. Begitu pula soal rekrutmen pegawai. Yayasan mempunyai hak penuh untuk menerima atau menolak pelamar. Sementara sekolah berperan pada test akhir berupa *microteaching* dan *training*.

Dalam kegiatan belajar mengajar, agar pembelajaran dilakukan secara efektif, ada *bonding* yang kuat antara guru dan siswa juga dengan orangtua. Sekolah membatasi satu kelas hanya dapat diisi maksimal 27 siswa. Tujuannya agar wali kelas mengetahui betul bagaimana kondisi anak didiknya. Tidak hanya tentang



Suasana kantin sekolah

kondisi siswa dalam pembelajaran, tetapi juga mengenai kondisi psikologisnya.

SEKOLAH DI MATA SISWA

Bagi siswa SMAS Dian Harapan, sekolah ini dirasa cocok buat mereka. “Sekolah di sini cocok buat kami, karena sesuai dengan cita-cita,” ujar salah seorang siswa. Baginya, Dian Harapan merupakan tempat menimba ilmu karena menerapkan ilmu kekristenan dan memiliki guru yang berpengalaman.

Sebagai sekolah Kristen, Dian Harapan betul-betul menerapkan ilmu kekristenan dan mengenai ibadah seluruh guru, staf dan siswa pun sangat diperhatikan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ibadah setiap pagi sebelum memulai aktivitas dan ada ibadah khusus siswa di kapel yang telah disediakan di gedung sekolah. Selain siswa, ada juga alokasi waktu ibadah khusus untuk guru dan staf sekali dalam satu pekan. Selain itu, masih menurut siswa, sekolah memfasilitasi minat dan bakat siswa. Terdapat fasilitas yang lengkap yang dijaga dengan baik. Dan, siswa betul-betul dipersiapkan untuk dapat meraih impiannya. Itu tergambar dalam *dream board* yang dibuat ketika awal masa sekolah mereka di Dian Harapan. *Dream board* ini juga berfungsi sebagai pengingat di kala siswa melenceng dari tujuan awalnya.

Saling mengingat, ini memang kewajiban. Dan sekolah yang baik, selain ditunjang oleh manajemen yang rapi, pun harus selalu memberikan keteladan bagi para siswanya, agar mereka betul-betul dapat memenuhi harapan menjadi siswa yang siap menghadapi tantangan zaman. □



SMAN 1 KAUR - BENGKULU

Agar Siswa tak ‘Lari’ ke Pantai

Dalam menjalankan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), SMAN 1 Kaur banyak memberdayakan komite sekolah. Ke depan, dijangki pula kerja sama dengan pengusaha di Kota Bintuhan.

Ada cerita lucu sekaligus memprihatinkan. Sekitar tujuh tahun lalu, SMAN 1 Kaur sering kali ‘kehilangan’ siswa ketika jam pelajaran berlangsung. Saat berganti pelajaran, misalnya, tak jarang guru menanyakan keberadaan peserta didik. Sebut saja Fulan, biar gampang. Dicarilah ke sana ke mari. Beberapa teman turut membantu. Ada yang memanggil, ada pula yang memeriksa bagian luar sekolah. “Mencari siapa?” tanya seorang siswa kelas lain. “Si Fulan, apakah kau melihat? Pak guru mencari,” jawab siswa yang tadi mencari temannya.



Gerbang depan SMAN 1 Kaur (kiri), kepala sekolah sedang memberikan arahan kepada peserta didik (atas)

“Oh, si Fulan sedang ke pantai. Biasalah,” jawabnya. Siswa yang mencari pun lega, dan menyampaikan kepada guru bersangkutan. “Sedang ke pantai, Pak. Biasalah.”

Mendengar laporan tersebut, guru pun mengangguk. Pelajaran dilanjutkan.

Kalau begitu, apa arti ‘biasalah’? Jawaban tersebut memang terdengar aneh. Namun bagi kalangan guru dan para siswa, mereka sangat memahami. Dan ternyata, yang dimaksud adalah, siswa tersebut sedang buang air kecil ataupun buang air besar di pantai, yang jaraknya memang sangat dekat dengan sekolah. Sekitar 200 meter saja.

Wah! Siswa buang air di pantai, sama artinya bahwa fasilitas sekolah, dalam hal ini toilet sangat tidak memadai. Dan itu juga berarti bahwa kegiatan belajar mengajar menjadi sangat terganggu. “Makanya, dalam koridor Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), kami harus mencari upaya agar bisa membuat fasilitas toilet tersebut,” jelas Kepala SMAN 1 Kaur, M. Jalil.

Alhasil, pihak sekolah kemudian berdiskusi dengan masyarakat, dalam hal ini adalah komite sekolah dan juga para guru. Tujuannya, untuk membicarakan dan mencari solusi atas berbagai perkembangan sekolah. Dalam persoalan siswa ‘lari’ ke pantai tadi, tentu saja yang dibahas adalah mengenai minimnya toilet sekolah.

“Ketika itu memang hanya ada dua toilet. Itu juga dengan toilet guru. Meski saat



itu siswa belum sebanyak sekarang, 500 siswa, namun tetap saja sangat minim. Dan alhamdulillah, melalui mekanisme komite sekolah tadi, akhirnya kami bisa membuat prasarana toilet,” jelas Jalil.

Total jenderal, saat ini SMAN 1 Kaur sudah memiliki total 24 toilet. Selain dari komite sekolah, jumlah tersebut termasuk bantuan dari Pemerintah Pusat sebanyak dua unit. Dengan demikian, saat ini rasio antara siswa dan toilet adalah 30:1, dan itu dianggap memadai untuk memenuhi kebutuhan siswa akan fasilitas tersebut.

Pemenuhan toilet, bukan satu-satunya bentuk kemandirian yang dilakukan SMAN 1 Kaur. Beberapa pemenuhan sarana dan prasarana lain juga dilakukan, melalui mekanisme komite itu. Di antaranya adalah pembuatan drainase, area parkir, perbaikan lapangan upacara, dan juga masjid sekolah. Lapangan upacara, misalnya, sebelumnya dipenuhi lumpur jika hujan turun. Namun dengan kemandirian tadi, maka kondisi tersebut bisa diperbaiki.

“Ke depan, kami juga berencana memperluas perpustakaan, karena sekarang siswa harus berdesak-desakan jika ingin membaca atau meminjam buku,” lanjut Jalil.

TANTANGAN

SMAN 1 Kaur sendiri, menurut Jalil sudah menerapkan kemandirian sejak kebijakan Kurikulum 2013 diluncurkan. Bentuk kemandirian itu adalah dalam pelaksanaan UNBK, ekstrakurikuler, perawatan dan penambahan sarana penunjang. Dan untuk itu, maka pemenuhan kebutuhan finansial sekolah bersumber dari beberapa hal. Yaitu dana BOS, dana komite (SPP), dana bangunan, dan dana SMA rujukan.

“Katakanlah pembiayaan sekolah. Untuk pembiayaan minimal saja belum ter-



Tim paduan suara SMAN 1 Kaur yang sedang tampil (kiri), rapat pertemuan dengan orang tua peserta didik (atas)

capai, terutama operasional sekolah. Memang, dengan BOS sudah mendekati standar minimal. Jadi, standar minimalnya dulu yang kita penuhi. Lebihnya belum,” jelas Jalil.

Untuk UNBK, misalnya, SMAN 1 Kaur sudah melaksanakan sejak tahun pertama. Meski harus mendatangkan komputer dari luar sekolah, namun server tetap disiapkan oleh pihak sekolah. “Pelaksanaannya kita mandiri. Sedangkan tahun kedua, kita ajukan melalui komite sekolah dan mendapat 20 unit komputer, dan sekarang mendapat lagi 20. Jadi posisi kami, kalau disetujui maka sudah 75 unit. Cukup untuk tiga sesi,” kata Jalil.

Dalam konteks kemandirian itulah, SMAN 1 Kaur kemudian memberdayakan unsur-unsur sekolah dan orangtua siswa, dalam hal ini adalah kepala sekolah, guru, dan wali murid yang diwakili komite sekolah. “Sinergi tersebut, semua dikelola dengan komunitas keluarga SMAN 1 Kaur menjadi kebutuhan sekolah, melalui mekanisme rapat-rapat komite dan sebagainya,” imbuhnya.

Namun memang tidak semudah membalik telapak tangan. Paling sering, adalah pertanyaan dari orangtua, apakah SMAN 1 Kaur ini sekolah negeri atau swasta? Mengapa sampai harus meminta dana dari orangtua murid? “Tetapi setelah kami jelaskan, akhirnya pihak orangtua memahami. Memang besaran dana juga harus kami sesuaikan dengan kemampuan orangtua,” lanjut Jalil.

Begitupun SMAN 1 Kaur tidak melulu mengandalkan komite sekolah. Secara simultan mereka juga melakukan berbagai inovasi, termasuk melakukan penjajakan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk bidang usaha. Yang sedang dijajaki sekarang adalah kerja sama dengan perusahaan kelapa sawit dan tambak udang. Melalui kerja sama tersebut, Jalil berharap bisa meningkatkan kemandirian SMAN 1 Kaur. Semoga. □



SMAN 1 WONOSARI - DIY

Tak Melulu Andalkan Bantuan Pemerintah

Kalaupun SMAN 1 Wonosari, Yogyakarta, masih membutuhkan bantuan pembiayaan pembangunan dari pihak lain, itu semata untuk peningkatan mutu sebagai sekolah rujukan. Hanya manajemennya tetap bertumpu pada sekolah.

Sekolah dengan tempat yang strategis dan cukup mudah dijangkau masyarakat. Itulah SMAN 1 Wonosari, yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso 04 Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY Yogyakarta. Saat pertama kali memasuki kawasan sekolah, takjub yang ada. Bagaimana tidak, arsitektur gedung dan juga taman di tengah sekolah terkesan mewah. Air mancur tepat di tengah taman. Tidak jauh di sisi kanan dan kiri terdapat gazebo untuk bersantai para siswanya.

Belum cukup sampai di situ. Sekolah ini tampaknya tidak ingin berhenti membuat terpana. Arsitektur gedung sekolah yang mengelilingi taman sangat modern dan nyaman. Sungguh bukan arsitektur biasa untuk ukuran sekolah menengah atas. Sebanding dengan mewahnya gedung sekolah, fasilitas yang dimiliki pun tidak kalah hebatnya. Ruang laboratorium lengkap, mulai dari kimia, fisika, dan biologi. Masjid, ruang UKS, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang komputer, serta perpustakaan.

MENGUTAMAKAN KEMADIRIAN

Inilah hasil dari manajemen berbasis sekolah yang dilakukan oleh SMAN 1 Wonosari. “MBS ini sudah sejak lama diterapkan di sekolah ini. Bahkan oleh kepala sekolah yang terdahulu,” ujar Taufiq Salyono Kepala Sekolah SMAN 1 Wonosari.

Hasil yang matang ini tentunya diperoleh dari diskusi yang dilakukan oleh para guru serta komite agar partisipasi setiap guru dan komite menjadi lebih maksimal. Taufik pun mengungkapkan SMAN 1 Wonosari dapat dikatakan sudah menunjukkan sekolah yang mandiri. Terutama dalam pembiayaan pembangunan gedung baru, perpustakaan, dan taman. “Kita tidak pernah menerima bantuan dana untuk pembuatan gedung baru ini. Seluruhnya dari komite,” ujarnya.

Walau sudah mampu mandiri dalam hal pembangunan gedung, sekolah ini masih membutuhkan pembiayaan untuk peningkatan mutu sebagai sekolah rujukan. “Kita masih dibantu untuk kegiatan sekolah rujukan. Tahun 2016 kita mendapatkan dana sebesar 230 juta rupiah. Tahun 2017 mendapatkan 133 juta rupiah dan tahun 2018 mendapatkan Rp155 juta. Untuk masalah gedung itu kita manajemen sendiri. Selebihnya ada bantuan dana dari BOS, APBD, dan program SMA rujukan,” tambahnya.

Tidak hanya dalam hal pembangunan gedung, kemandirian lain yang diterap-



Wajah dan bangunan SMAN 1 Wonosari (kiri), ruang baca yang terdapat di salah satu sudut sekolah (atas)



Aktivitas memasak yang dilakukan peserta didik sebagai bentuk penguatan keterampilan (atas) Selasar Inspirasi B.J. Habibie, salah satu lorong sekolah (bawah)



kan sekolah yakni dalam hal pembelajaran. Kemandirian yang dilakukan yakni melalui PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Di mana para guru bersinergi dan saling membantu untuk memperbaiki proses pembelajaran. “Dulu ada *lesson study*, tapi karena ada masalah dalam pembiayaan yakni kurang dana maka kita ganti dengan PTK. Guru-guru saling berkolaborasi untuk memperbaiki pembelajaran dan ditulis menjadi PTK,” tambahnya.

MENGENJOT KERJA SAMA

Segala langkah terus diupayakan untuk meningkatkan pengembangan sekolah terutama dalam peningkatan kualitas para tenaga pendidik. Salah satu upaya yang dilakukan yakni IHT dan melakukan studi banding ke sekolah lainnya. Ti-



Suasana perpustakaan sekolah

dak hanya itu, pihak sekolah pun menggandeng instansi lain untuk lebih meningkatkan mutu sekolah. Selain dengan pihak komite dan pengawas pembina, sekolah melakukan kerja sama dengan Bank BPD DIY, dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Gunung kidul dan badan perpustakaan dan arsip daerah DIY, perguruan tinggi seperti UIN, UGM, UNY, dan UII. Hal yang sedang dicoba untuk dikembangkan yakni usaha dalam pengelolaan perpustakaan.

“Kita masih menjalin kerja sama dengan UGM untuk lebih meningkatkan pengelolaan perpustakaan. Ke depannya, perpustakaan itu memiliki metode untuk menentukan siapa pembaca terbanyak di perpustakaan,” tambahnya.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sekolah menempuh upaya melalui dana APBD sekolah yakni mengajukan tenaga kontrak di mana pegawai tersebut bekerja dengan perjanjian kontrak kerja. “Jadi kita memasukkan anggaran di APBD DIY. Kemudian BKD DIY diseleksi, setelah diterima baru kita pekerjakan dengan biaya dari APBD dengan biaya yang menjadi *COST*-nya SMAN 1 Wonosari,” tambahnya.

Sejauh menjalankan MBS di sekolah, tetap saja ada beberapa kendala yang dihadapi dalam prosesnya. Misalnya saja saat pihak sekolah sudah membentuk tim kerja, tetapi kadang-kadang ada kasus, salah satu anggotanya harus pindah tugas karena zonasi atau lain hal. Akhirnya pihak sekolah harus segera mencari pengganti dan dibutuhkan waktu kurang lebih satu tahun untuk merancang kembali tim kerja tersebut. Tapi, tak apalah. Anggap saja ibarat pelari yang sedang berancang-ancang, mundur selangkah, tapi melompat untuk beberapa langkah ke depan. □

Agar tak Bergantung pada Satu Pihak

Dalam pengambilan keputusan untuk menentukan program sekolah, ada yang diambil berdasarkan kesepakatan internal sekolah, ada pula yang harus sesuai dengan aturan yang sudah baku dari pemerintah. Semuanya kembali berpulang pada kebutuhan.



Pada dasarnya, setiap sekolah itu memiliki potensi untuk mengembangkan dirinya. Dan tak selamanya harus selalu bergantung pada satu pihak. Persoalannya tinggal bagaimana memberdayakan seluruh perangkat dan potensi yang ada. Komite sekolah, sebagai wakil dari orangtua siswa secara formal, masyarakat, guru, bahkan pihak luar sekalipun, bisa diraih untuk diajak kerja sama. Ini berarti, kalau bicara soal manajemen berbasis sekolah (MBS), berarti kita bicara mengenai kemampuan sekolah secara otonomi dan mandiri dalam melakukan pengelolaan sekolah.

Hal ini disadari betul oleh Acep Mahmudin, kepala sekolah SMAN 71 Jakarta, tatkala ia harus menerapkan MBS di sekolahnya. Dari sekian banyak sekolah di



Pelantikan pengurus osis dan wajah SMAN 71 Jakarta (kiri), pembinaan kenakalan remaja yang di sampaikan oleh kepala sekolah (atas)

DKI Jakarta yang menerapkan MBS dalam tata kelolanya, SMAN 71 adalah salah satunya. Menurut Acep Mahmudin, ia mengelola sekolah dengan melibatkan seluruh unsur yang terdapat di sekolah. Pola penerapan MBS di sekolah ini adalah dengan melibatkan unsur pimpinan, manajemen, guru, siswa, komite dan wakil orangtua kelas (WOTK).

PENGAMBIL KEPUTUSAN

Karena itu, “Pada saat pengambilan keputusan, selalu melibatkan seluruh unsur perwakilan perangkat sekolah yang berkepentingan terhadap keputusan yang diambil,” ujar Acep. Selain tugas pokok yang dibicarakan, ada juga persoalan anggaran. Namun, “Meski menjunjung tinggi keterbukaan, ada pula hal yang tidak boleh diintervensi oleh pihak lain. Misalnya keputusan kenaikan kelas dan keputusan kelulusan siswa,” lanjut Acep. Mengenai pengelolaan keuangan, sekolah menerapkan prinsip keterbukaan. Ketika pemasukan dan poin rencana pengeluaran ditempel di ruang kepala sekolah. Siapa pun yang ingin tahu dapat melihat langsung.

Selain itu, dalam pengelolaan sekolah, kepala sekolah juga menunjuk tim manajemen untuk masing-masing bidang. Tim manajemen ini terdiri atas wakasek, guru, dan staf. “Sekolah benar-benar menunjukkan kemandirian, misalnya ketika harus menentukan program sekolah beserta anggarannya,” tutur Acep Mahmudin, “meski tetap mengedepankan musyawarah untuk mufakat,” lanjutnya. Tapi ada pula yang harus mengacu kepada peraturan yang dibuat pemerintah,



Sosialisasi RKAS kepada tenaga pendidik oleh kepala sekolah (kiri atas), kepala sekolah memberikan arahan kepada tenaga pendidik diruang guru, pertemuan dengan orang tua peserta didik (kanan atas)

baik pemerintah pusat maupun provinsi. Misalnya saja karena ketergantungan dana dari pemerintah, maka sekolah harus mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah.

PEMENUHAN FINANSIAL

Sejatinya, sekolah punya banyak pilihan dalam menggali potensi keuangannya. Selama itu tidak ‘menabrak’ rambu-rambu yang telah ditetapkan. Pemenuhan finansialnya dapat berasal dari beberapa sumber seperti BOP, BOS, bantuan pemerintah untuk bidang tertentu, dan dana dari pihak lain yang sifatnya tidak tetap. “Ya, boleh dibilang kebutuhan sekolah terpenuhi dengan sumber-sumber pendanaan itu, meski tetap harus mengedepankan efisiensi,” kata Acep.

Dalam pelaksanaannya, kepala sekolah membentuk tiga tim, yaitu tim besar yang melibatkan seluruh unsur sekolah, tim kecil yang melibatkan kepala sekolah dan tenaga pendidik, serta tim inti yang melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan tata usaha.

Sumber daya manusia pun tak luput dari perhatian. Sekolah terus melakukan analisis kebutuhan jam mengajar tenaga pendidik. Jika terdapat kekurangan tenaga pendidik, yang pertama dilakukan adalah memaksimalkan SDM yang ada di sekolah. Sedangkan jika belum terpenuhi juga, sekolah akan mengusulkan kekurangan SDM tersebut melalui suku dinas pendidikan terkait.

Begitu pula dengan pemenuhan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. “Kami mengadakan pelatihan dan seminar dengan melakukan assessment kebutuhan terlebih dahulu. Selain itu juga dengan melakukan



pemberdayaan MGMP. Mengenai sarana dan prasarana, sekolah mengajukan kebutuhannya melalui RKAS, kemudian memproses pengadaannya,” kata Acep.

Efek dari penerapan MBS model ini tentu mendukung proses pembelajaran siswa di sekolah. Menurut keterangan beberapa siswa, sekolah mendukung inovasi yang dilakukan oleh siswa, dan OSIS juga berperan dalam memberikan masukan untuk program kerja sekolah.

Ke depannya, begitu banyak harapan yang ingin dicapai oleh SMAN 71 Jakarta. Meski bukan berarti tanpa kendala. Cuma seberapa besar harapan, pun seberapa berat rintangan, jika itu dijalani dengan sungguh-sungguh, bukan tidak mungkin semua akan indah pada waktunya. □



Upacara sumpah pemuda di SMAN 71 Jakarta



SMAN 1 RANDANGAN - GORONTALO

Tak Ada Kompromi bagi Guru yang Terlambat

Dua belas tahun lalu, tepatnya pada 2006, SMAN 1 Randangan, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo berdiri. Di tahun perdana itulah, sekolah mulai menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS). Tidak ada kompromi bagi guru yang terlambat masuk sekolah.

Bila menengok ke belakang, menurut Kepala Sekolah SMAN 1 Randangan Rahim Nusi, penerapan MBS di sekolah yang dipimpinnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk meningkatkan mutu sekolah, baik input maupun output. Dijelaskan Rahim, tujuan penerapan MBS di SMAN 1 Randangan adalah untuk meningkatkan mutu SDM guna melayani para siswa dalam proses pembelajaran. “Pola ini diterapkan di sekolah, karena mengingat kondisi lingkungan sekolah khususnya siswa, berasal dari berbagai macam suku,” terang Rahim. Beragam latar belakang suku memang ada di sekolah dengan luas 15.000 meter persegi ini. Sebut saja suku Gorontalo, Bali, Bugis, Kendari, Minahasa, Batak, Nusa Tenggara, Jawa, Madura, Suna, dan Kaili.

Dengan keanekaragaman suku inilah, sekolah memiliki potensi yang besar. Ber-

dasarkan potensi tersebut, kata Rahim, sekolah menggunakan sistem yang tepat agar visi dan misi SMA Negeri 1 Randangan dapat tercapai dengan baik. Sebagai gambaran, visi yang diusung SMAN 1 Randangan adalah “mewujudkan sekolah yang berprestasi, menguasai iptek dan berbudi pekerti luhur serta berwawasan lingkungan.” Sementara misinya antara lain melaksanakan kegiatan bimbingan dan proses belajar secara efektif dan efisien, serta mendorong peserta didik untuk mengenali potensi diri melalui pimpinan dan pelatihan dalam kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Dengan alasan mendasar itulah SMAN 1 Randangan menerapkan pola MBS.

Implementasi MBS di sekolah diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan program kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler beragam, mulai dari pramuka, PMR, kesenian, olahraga, PIK-R hingga UKS. Pelaksanaan program tersebut bersinergi dengan orangtua, komite, masyarakat maupun pemerintah. Forumnya diwadahi melalui rapat dengan guru, komite sekolah, orang tua siswa dengan mengacu pada dokumen sekolah. Dengan proses tersebut, kata Rahim, kemandirian dan independensi ditegakkan. baik bidang tata tertib sekolah terutama kedisiplinan guru maupun siswa. Sebagai contoh, pola penerapan kedisiplinan guru dan siswa dilaksanakan dengan cara menutup pintu gerbang sekolah tepat pada pukul 07.15 Wita.

Peraturan tersebut ditujukan ke seluruh warga sekolah baik kepala sekolah, guru, TU serta siswa. “Tak ada kompromi bagi semuanya, harus tepat waktu,” tegas pria kelahiran 15 September 1959 ini. “Termasuk guru, jika telat, tak boleh masuk area



Apel siang sebelum pulang sekolah (kiri), kegiatan ekstrakurikuler pramuka (atas)



Rapat internal pengurus OSIS SMAN 1 Randangan (atas), rapat koordinasi pengurus ekstrakurikuler pramuka (bawah)



sekolah,” imbuhnya. Selanjutnya, evaluasi terkait pelaksanaan program ini melalui forum rapat antara guru, TU, kepala sekolah, dan orang tua. Bagi yang melanggar kedisiplinan, akan diambil tindakan dengan target adanya perbaikan. Program kedisiplinan itulah yang termasuk dalam program mandiri sekolah.

MANDIRI DALAM PEMBELAJARAN

Dari sisi pembiayaan, sumber yang dirujuk oleh SMA ini adalah dana APBN



Suasana di dalam ruang guru

berupa dana BOS. Penggunaannya merujuk pada juknis dana BOS. Adapun kemandirian dalam proses pembelajaran mengacu pada standar isi yang termaktub pada Permendikbud No. 21 Tahun 2016. Dengan begitu banyak program, menurut Rahim, harus diimbangi dengan kelengkapan tenaga pendidik dan nonpendidik. Pemenuhan kebutuhan pendidikan dan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan cara selalu bersinergi dengan pemerintah terkait, melalui pengajuan analisis kebutuhan. Berdasarkan analisis kebutuhan itulah akan memenuhi kebutuhan tenaga pendidik yang sesuai dengan kualifikasinya.

Selain itu, dalam rangka pelaksanaan program MBS, sekolah juga memprogramkan kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung keterlaksanaan pencapaian visi dan misi sekolah. Langkah pemenuhan sarana dan prasarana pendukung diadakan melalui pengajuan proposal kebutuhan sarana dan prasarana melalui dinas terkait.

Satu hal yang menarik, implementasi MBS di sekolah yang beralamatkan di Jl Trans Sulawesi, Desa Motolohu Kecamatan Randangan, ini juga didukung oleh kerja sama dengan institut dan lembaga terkait. Salah satunya, BLH Kabupaten Pohuwato berupa bantuan pembuatan taman, alat-alat kebersihan, serta DAK pembangunan RKB dari Pemda Pohuwato. Dengan dilaksanakannya program MBS inilah, Rahim berharap sekolah lebih mandiri yang nantinya akan diikuti dengan peningkatan mutu SDM baik guru maupun peserta didik. "Tidak ketinggalan, semua pihak antara lain komite, Pemda, BLH serta instansi lainnya, dapat terus bersinergi mewujudkan visi misi sekolah," tandas Rahim. □



SMAN 7 KOTA JAMBI - JAMBI

Mandiri dalam Kewirausahaan

Pengelolaan sekolah berbasis kewirausahaan menjadi kunggulan sekolah ini. Lantaran mandiri di bidang kewirausahaan, sekolah pun ditunjuk sebagai sekolah kewirausahaan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Sekilas tampak depan, SMAN 7 Kota Jambi tidak berbeda dengan kebanyakan sekolah lainnya. Bangunan sekolah bahkan terkesan sederhana, jauh dari megah. Memasuki bagian dalam area sekolah, juga masih biasa, ruang kelas berjejer, di sebelah kanan dan kiri. Lantas apa yang membuat beda SMAN 7 Kota Jambi dengan sekolah lainnya? Nah, ketika menyambangi area di belakang bangunan sekolah, ditemui pemandangan yang tak biasa.

Ya, sebuah ladang pertanian yang tertata rapi. SMAN yang berdiri tahun 1984 ini, kreatif mengelola lahan kosong di area sekolah dengan melakukan pembudidayaan jagung, pepaya, melon, dan sayuran lainnya. “Lahan pertanian kami sangat luas, dan kami berupaya terus manfaatkannya sebaik mungkin,” ujar Wakil Kepala Sekolah SMAN 7 Kota Jambi.

Tak heran, bila SMAN yang beralamatkan di Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi

ini, pada tahun 2018 kembali ditunjuk sebagai sekolah kewirausahaan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Pertimbangannya, SMAN 7 dinilai mampu mengembangkan potensi lokal di lingkungan sekitar sekolah. Tak hanya itu, sekolah juga dinilai memiliki nilai jual serta potensi pemasaran yang mumpuni.

Sekolah yang mendapat julukan 'Serambi Mekah' Kota Jambi ini telah menerima gukuran dana bantuan senilai Rp100 juta untuk pengembangan sekolah kewirausahaan. Diturunkan Ubaidillah, bantuan dana tersebut digunakan dalam bentuk beragam kegiatan antara lain sosialisasi, pendampingan, membuat produk kerajinan ataupun makanan yang bernuansa lokal. Untuk kegiatan sosialisasi dan pendampingan, pihak sekolah mendatangkan pemateri berpengalaman di bidangnya.

KERAJINAN DAN MAKANAN

Gebrakan kewirausahaan yang dilakukan pihak sekolah, adalah bagian dari implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Sebagaimana diketahui, MBS merupakan penggunaan sumber daya yang berdasarkan atau berasaskan pada sekolah itu sendiri dalam proses pengajaran atau pembelajaran. Pihak sekolah tahu betul, bagaimana memanfaatkan kelebihan sumber daya yang dimilikinya, dalam hal ini lahan dan pengetahuan SDM tentang kewirausahaan.

Tak hanya piawai dalam mengelola usaha terkait bidang pertanian, sekolah juga memiliki usaha dalam bidang kerajinan lokal, seperti kerajinan batik khas Jambi. Bentuknya beragam, mulai dari cinderamata, hiasan rumah, hingga kerajinan lainnya dengan memanfaatkan barang yang ada di lingkungan sekitar. Pihak



Tampak depan SMAN 7 Kota Jambi (kiri), peserta didik menunjukan hasil kerajinan lukisan dari kulit telur (atas kiri), pengurus osis sedang melakukan rapat koordinasi persiapan kegiatan ulang tahun sekolah (atas kanan)



Salah satu sudut SMAN 7 Kota Jambi

sekolah berupaya terus fokus mengembangkan batik menjadi produk yang akan dipasarkan. “Untuk kerajinan batik, sekolah bekerja sama dengan alumni yang saat ini memiliki usaha batik,” ungkap Ubaidillah.

Selain itu, terobosan menarik lainnya adalah sekolah berancang-ancang terjun ke dunia wirausaha makanan. Sekolah akan menjual produk makanan ringan yang dibuat siswa pada saat jam istirahat sekolah. Selain itu, produk tersebut juga akan pasarkan saat pameran ulang tahun sekolah atau kegiatan di luar sekolah lainnya.

POTENSI DAN PRESTASI

Kegiatan yang dilakukan SMAN 7 diakui Ubaidillah, bisa mendukung potensi dan prestasi siswa, baik akademik maupun nonakademik, terutama dalam bidang kewirausahaan. Sejalan dengan itu, siswa diharapkan memiliki kemampuan yang bisa dikembangkan, dengan perilaku yang baik pula.” Akademik, *skill* dan *attitude*,” sebutnya.

Selain itu, dengan kegiatan kewirausahaan ini, siswa dapat memahami, baik program yang dicanangkan sekolah, sehingga bisa jadi jaminan siswa ketika lulus, untuk membuka peluang usaha. “Belum tentu, yang lulus sekolah nantinya bisa melanjutkan perguruan tinggi, karena terkendala biaya. Untuk itu, mereka bisa membuka usaha baik mandiri maupun kelompok,” ungkap Ubaidillah lagi. Sejalan dengan itu, siswa pun berharap sekolah juga terus mendukung kegiatan



Kegiatan peserta didik di ladang sekolah, sebagai salah bentuk penguatan keterampilan kewirausahaan di SMAN 7 Kota Jambi.



siswa, bukan hanya kegiatan dalam bidang akademi, tetapi kegiatan yang bersifat

nonakademik, yang dapat mengembangkan bakat siswa. Salah satunya ekstrakurikuler. “Kegiatan ekstrakurikuler dapat berjalan baik,” ungkap salah seorang siswa.

Kini usia SMAN 7 Kota Jambi telah menginjak 34 tahun. Sejumlah capaian dan prestasi sudah diraih. Target ke depan, tentunya depan dapat meningkatkan kualitas pendidikan sekolah, serta dapat melibatkan semua elemen yang ada. “Terutama dukungan masyarakat sekitar sekolah,” tandas Ubaidillah. Ia pun berharap program sekolah mendapat dukungan dari pemerintah, terutama anggaran yang dapat mengembangkan peluang usaha, apalagi saat ini program pertanian masih menuai kendala. “Kendala tanam kita, kadang saat mau panen diserang banjir, jadi tidak maksimal hasilnya,” ucapnya. Dengan adanya sinergi sejumlah pihak, baik sekolah, masyarakat, pemda, hingga wirausahawan, sekolah dapat terus meningkatkan potensi kewirausahaannya. □

SMA Beraroma SMK

Kemandirian memberikan corak tersendiri pada proses pembelajaran di SMA Plus Informatika Ciamis. Dengan berinovasi, diharapkan memberikan dampak lebih baik terhadap pertumbuhan kemampuan siswa.

Manajemen berbasis sekolah (MBS) dapat diartikan sebagai model pengelolaan sekolah yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam menentukan arah kebijakan pengembangannya. Dengan MBS, sekolah diharapkan makin mampu dan berdaya dalam mengurus dan mengatur sekolah, dengan tetap berpegang pada koridor kebijakan pendidikan nasional. Karena itu, pencapaian tujuan MBS harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Begitupun dengan SMA Informatika Ciamis, yang didirikan pada pada 2002. Sekolah ini merupakan sekolah menengah atas yang berbasis keinformatikaan pertama di Jawa Barat. Sejarah SMA Informatika bermula atas prakarsa dari tokoh politik di Ciamis yaitu Tatang Djauhari yang mendirikan lembaga pendidikan SMA yang berbasis IT yang berdiri di bawah Yayasan Pendidikan Bina Nusantara. Dengan konsep penggabungan SMA dan SMK, SMA Informatika Ciamis





Suasana SMA Plus Informatika Ciamis (kiri), peserta didik (atas)

memberi pengarahan dan pengajaran yang lebih banyak dari sekolah lainya. Pembekalan secara teori dan praktek memberikan wawasan baru bagi peserta didik di dalam lembaga. Salah satu contoh adalah program PAKK (Program Aplikasi Kewirausahaan dan Keinformatikaan) secara langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui dunia kerja.

Sejak berdiri, konsep MBS sudah diberlakukan di sekolah ini. Bermula dari keinginan sekolah untuk lebih maju, unggul, dan berbeda dengan sekolah lain. Seakan-akan SMA Informatika ingin menampilkan ciri khusus dari segi konsep pembelajaran. Ingin memiliki nilai lebih dibandingkan sekolah lain di wilayah Jawa Barat khususnya Ciamis. Penerapan MBS ini memiliki pola-pola tertentu sehingga tidak terkesan mengalir begitu saja. Selain ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah mengenai proses pendidikan, SMA Informatika memberikan nilai lebih pada proses pembelajarannya. Keinformatikaan menjadi pembedanya. Meskipun sebagai sekolah menengah umum, tetapi proses pembelajaran memiliki rasa menengah kejuruan.

Dalam hal penerapan pola MBS, ada hal-hal yang tentunya tidak dapat diintervensi oleh pihak lain, seperti yang bersifat prinsip yaitu aturan internal sekolah, pembuatan rencana anggaran sekolah, penentuan honorarium karyawan dan guru serta lain sebagainya. Pola penerapan MBS tidak semata-mata mengalir begitu saja, namun memiliki acuan yang jelas yang mengacu pada aturan yang berlaku dalam pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah. Selain peraturan pemerintah, MBS di SMA Informatika Ciamis pun mengacu pada RAPBS dan tata tertib sekolah itu sendiri.



Tim marching band SMA Plus Informatika Ciamis

PENDEKATAN KARAKTERISTIK

Dalam menguraikan karakteristik MBS, pendekatan sistem input-proses-output digunakan sebagai pemandunya. Hal ini didasari oleh pengertian bahwa sekolah merupakan sistem sehingga penguraian karakteristik MBS (yang juga karakteristik sekolah efektif) mendasarkan pada input, proses, dan output.

Sekolah memiliki output yang diharapkan. Output sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Pada umumnya, output dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu output berupa prestasi akademik dan output berupa prestasi non-akademik. Output prestasi akademik misalnya, NUN/NUS, lomba karya ilmiah remaja, lomba (Bahasa Inggris, Matematika, Fisika), cara-cara berpikir (kritis, kreatif/divergen, nalar, rasional, induktif, deduktif, dan ilmiah). Output non-akademik, misalnya keingintahuan yang tinggi, harga diri, akhlak/budi pekerti, perilaku sosial yang baik seperti misalnya bebas narkoba, kejujuran, kerja sama yang baik, rasa kasih sayang yang tinggi terhadap sesama, solidaritas yang tinggi, toleransi, kedisiplinan, kerajinan, prestasi olahraga, kesenian, dan kepramukaan.

Ciri yang menonjol dari penerapan pola MBS di SMA Informatika adalah dalam



Bangunan dan suasana SMA Plus Informatika Ciamis

hal independensi dan kemandirian manajemennya. Misalnya, di sekolah ada program-program aplikasi keinformatikaan dan kewirausahaan yaitu siswa memiliki kesempatan praktik kerja selama 40 hari di instansi-instansi milik asing ataupun milik pemerintah. Hal inilah yang menjadi pembeda SMA Informatika Ciamis dengan sekolah lainnya yang sederajat. Meskipun berjenjang menengah atas, tetapi SMA Informatika memiliki program praktik kerja yang biasanya dimiliki oleh sekolah berjenjang menengah kejuruan. Jadi seluruh siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pengalaman bekerja sebelum mereka lulus. □



SMA KESATRIAN I SEMARANG - JAWA TENGAH

Untuk Keputusan yang lebih Demokratis

Berdiri 51 tahun silam, sekolah swasta favorit di Semarang ini telah menerapkan MBS sejak satu dasawarsa silam. Sangat sesuai untuk mengantisipasi kompetisi pendidikan yang makin ketat.

Tri Tjandra Mucharam, kepala sekolah SMA Kesatrian 1 Semarang demikian antusias menyambut perkembangan pendidikan di masa kini yang kian kompetitif. Sekolah-sekolah dengan konsep khas atau unik akan menjadi sekolah idaman dan pilihan. Di sekolah ini, Tri Tjandra menjelaskan bahwa MBS sudah dilakukan dengan baik dengan latar belakang penerapan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional.

“Selain itu peran serta warga sekolah khususnya guru dan peran serta masyarakat khususnya orangtua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini kurang maksimal. Maka perlu dilakukan upaya perbaikan, salah satunya dengan melakukan reorientasi penyelenggaraan pendidikan, yaitu dari manajemen peningkatan mutu berbasis pusat menuju manajemen peningkatan mutu ber-



Tampak depan SMA Kesatrian 1 Semarang (kiri), pelatihan dasar kepemimpinan peserta didik anggota osis (atas), rapat MBS oleh tim kependidikan sekolah (bawah)

basis sekolah,” jelasnya.

Untuk membuat MBS berjalan maksimal, sekolah tentu saja memberdayakan komite sekolah/majelis madrasah dalam peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Kemudian juga memberdayakan tenaga kependidikan, baik tenaga pengajar, kepala sekolah, petugas bimbingan dan penyuluhan (BP) maupun staf kantor. Pun para pejabat di tingkat kecamatan, unsur komite sekolah tentang MBS. Kemudian juga mengadakan pelatihan dan pendampingan sistematis bagi para kepala sekolah, guru, unsur komite sekolah pada pelaksanaan peningkatan mutu pembelajaran.

SMA Kesatrian 1 Semarang juga melakukan supervisi dan monitoring yang sistematis dan konsisten terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah serta mengelola kegiatan yang bersifat bantuan langsung. Diakui Tri Tjandra Mucharam, peran serta kepala sekolah, guru, unsur komite sekolah, dan pemerintah akan memudahkan pengelolaan dan peningkatan mutu pendidikan. “Lalu, kekuasaan yang lebih besar yang dimiliki oleh kepala sekolah dalam pen-





Kegiatan supervisi yang dilakukan guna menjaga kualitas tenaga pendidik

gambilan keputusan perlu dilaksanakan dengan demokratis antara lain dengan melibatkan semua pihak, khususnya guru dan orangtua siswa,” tegasnya.

Tak hanya itu, sekolah juga membentuk tim-tim kecil di level sekolah yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan yang relevan dengan tugasnya. Sekolah pun menjalin kerja sama dengan organisasi di luar sekolah. Hal yang tidak dapat diintervensi pihak luar salah satunya tentang aturan untuk guru dan peserta didik dan pelaksanaan beserta sanksinya.

PROGRAM PENUNJANG

Setiap program sekolah dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan melibatkan kepala sekolah, guru, staf tata usaha, warga sekolah, komite sekolah, dan pengawas sekolah. Acuan yang dipakai MBS yaitu 8 standar nasional pendidikan, visi, misi serta tujuan sekolah. Lalu apa yang unik dan khas? Manajemen yang unik dan mandiri menurut Kepala Sekolah adalah manajemen keuangan berbentuk RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang dikelola sekolah dan pihak yayasan dengan sumber swadaya masyarakat.

Manajemen tentang peraturan kepala sekolah, guru, PTK, dan peserta didik Sekolah sudah menunjukkan kemandirian dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaannya. Pemenuhan kebutuhan finansial sekolah diperoleh dari SPP setiap bulan dari swadaya masyarakat serta dari DPI (Dana Pengembangan Institusi). Upaya sekolah memenuhi kebutuhan pendanaan sekolah dari swadaya masyarakat berbentuk SPP dan DPI. Tata cara pembayaran SPP tiap bulan dengan cara transfer biaya bekerjasama dengan Bank Mandiri. SMA Kesatrian 1 Semarang dalam kegiatan belajar mengajar sudah tersedia ruang kelas yang representatif beserta sarana pendukungnya. Kurikulum menggunakan Kuriku-



Kegiatan penyusunan program sekolah yang turut serta melibatkan komite sekolah

lum 2013 yang dilaksanakan secara mandiri menyesuaikan kondisi sekolah.

Kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, kemampuan, dan daya dukung sekolah. Seleksi dilaksanakan secara mandiri. Kualifikasi pendidik minimal S1 dan sudah terdapat 40% pendidik dengan kualifikasi S2. Kualifikasi tenaga kependidikan minimal lulusan SMA, sebagian besar sudah S1. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi dilakukan dengan pelatihan rutin. Sekolah mengembangkan kerja sama dengan institusi dan lembaga lain yaitu dengan perguruan tinggi negeri swasta maupun negeri.

Komite sekolah turut serta menyumbangkan ide untuk kemajuan sekolah, turut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, kontrol, dan pelaporan program sekolah. Harapannya, SMA Kesatrian 1 Semarang makin maju dan berkembang pesat. Sekolahnya keren, free hotspot area, disiplin, banyak yang diterima SNMPTN dan SBMPTN, banyak pilihan ekstrakurikuler, sering jadi juara dari tingkat kota sampai internasional. Keunggulannya adalah unggul literasi, disiplin, dan *multiple intelligence*. Untuk mendukung MBS berjalan lancar sesuai harapan, sejauh ini fasilitas sekolah dengan 27 rombel dan pernah menjadi sekolah model ini, sudah lengkap karena ada *free* internetan, LCD, komputer, CCTV di tiap kelas, sarana prasarana lengkap.

Dengan kelengkapan sarana prasarana sekolah diharapkan dapat memacu semangat tenaga pendidik dan peserta didiknya. Dan hal ini sudah terbukti karena ada guru yang juara karya tulis tingkat nasional, kemudian deretan prestasi siswa yang sejak tahun 1990-an juga sudah dicapai, di antaranya Juara I *Telling a Story* se-kota Semarang 2003 dan Juara II *Poetry Reading* se-kota Semarang 2003. Jadi SMA Kesatrian 1 Semarang siap bersaing dengan sekolah setingkat lainnya di Indonesia. □



**SMAN 1 SAMPANG - JAWA
TIMUR**



Potret Sekolah Mandiri dari Daerah

SMAN 1 Sampang Madura, merupakan salah satu potret sekolah mandiri di daerah. Sumber dayanya lengkap, raihan prestasi baik akademik maupun nonakademiknya pun telah banyak dikantongi dalam berbagai bidang. Maka, nama baik makin lengkap diraih.

Telah berdiri sejak 1965, tentunya sudah banyak pahit manis dirasakan SMAN 1 Sampang Madura, dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat sekitar. Dengan bekal itu pula, maka tak heran usaha sekolah selama ini banyak membuahkan hasil yang baik. Terbukti dengan banyaknya raihan prestasi baik di bidang akademik maupun nonakademik.

Tidak hanya itu, lokasi sekolah pun menjadi salah satu hal yang patut diperhitungkan. Lokasi sekolah yang berada di pusat kota, dan terletak di pinggir jalan utama, memberikan poin lebih bagi sekolah. Hal lain yang menjadi daya tarik



Wajah SMAN 1 Sampang (kiri), suasana ruang guru (atas)

bagi sekolah ini adalah SMAN 1 Sampang memberikan pilihan banyak jalur undangan ke perguruan tinggi.

AWAL PENERAPAN MBS

Sekolah yang memiliki 30 rombongan belajar ini telah menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) sejak 2006. Manajemen ini mulai diterapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi tuntutan zaman. Pola penerapan yang dilakukan sekolah berupa pembentukan kelompok musyawarah guru yang bertujuan untuk menghasilkan kebijakan yang berdasarkan aklamasi manajemen sekolah.

Sampai saat ini, kata Drs. Bactiar Suprianto, Kepala SMAN 1 Sampang, sekolahnya telah menjadi sekolah rujukan masyarakat Sampang. Pada tahun 2017, terdapat 78 siswa yang mendapat jalur undangan dari berbagai perguruan tinggi negeri. Hal ini menjadi prestasi tersendiri sehingga meningkatkan minat masyarakat setempat. Ditegaskan, bahwa pihak sekolah harus indenpeden dalam menerima siswa sesuai dengan hasil penjurangan seleksi, dan tidak menerima “titipan”.

Sekolah, yang telah menerapkan program literasi membaca ini, menerima siswa dengan dua jenis yaitu jalur prestasi dan reguler (online). Jalur prestasi adalah jalur untuk menerima secara langsung bagi siswa SMP yang berprestasi (aka-



Tenaga pendidik dan kependidikan SMAN 1 Sampang

demik). Siswa yang mendapat undangan jalur prestasi, nantinya menerima beasiswa dan dibebaskan dari kewajiban SPP. Sekolah dengan jumlah siswa 941 ini memiliki prasarana dan fasilitas cukup lengkap. Satu ruangan aula, 30 ruang kelas, 4 ruang laboratorium (Fisika, Biologi, Kimia, Bahasa), 3 ruang laboratorium komputer, satu ruang perpustakaan, satu ruang ibadah (masjid), satu ruang BK, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tata usaha.

Jumlah rombongan belajar terdiri dari 10 kelas 10 (7 kelas IPA dan 3 kelas IPS), 10 kelas 11 (7 kelas IPA dan 3 kelas IPS) dan 10 kelas 12 (7 kelas IPA dan 3 kelas IPS). Sementara itu sekolah telah memiliki tenaga pendidik dengan jumlah mencapai 36 orang PNS dan telah merekrut tenaga pendidik tambahan sebanyak 26 orang yang masih honorer.

Sekolah, yang memiliki beberapa siswa berprestasi, baik akademik maupun nonakademik, ini mempunyai pola pengelolaan sekolah dengan acuan delapan standar pendidikan nasional. Sementara untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, sekolah melakukan permohonan bantuan pusat dan memaksimalkan dana BOS.

Hal unik yang muncul di dalam independensi manajemen sekolah agar mandiri adalah dengan mengambil sikap “kompak” atas satu jawaban ketika muncul intervensi agar ada siswa dapat diterima meskipun tidak lolos seleksi dan tidak memenuhi syarat lainnya. SMAN 1 Sampang berupaya memenuhi kualifikasi yaitu dengan ikut serta dalam diklat dan seminar. Selain itu memberikan fasilitas



Suasana pembelajaran di kelas

sarana dengan perguruan tinggi negeri untuk siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang universitas.

KERJA SAMA DENGAN BERBAGAI PIHAK

Dalam hal kerja sama dengan pihak lain, sekolah mengundang instansi tertentu untuk memberikan ilmu pengetahuan seperti dari kepolisian, TNI, KPU, dinas koperasi, kantor pajak, dan lain sebagainya. Komite sekolah, dalam hal pengembangan sekolah, tetap turut serta dalam perencanaan dan evaluasi program yang telah dijalankan manajemen sekolah. Namun pihak sekolah juga mempunyai harapan untuk pengembangan sekolah yaitu mempunyai fasilitas yang cukup terutama komputer serta prestasi siswa dapat dikembangkan lagi.

Sementara itu, para siswa pun mengatakan bahwa alasan sekolah di sini karena SMAN 1 Sampang merupakan sekolah terbaik yang ada di kota Sampang. Alasan lain adalah banyaknya lulusan yang lolos ke perguruan tinggi negeri dan siswanya yang dikenal berprestasi di bidang akademik maupun nonakademik. Mereka menilai bahwa keunggulan sekolah mampu mencetak lulusan yang berkualitas sehingga banyak diterima di perguruan tinggi bergengsi. Fasilitas belajar off-line maupun on-line cukup memadai. Di samping itu setiap minggu diadakan bimbingan untuk persiapan olimpiade sains. Dalam proses pembelajaran, guru sekolah ini dinilai melakukan pembelajaran secara menyenangkan dan cukup efektif. □



SMA DON BOSCO SANGGAU - KALIMANTAN BARAT

Mengoptimalkan Kepercayaan Yayasan

Pembagian tugas yang jelas antara pihak yayasan dan sekolah, kewenangan yang diperoleh secara maksimal, membuat SMA Don Bosco leluasa mengembangkan karakteristik sekolahnya. Dan kesempatan untuk berkembang pun kian terbuka.

Asri, luas, dan jauh dari kebisingan. Ini kesan pertama yang tertangkap tatap kala pertama kali menginjakkan kaki di lingkungan pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Helvetia Bunut itu. Yayasan ini menaungi dua jenjang pendidikan, yakni SMA Don Bosco dan SMP Sugiyo-pranoto, dan keduanya berada dalam lokasi yang sama yakni di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bunut, Kabupaten Sanggau.

Komplek sekolah ini lokasinya tidak persis berada di pinggir jalan utama. Agak menjorok sedikit ke dalam, tapi bangunan sekolahnya terbilang cukup khas. Se-

luruh lantai, baik ruang kelas maupun ruang guru, terbuat dari papan kayu khas Kalimantan. Arsi, ya tentu. Karena meski bukan keramik yang mengkilap, lantai kayunya tertata rapi dan bersih.

Fasilitasnya pun terbilang lengkap, mulai dari laboratorium, perpustakaan, kantin, ruang kelas, toilet, bahkan terdapat asrama putra dan putri di sekolah ini. Fasilitas ini diperuntukkan bagi setiap siswa siswi SMA Don Bosco dan SMP Sugi-yopranoto yang ingin tinggal di asrama namun dengan catatan mereka tidak memiliki indikasi penyakit hepatitis.

PEMBAGIAN TUGAS

Seperti sekolah swasta pada umumnya, pengelolaan sekolah dilakukan oleh pihak yayasan bersama-sama dengan kepala sekolah. Namun, yayasan hanya mengelola keuangan sekolah seperti pembayaran SPP, keperluan gaji para guru, dan pengelolaan keuangan lain untuk kebutuhan sarana dan prasarana. Sementara kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah mengelola sekolah mulai dari mengatur aktivitas sekolah, pembagian tugas mengajar, melakukan penilaian guru, melakukan pengangkatan guru kontrak menjadi tetap, dan persoalan-persoalan lain yang menyangkut masalah KBM dan kesiswaan.

Untuk lebih mengembangkan pengelolaan sekolah menjadi lebih baik, Marti-



Suasana lapangan dan taman SMA Don Bosco (kiri), aktivitas pembelajaran di kelas (atas)



Lorong, bangunan dan suasana keseharian di SMA Don Bosco

nus Bok, kepala sekolahnya, tak segan-segan mempelajari pengelolaan sekolah yang dilakukan oleh sekolah lain. Dan segala sesuatu keputusan yang diambil berhubungan dengan masalah pengelolaan, Pak Bok, biasa kepala sekolah Don Bosco ini dipanggil, selalu menyertakan dewan guru untuk mendiskusikannya. Sebagai contoh, adanya kesepakatan untuk menerapkan tata tertib sekolah yang sepenuhnya diatur oleh sekolah tanpa campur tangan yayasan. Tata tertib sekolah pun dibuat dalam bentuk buku yang di dalamnya memuat hal-hal yang mengatur mulai dari kehadiran dan waktu belajar siswa, penampilan siswa, hingga daftar pelanggaran yang dapat mengurangi skor sampai perilaku yang dapat menambah skor. Skor ini pun dijadikan sebagai *reward and punishment* bagi setiap siswa di sekolah.

Tidak hanya itu, salah satu bentuk pengelolaan siswa yang baik yang telah dilakukan oleh sekolah ini yakni, SMA Don Bosco menggerakkan setiap siswanya untuk selalu menjaga lingkungan sekitarnya. Pak Bok menuturkan bahwa sekolah ini tidak memiliki petugas kebersihan. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab seluruh siswa.

BUAH KERJA SAMA

Godelva Nayunda Neysa, salah seorang siswi di sekolah ini mengaku, ia sangat tertarik untuk sekolah di SMA Don Bosco karena sudah dari awal bersekolah di SMP Sugiyopranoto sehingga merasa terbiasa dengan lingkungan sekolah. Sedangkan menurut Julianto Aksananda Pratama Putra, ketua OSIS SMA Don Bosco, sekolah ini memiliki banyak fasilitas untuk menunjang proses pembelajaran. Seperti lapangan sepak bola, lapangan voli, lapangan basket, lapangan bulutangkis serta laboratorium komputer. Selain itu gerakan literasi di sekolah



ini diberi kehormatan untuk memakai pin literasi dari pusat.

Sementara itu, dalam pemenuhan tenaga pengajar, pihak sekolah selalu mengajukan kepada yayasan. Kemudian yayasalah yang akan mencari tenaga pengajar. “Tidak ada tes, cuma satu syarat penting untuk tenaga pengajar yang mau mengajar di sini yaitu tidak ada indikasi penyakit hepatitis. Itu soalnya sudah syarat dari yayasannya,” ujar Pak Bok.

Sejak memimpin sekolah dari tahun 1995, Martinus Bok mengaku tidak menemukan kendala berarti dalam pengelolaan sekolah. “Ya kalau kendala yang berat tidak terlalulah. Kenakalan siswa ya biasalah,” ujarnya. Namun Martinus Bok menambahkan bahwa kendala kadang-kadang ditemukan pada para guru. “Terkadang ada guru yang menjadikan ini sebagai batu loncatan. Apabila mereka ikut tes di luar dan tidak lulus, bisa mereka kembali lagi kesini. Tapi mereka melamar lagi dari awal dan mulai lagi dari nol,” tambahnya.

Kemudian, untuk harapan ke depannya, Martinus Bok ingin menerapkan *moving class* di SMA Don Bosco. Ia berpendapat dengan menerapkan sistem *moving class* maka pembelajaran dapat dilakukan lebih intensif oleh para guru. Setiap kelas menjadi tanggung jawab masing-masing guru mata pelajaran yang bersangkutan, sehingga para guru menjadi lebih kreatif dan berkreasi dalam mengajar di kelas.

Bukan harapan yang berlebihan Pak Bok. Dengan lingkungan yang asri, teduh di mata, lahan yang memadai, dan sudah tentu dengan kerja keras seluruh perangkat sekolah dalam menciptakan kemandirian sekolah, harapan itu akan segera mewujudkan. Semoga! □



SMA IT ASSALAM BANJAR - KALIMANTAN SELATAN

Manajemen dengan Keterlibatan Komite

Mendidik anak bukan hal mudah. Pola asuh di rumah dan di sekolah menjadi suasana penuh adaptatif bagi anak. Kondisi inilah yang membuat SMAIT Assalam perlu melibatkan orangtua siswa dalam mendukung manajemen sekolah.

Era digital tak bisa dihindarkan. Semua orang harus ikut dalam pusaran arus perkembangannya. Mau tak mau, semua lini kehidupan menyesuaikan diri, termasuk dunia pendidikan. Keselarasan antara pola didik dan perkembangan zaman kian menuntut keterlibatan banyak pihak, termasuk orangtua siswa dan masyarakat. Sehingga kemudian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang merupakan paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dengan melibatkan masyarakat dalam rangka kebijakan pendidikan nasional, pun dicanangkan.

MBS sendiri setidaknya dilandasi oleh peraturan perundang-undangan pendidi-

kan nasional yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (khususnya yang terkait dengan MBS adalah Bab XIV Pasal 51 Ayat 1. Aturan ini memungkinkan sekolah mengatur pendidikannya sesuai kebutuhan sekolah dan kondisi masyarakatnya. Secara ringkasnya ada kewenangan penuh atau otonomi sekolah mengembangkan sekolah sesuai tujuan dan kebutuhan sekolah.

“Tentu kami menerapkan MBS dan itu sudah kami lakukan sejak 1 Juli 2012, di awal kami berdiri. SMAIT Assalam di bawah Yayasan Assalam melibatkan partisipasi orangtua dalam hal pola asuh dan didikan. Tujuan sekolah adalah membangun kesadaran agama siswa, melatih kompetensi akademiknya khususnya Sains serta moralitasnya. Di masa sekarang moralitas menjadi perhatian utama sekolah,” ungkap Awad, M.A., kepala sekolah SMAIT Assalam.

Disadari oleh pihak sekolah bahwa keterkaitan antara dunia keluarga dan dunia sekolah dengan pondasi agama itu perlu ada, dan harus dibangun, dipupuk dan diperkuat di tengah gempuran teknologi yang mengikis moralitas luhur bangsa ini. “Terdengar ideal, tapi inilah kenyataannya. Generasi muda bangsa kita ini terancam dengan kerusakan moral. Sudah saatnya sekolah mengatur pendidikan di sekolah dengan keutamaan akhlak,” jelas Awad.

Partisipasi orangtua peserta didik menjadi salah satu penguat manajemen seko-



Bangunan dan suasana SMA IT Assalam Banjar (kiri dan atas)



Aktivitas pembelajaran di kelas

lah menuju tujuan dan kebutuhannya, yakni melahirkan generasi berbudi pekerti, bebas narkoba, beriman dan takwa serta moralitas yang mulia. “Dalam setiap program sekolah, permasalahan siswa, aturan sekolah tentang sanksi tegas penyalahgunaan narkoba, bahkan kegiatan sekolah seperti hafalan Al Qur’an pun kami mendiskusikannya dengan orangtua siswa,” jelas Kepala Sekolah.

Meskipun orangtua dilibatkan dalam banyak hal, menurut Awad, dalam sejumlah program sekolah, pembahasan dengan yayasan tetap dilakukan terlebih dahulu secara matang. Sehingga tidak ada kendala berarti di tengah perjalanan. “Intinya, misi utama kami adalah membentuk mentalitas siswa yang kuat, pondasi agama yang teguh, dan moralitas yang luhur,” singkatnya.

KEMANDIRIAN YANG BERATURAN

Meskipun MBS diberlakukan di sekolah dan kemandirian ditunjukkan oleh SMAIT Assalam, dalam praktiknya, sekolah tetap mengikuti aturan-aturan universal yang ditetapkan pemerintah. Yayasan sebagai induk sekolah juga memiliki aturan yang harus diberlakukan, apalagi yayasan juga menjadi penyandang dana kebutuhan sekolah. Untuk peningkatan kapasitas tenaga pengajar juga dilakukan melalui sejumlah pelatihan agar mutu sekolah bersaing dengan sekolah lainnya. Kemudian demi kemajuan sekolah pun setiap masukan dibutuhkan dalam proses berjalan.



Salah satu ruang kelas dan suasana perpustakaan

“Saya senang sekolah di sini, karena menurut kami sekolah ini menyenangkan dalam pembelajaran, aktif, inovatif, kreatif, dan tidak membosankan. Ruang kelas pun diberikan kesempatan mengecat sendiri sesuai yang kami senangi. Selain itu sekolah mendidik kami menjadi anak yang berakhlak baik dan menghormati sesama apalagi orangtua,” ungkap salah satu siswa Kelas XII yang tengah belajar di dalam sekolah.

Suasana sekitar SMAIT Assalam yang juga cukup kondusif dalam mendukung pembelajaran karena berada di area pendidikan, bersebalahan dengan beberapa sekolah dan lembaga pendidikan membuat para siswa bersemangat ke sekolah. Jadi, jika sekolahnya sudah kondusif, suasana belajarnya menyenangkan, tak ada alasan lagi bagi siswa untuk tidak bersemangat dalam belajar untuk menggapai cita-citanya. □



SMAN 1 KUMAI - KALIMANTAN TENGAH

Jalin Kerja Sama untuk Isi Kekurangan

Sekolah tidak terlalu bisa mengandalkan sumbangan dari masyarakat, sedangkan kebutuhan dana akan peningkatan mutu pendidikan cukup tinggi. Untuk meningkatkan mutu pendidikan tentunya harus didukung oleh semua pihak, baik dari pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah.

Tidak terlalu sulit untuk mencapai SMA Negeri 1 Kumai, di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Memasuki pintu gerbang sekolah, halaman depan terlihat lapang, luas, dan dijadikan area parkir bagi kendaraan siswa dan para guru. Masuk ke pelataran sekolah, halaman bagian dalam tampak masih berupa tanah berlapis pasir dan sedikit ditumbuhi rumput liar.

Sekolah yang terletak di Jalan Padat Karya 1 Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, SMA Negeri 1 Kumai ini didirikan pada 5 Mei 1992, berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0216/0/1992 tanggal 05 Mei 1992. Pada tahun pertama, SMA Negeri 1 Kumai menerima 60 siswa yang terbagi dalam dua kelas yakni kelas IPA dan kelas IPS. Pada awal berdirinya SMA Negeri 1 Kumai



Upacara bendera di SMAN 1 Kumai (kiri), aktivitas pembelajaran di laboratorium IPA (atas), tenaga pendidik dan kependidikan SMAN 1 Kumai (bawah)

dipimpin oleh Sugeri, dengan 11 pengajar dan seorang tenaga administrasi. Dan, seiring berjalannya waktu, dari tahun ke tahun siswa sekolah ini pun bertambah. Saat ini, menurut kepala sekolahnya, Paujiah, SMAN 1 Kumai memiliki 763 siswa yang diasuh oleh sekitar 45 orang pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS dan non-PNS. Program studi yang dilayani terdiri atas program studi MIPA dan IPS.

BERAGAM PROGAM SEKOLAH

Dalam hal ini, manajemen berbasis sekolah (MBS) telah memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mandiri, otonom, dan mengembangkan diri dalam peningkatan mutu pendidikan. Penerapan model MBS disesuaikan dengan ke-





Kegiatan halal bihalal di sekolah

butuhan sekolah serta perkembangan sekolah. Penerapan MBS di SMA Negeri 1 Kumai cukup baik, hal tersebut dikarenakan banyaknya dukungan dari berbagai pihak, baik itu pihak pendidik dan tenaga kependidikan, orangtua siswa, masyarakat sekitar, maupun dukungan dari perusahaan dalam hal ini perusahaan pelabuhan. Selain itu, dukungan lain berupa kelengkapan sarana prasarana yang sangat menunjang pengelolaan pendidikan seperti ruang kelas, lab IPA, lab komputer, ruang perpustakaan, lapangan olahraga, lapangan upacara, panggung aksi, dan CCTV yang hampir terpasang di setiap ruangan dan sudut sekolah.

Implementasi pengelolaan sekolah dirumuskan dalam program yang disusun oleh pihak sekolah. Beberapa hal yang menjadi kewenangan sekolah yang tidak bisa diintervensi oleh pihak luar seperti kenaikan kelas, kelulusan, dan penggunaan anggaran biaya selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap program sekolah disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan pengembangan sekolah. Acuan yang digunakan dalam manajemen pengelolaan sekolah di antaranya Pengembangan Mutu Pendidikan (PMP), Evaluasi Diri Sekolah (EDS), Program Jangka Panjang, Rencana Pengembangan Sekolah, dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS).

KERJASAMA DENGAN BERBAGAI PIHAK

Kemandirian pengelolaan sekolah mencakup kemandirian dalam pengelolaan keuangan. Salah satu kemandirian yang dilakukan yakni dalam hal penggalangan dana. "Sekolah mendata siswa berstatus yatim, yatim piatu atau yang masuk



Aktivitas pembelajaran di kelas

kategori tidak mampu. Dari data tersebut terdapat 70 orang siswa yang masuk kategori layak untuk dibantu. Selanjutnya sekolah bekerja sama dengan komite mengirimkan surat kepada masyarakat yang secara ekonomi mampu untuk dapat membantu biaya sekolah dari anak-anak tersebut. Alhamdulillah akhirnya ada 46 orang siswa yang mendapatkan bantuan dari para donatur,” ucap Paujiah. Selain itu sekolah pun bekerja sama dengan perusahaan pelabuhan di Kumai. Dari kerja sama ini sekolah mendapatkan bantuan dana untuk perbaikan lapangan basket.

Kerja sama dengan pihak luar, donatur, terus digalakkan untuk menghimpun dana. Tapi, tetap saja dana terbesar hingga saat ini masih dari dana pemerintah seperti bantuan operasional sekolah (BOS). Alokasi penggunaan dana tersebut tentunya harus berdasarkan aturan yang berlaku. Sekolah tidak bisa mengalokasikan anggaran bantuan pemerintah tersebut sesuai dengan kehendak sekolah. “Dulu sebelum diambil alih oleh provinsi, sumber penerimaan dana sekolah terdiri dari BOS Pusat, BOS Provinsi, BOP Kabupaten, dana rutin, dan sumbangan komite. Namun sejak diambil alih provinsi, sumber dana sekolah hanya dari BOS,” ujar Paujiah.

Sekolah tidak terlalu bisa mengandalkan sumbangan dari masyarakat, sedangkan kebutuhan dana akan peningkatan mutu pendidikan cukup tinggi. Untuk meningkatkan mutu pendidikan tentunya harus didukung oleh semua pihak, baik dari pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Ke depan sekolah bersama komite akan meningkatkan kerja sama baik dengan perorangan maupun instansi/badan usaha. Untuk meningkatkan kerja sama tersebut tentunya harus didukung oleh seluruh pihak yang peduli pendidikan. □



SMA PATRA DHARMA BALIKPAPAN - KALIMANTAN TIMUR

Buah Ketekunan dan Kesungguhan

Walau masih belum sepenuhnya mandiri, SMA Patra terus berupaya memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi masyarakat Balikpapan dan Kalimantan Timur melalui manajemen sekolah yang optimal.

Manajemen berbasis sekolah di SMA Patra Dharma Balikpapan diawali tahun 2004. Saat itu Manajemen Pusat Pertamina memutuskan subsidi pada sekolah di bawah yayasan mereka. Seluruh sekolah diminta mandiri dalam mengelola sekolah. Keputusan itu berimbas pada sekolah ini. Keputusan telah ditetapkan. Tak ada kata mundur dalam pendidikan anak bangsa. Manajemen SMA Patra Dharma bersiap. Mulanya memang agak berat. Tetapi, ketekunan dan kesungguhan yang dilakukan membuahakan hasil. Sekolah menjadi mandiri. Utamanya dalam pengelolaan keuangan sekolah.

“Kemandirian sekolah ini diwujudkan dalam merancang dan mewujudkan keuangan sekolah,” kenang Gunadi, Kepala Sekolah SMA Patra Dharma. Hal



Lapangan dan suasana SMA Patra Dharma Balikpapan (atas), aktivitas olahraga peserta didik di saat jam istirahat (bawah)

itu dilakukan demi memberi pelayanan prima kepada peserta didik. Termasuk pada orangtua mereka yang telah mempercayakan anaknya ke SMA Patra Dharma. Konsep itu tak mudah. Koordinasi dilakukan oleh kepala sekolah, guru, dan komite sekolah bersama yayasan yang menaungi sekolah tersebut. Pihak manajemen sekolah juga melakukan komunikasi, konsultasi dan evaluasi dengan Yayasan Patra Dharma Mandiri.

Dalam hal kemandirian, manajemen sekolah mengakui bahwa ada kemandirian yang tak sepenuhnya. Sebagai misal dalam hal keuangan. Sekolah masih tergan-



Suasana di masjid sekolah

tung pada tiga sumber dana dari luar. Sumber dana tersebut adalah dari orangtua siswa berupa uang pangkal dan SPP. Juga dari dana BOS Nasional dan BOS Daerah. Selain itu, dana dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Sementara dalam hal penentuan kegiatan siswa dan proses belajar mengajar dilakukan utuh secara mandiri. Kemampuan mengatasi kendala keuangan menjadi peluang bagi pengelolaan akademik dan non akademik. Dengan begitu, sekolah melakukan upaya terbaik untuk mempersiapkan lulusannya.

PROGRAM UNGGULAN

Salah satu hal unik yang dilakukan adalah kegiatan pengembangan iman dan takwa bagi kelas 10. Sedangkan bagi kelas 11, diterapkan program studi alam. Dan bagi siswa kelas 12 diwajibkan mengikuti program *struggle for the champion*, sebuah program magang di desa selama satu bulan. “Program ini dilakukan untuk meningkatkan kesiapan siswa hidup mandiri setelah lulus nanti,” papar Gunadi, sang Kepala Sekolah.

Untuk meningkatkan kapasitas siswa, pihak SMA Patra Dharma juga melakukan kerjasama dengan pihak luar. Tak kurang dari perguruan tinggi, BNN, Puskesmas, TNI dan Polri menjadi partner mereka. Kompetensi masing-masing lembaga tersebut dioptimalkan untuk kepentingan siswa. Sebagai contoh, perguruan tinggi mendampingi siswa dan guru dalam meningkatkan prestasi akademik.

Dalam hal kebutuhan pendidik, manajemen sekolah menerapkan strategi khusus. Strategi tersebut adalah melakukan promosi dan seleksi mandiri oleh Yayasan Patra Dharma Mandiri. Yayasan melakukan tes secara ketat dalam bidang



Peserta didik SMA Patra Dharma Balikpapan

akademik dan psikologi. Dengan begitu, pemenuhan kebutuhan akan pendidik dapat terjamin. “Guru adalah ujung tombak dalam pelayanan prima yang diterapkan sekolah kami,” jelas Gunadi.

Hal ini juga ditegaskan oleh Aisha Carrina, siswa kelas 11. Menurutnya, manajemen sekolah sangat membantu dalam proses belajar mengajar di sekolah. “Fasilitas sekolah untuk kegiatan ekstra kurikuler juga tersedia. Sarana prasarana belajar di sekolah sangat memadai,” ungkap Aisha meyakinkan. Lebih lanjut Aisha memaparkan kedekatan guru dan siswa dalam semua kegiatan sekolah. “Mereka sangat membimbing kami”, lanjutnya. Prestasi lulusan SMA Patra Dharma juga menjadi alasannya memilih sekolah ini.

Bagi masyarakat Balikpapan dan Kaltim, keberadaan SMA Patra Dharma memberikan kontribusi positif. Hal ini masih terus menjadi proses yang diperjuangkan oleh manajemen sekolah. Menjadikan sekolah yang mandiri dan unggul dalam bidang akademik dan non akademik. “Sehingga, outputnya menjadi kebanggaan sekolah,” tandas Gunadi. Meski begitu, kontribusi keterlibatan stakeholder amat diharapkan. Karena sekolah bukan satu-satunya elemen pendidikan. Hal itulah yang sering disampaikan Gunadi dan Komite sekolah pada pertemuan manajemen sekolah, guru, orangtua dan yayasan.

Sebagai sekolah di bawah nama besar Pertamina, manajemen SMA Patra Dharma berharap memberikan kontribusi optimal. Namun, jalan masih panjang. Masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan. Dukungan Pemerintah Pusat, Pemda serta institusi terkait, sangat diharapkan. Agar, mimpi membangun Indonesia yang lebih baik melalui pendidikan dapat terwujud. □



SMAN 2 TARAKAN - KALIMANTAN UTARA

Menuju Mandiri yang Seutuhnya

Butuh komitmen kuat untuk mewujudkan cita-cita sekolah yang mandiri. Tak hanya dari pihak sekolah, tapi juga dari pemerintah, masyarakat, dan siswa sendiri. Komunikasi antar-komponen ini jadi salah satu faktor kunci keberhasilannya.

Siapa yang tak ingin punya sekolah yang berhasil. Berhasil dalam artian dapat menciptakan lulusannya dengan prestasi maksimal. Unggul. Untuk mencapai ini memang bukan perkara mudah. Di samping perlu kerja keras, konsisten, dan selalu mengutamakan kepentingan umum ketimbang kepentingan pribadi, pun perlu tata atur yang lengkap yang dapat menaungi semua program sekolah. Dan di sinilah perlunya keberadaan manajemen berbasis sekolah yang dibangun berdasarkan kemampuan dan kebutuhan sekolah agar tidak selalu bergantung pada satu objek.

Demikian halnya dengan SMAN 2 Tarakan. Apa pun keputusan yang diambil untuk segala jenis kegiatan di sekolah, selalu mengutamakan kebersamaan dalam pengambilan keputusannya. “Di sekolah ini penyusunan program dan pengam-



Wajah dan bangunan SMAN 2 Tarakan (kiri dan atas), rapat internal dewan guru (bawah)

bilan setiap keputusan diserahkan dalam forum rapat,” ujar Sudarsono., kepala sekolahnya. Metode ini, lanjut Sudarsono, dirasa mampu menumbuhkan rasa memiliki kepada setiap warga sekolah baik itu tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Tidak hanya itu, melalui forum ini diharapkan seluruh warga sekolah dapat mengetahui secara menyeluruh segala proses penyusunan dan pengelolaan program sekolah. Sehingga dapat terbentuk komitmen yang kuat antarwarga sekolah.

“Saat penyusunan RKAS contohnya, setiap guru diberi daftar keperluan yang nantinya dirangkum oleh koordinator rumpun mapel. Setiap ekstrakurikuler diberikan daftar keperluan dan hasilnya dirapatkan bersama pembina ekstra dan pembina OSIS untuk dirangkum,” jelasnya. Seluruh usulan kemudian dirangkum





Edukasi keuangan di SMAN 2 Tarakan sebagai bentuk penguatan literasi finansial kepada peserta didik

untuk dijadikan bahan pertemuan tim RKAS. Lalu, saat dilaksanakan rapat dengan guru akan ditentukan skala prioritasnya. Hasil pertemuan tersebut kemudian akan dikembangkan dalam penyusunan RKAS.

KOORDINASI DENGAN BERBAGAI PIHAK

Segala upaya tentunya dilakukan oleh Sudarsono untuk mengoptimalkan pengelolaan sekolah secara mandiri. Melalui kerja sama tim baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang baik diharapkan dapat melancarkan pengelolaan sekolah secara optimal. Maka, terdapat beberapa hal yang tidak dapat diintervensi oleh pihak lain seperti pelaksanaan PPBD karena sekolah telah mengacu pada juknis yang sudah baku.

Membangun koordinasi yang baik dengan orangtua siswa, siswa, dan komite, menjadi hal yang penting untuk dijaga agar tetap menunjang kelancaran sekolah secara mandiri. Untuk lebih menjaga kerja sama semua pihak demi kelancaran operasional sekolah, Sudarsono mengaku telah melakukan pembagian tugas kepada masing-masing guru sesuai dengan bidangnya. Pembagian tugas ini juga dilakukan kepada pembina ekstrakurikuler dan para guru yang terkait dengan kegiatan tersebut. Begitupun, pada jajaran staf keadministrasian dilakukan pembagian tugas sesuai dengan dosisnya.

Dari sisi kebutuhan finansial, SMAN 2 Tarakan memaksimalkan dana BOS dan BOP. Selain itu, terdapat beberapa bantuan dana dari orangtua siswa melalui komite sekolah. Upaya inovatif lain yang juga ditempuh sekolah demi memenuhi pendanaan yakni seluruh siswa membayar selama anak menjadi siswa di SMAN 2 Tarakan. Hal ini dilakukan karena saat tahun ajaran baru 2013, jumlah siswa



Aktivitas pembelajaran di laboratorium komputer

membudak sedangkan ruang belajar dan guru terbatas. Kesepakatan ini dapat setelah diadakan rapat antara komite sekolah dengan orangtua siswa.

Dalam proses pembelajaran, sekolah mengatur dan menempatkan guru sesuai dengan kualifikasinya. Namun, Sudarsono mengaku semenjak dikeluarkannya edaran mengenai sekolah sudah tidak diperbolehkan mengangkat atau mengadakan pegawai baik pendidik atau tenaga kependidikan baru, maka sekolah mengoptimalkan kondisi yang ada. "Untuk guru mata pelajaran yang tidak ada gurunya, diajar oleh guru yang serumpun atau meminta bantuan sekolah lain yang gurunya masih kekurangan jam mengajar," ungkap Sudarsono.

Beberapa kerja sama juga dijalin oleh SMAN 2 Tarakan dengan beberapa pihak. Seperti Universitas Borneo Tarakan. Bentuk kerja sama yang dijalankan yakni mengirimkan mahasiswa PPL, sekolah mendapat undangan di setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh UBT seperti seminar dan lainnya. Dengan pihak Dinas Kehutanan berupa pelatihan pemanfaatan dan pembudidayaan lebah kelulut. Mendapatkan pelatihan dari Bank Indonesia Tarakan saat SMAN 2 Tarakan ditunjuk sebagai sekolah pelaksana kewirausahaan. Undangan seminar atau diskusi oleh BNN Kota Tarakan. Polres atau TNI selalu hadir saat sekolah membutuhkan bantuan berupa narasumber untuk MOS atau pengamanan saat kegiatan.

Tentunya seluruh program dan kerja sama ini dapat berjalan dengan baik berkat usaha seluruh warga sekolah. Sudarsono selalu berkoordinasi dan bermusyawarah dengan para wakil kepala sekola, guru, dan komite untuk menyelaraskan pemahaman baik konsep, tujuan, dan sistem pelaksanaan. Dari seluruh usaha ini diharapkan sekolah dapat menjadi sekolah yang mandiri seutuhnya dan menjadi rujukan bagi sekolah lain dalam berbagi hal. □

Tingkatkan Mutu lewat Kemandirian

Untuk mewujudkan visi sekolahnya, SMA Santo Yosef melakukan berbagai upaya penggalian potensi sekolah, termasuk pembinaan dan kegiatan yang dilakukan secara mandiri. Caranya, sekolah menerapkan pola manajemen partisipatif dalam pelaksanaan MBS.



Pada mulanya, SMA Santo Yosef, di awal-awal tahun pertama berdirinya, sekitar tahun 1963, sempat menggunakan ruang kelas SMP Budi Mulia yang berlokasi di Jalan Gereja Pangkal Pinang. Namun pada awal tahun 1965, SMA Santo Yosef pindah ke gedung baru yang berdampingan dengan SMP Santa Theresia. Sekolah yang berlokasi di Jalan Solihin, Kelurahan Gajah Mada, Kecamatan Rangkul, Pangkal Pinang ini merupakan sekolah swasta di bawah pengelolaan Yayasan Tunas Karya. Kini sarana dan prasarana sekolah pun sudah memadai. Begitu pula dalam soal pengelolaan. Mereka sudah diberi kesempatan untuk mandiri dalam mengelola sekolah. Kemandirian ini bertujuan agar sekolah dapat mengembangkan potensi yang ada demi tercapainya tujuan



Bangunan SMA Santo Yosef (kiri), kegiatan pameran pendidikan yang dilaksanakan di SMA Santo Yosef bekerja sama dengan beberapa universitas (atas dan kanan)

visi dan misi sekolah.

Untuk mewujudkan visi sekolah menjadi komunitas yang unggul secara akademis ini, maka perlu dilakukan upaya

yang lebih termasuk beberapa pembinaan dan kegiatan yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah. Caranya, SMA Santo Yosef menerapkan pola manajemen partisipatif dalam pelaksanaan MBS. Penerapan pola ini bertujuan agar semua stakeholder memiliki peran penting dan ikut andil dalam pengelolaan sekolah untuk peningkatan mutu.

“Semua guru di sini, memiliki peran dan fungsi masing-masing, baik dari segi pengelolaan administratif, kegiatan siswa, pembinaan maupun perluasan jaringan untuk kerjasama terkait peningkatan mutu. Semua punya penanggung jawab,” kata Friadelis Pardede, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan.

KOORDINASI TUGAS

Friadelis juga menjelaskan penerapan manajemen yang melibatkan semua stakeholder ini dimulai dengan melakukan rapat rutin terkait koordinasi tugas untuk merumuskan program yang akan dilaksanakan. Stakeholder diberi kewenangan untuk menggali gagasan yang kemudian dapat dituangkan melalui



program yang akan diterapkan, termasuk alternatif pengembangan jaringan kepada pihak luar sekolah untuk melakukan kerja sama. Namun ia juga menambahkan kewenangan pengembangan mutu ini harus selaras dengan visi dan kebijakan sekolah. Hal ini dikarenakan ada beberapa hal yang tidak bisa diintervensi pihak luar misalnya kegiatan rutin keagamaan, SOP pendidik dan ketenagapendidikan, dan hal lainnya yang menjadi privasi sekolah.

Adapun terkait pendanaan, segala bentuk kegiatan di sekolah maupun sarana prasarana, Erna widiati, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, mengatakan SMA Santo Yosef memiliki sumber dana selain BOS. Yakni keterlibatan bantuan dari Yayasan Tunas Karya dan dana iuran bulanan siswa. Selain itu, sekolah telah menjalin kerja sama dengan pihak luar terkait pemenuhan beberapa kebutuhan sekolah. Kerja sama yang dijalin antara lain dengan Cambridge University terkait implementasi kurikulum yang digunakan, MOU dengan Guang Xi Overseas Chinese School (Cina) terkait pembelajaran bahasa Inggris yang meminta tenaga pengajar ahli dari tempat tersebut untuk mengajar langsung ke kelas yang dikoordinatori oleh guru mata pelajaran Bahasa Inggris. Selain itu pula, SMA Santo Yosef juga mengadakan kerja sama untuk program pertukaran pelajar, Program IELTS dan TOFEL untuk siswa yang ingin kuliah di luar negeri.

Prestasi ini memang jadi daya tarik sekolah. “Aku senang sekolah di sini, dan ini jadi sekolah tujuan setelah lulus SMP. Sekolah ini memiliki fasilitas lengkap, pembelajarannya juga bagus, guru yang mengajarnya pun ahli, terlebih pada mata pelajaran yang dilombakan,” ucap salah seorang siswa. “Selain itu, di sekolah ini kami mendapat bimbingan khusus terkait kerohanian dan solidaritas an-



Salah satu kegiatan pembelajaran dalam bidang multimedia di SMA Santo Yosef

tarsesama. Penguatan karakter dan bimbingan khusus pun dilakukan untuk kemampuan menguasai mata pelajaran, apalagi saat ada perlombaan di tingkat kota atau provinsi hingga nasional,” tambahnya.

Di sekolah ini juga ada kegiatan expo education. Ini adalah kegiatan rutin yang diselenggarakan sekolah berupa kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Expo education diselenggarakan sebagai kegiatan rutin sekolah yang bertujuan untuk memberikan ruang informasi kepada peserta didik SMA Santo Yosef tentang perguruan tinggi dan dunia perkuliahan.

Kegiatan pengembangan kesiswaan yang juga diunggulkan adalah jurnalistik untuk siswa Kelas XII. Muatan lokal Jurnalistik ini adalah kegiatan meliput, mengumpulkan informasi, dan melaporkan secara menarik, efektif, dan tepat sasaran. Sementara untuk kelas X dan XI muatan lokal diintegrasikan pada pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler yang rutin dilaksanakan setiap hari sabtu maupun intrakurikuler seperti pelayanan bimbingan konseling yang berkenaan dengan pribadi, masyarakat, belajar, dan karier peserta didik.

Untuk ke depannya, sekolah tetap berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengelolaan yang mandiri, atas dasar potensi dan kemampuan yang dimiliki. Namun, dalam pelaksanaannya tak luput pula dari kendala. Cuma, ini tak harus jadi risau, toh “masih banyak jalan menuju Roma”, untuk menyelesaikannya. □



Kegiatan pembelajaran peserta didik di laboratorium IPA



SMAN 3 TANJUNG PINANG - KEP. RIAU

Menjalin Kerja Sama demi Kemandirian

Sadar bahwa keberlangsungan sekolah tidak hanya dari bergantung dari dana pemerintah, sekaolah melakukan berbagai upaya. Antara lain menggiatkan hubungan dengan pihak luar, mulai dari alumni sampai perusahaan. Tujuannya satu: pelayanan kepada siswa dapat optimal.

Terletak di tengah lingkungan masyarakat, bertetangga dengan dinding rumah warga, dan bagian depan berhadapan langsung dengan jalan utama. Di sinilah SMA Negeri 3 Tanjung Pinang berada. Beralamat di Jalan Tugu Pahlawan No. 30, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, SMAN 3 Tanjung Pinang yang kini dikepalai oleh Dra. Asmiati, W.R. dengan masa jabatan

belum genap satu tahun ini telah berdiri sejak 1986. Dengan luas lahan sekitar lima ribuan meter persegi, beberapa bangunannya sengaja dibuat bertingkat untuk menghemat tempat.

Dalam pengelolaan sekolahnya, Asmiati W.R. menuturkan, sekolah menerapkan struktur pengelolaan yang terdiri dari empat wakil kepala sekolah, yakni wakasek bidang kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, dan humas. Setiap bidang memiliki peran dan fungsi masing-masing. Namun, dalam pelaksanaannya semua bidang tetap berkoordinasi satu sama lain. Tidak hanya itu, disusun pula struktur kepanitian guru untuk beberapa kegiatan. Dalam hal ini, kepala sekolah selalu menghimbau seluruh warga sekolah untuk terlibat aktif pada semua proses kegiatan sekolah. Pun demikian dengan peran dan fungsi komite dan masyarakat.

BERAGAM KERJA SAMA

Melalui manajemen berbasis sekolah inilah Asmiati mengerahkan segala upaya agar operasional di SMAN 3 Tanjung Pinang tetap berjalan. Tak dipungkiri kalau sekolah masih memiliki banyak kekurangan, baik sarana dan prasarana maupun dalam tahap tata kelola ruang. Cuma hal ini tidak menjadi penghalang bagi sekolah untuk tetap memberikan pelayanan terbaik bagi siswa dan masyarakat.

“Segala kebutuhan sekolah tidak selalu harus menunggu bantuan dari pemerintah. Sekolah bisa melakukan beragam upaya untuk merealisasikan kebutuhan dan mengelola secara mandiri,” ujarnya. Salah satu usaha yang telah dilakukan



Tampak SMAN 3 Tanjungpinang (kiri). Bangunan ruang kelas SMAN 3 Tanjungpinang (atas)

dapat mengembangkan minat dan bakat siswa.

WUJUD KOORDINASI

Segala bentuk pengambilan kebijakan dan keputusan terkait pengelolaan dan kerja sama, sekolah selalu mengedepankan koordinasi satu sama lain melalui rapat. Meski menjalin kerja sama dengan beberapa pihak, ada beberapa kebijakan sekolah yang tidak bisa diintervensi oleh pihak lain, seperti dalam hal anggaran pendanaan dan penanganan keadaan siswa.

Kemudian, soal prestasi, Asmiati menjelaskan bahwa peserta didik SMAN 3 Tanjung Pinang lebih memiliki peluang dalam prestasi non-akademik. Tidak seluruhnya, tapi beberapa siswa juga memiliki potensi di bidang akademik. Namun, sekolah terus berupaya untuk meningkatkan peluang prestasi di bidang akademik. Salah satu raihan prestasi non-akademik terbaik yakni pada bidang rohis. Tahun ini Rohis SMAN 3 Tanjung Pinang terpilih menjadi perwakilan perkemahan Rohis Nasional yang diselenggarakan di Provinsi Bangka Belitung.

Dalam mengelola sekolah, tentunya selalu terdapat berbagai macam rintangan dan halangan. Melalui MBS, sekolah diharapkan mampu meminimalisasi hal tersebut. Begitupun yang dilakukan oleh SMAN 3 Tanjung Pinang. Walau masih banyak hal yang harus dibenahi dalam peningkatan mutu, sekolah dapat menjalin banyak kerja sama dengan berbagai pihak. Tentunya kerja sama itu harus berjalan sesuai program yang telah tersusun agar sekolah dapat berkembang dan menjadi mandiri serta menghasilkan siswa yang unggul. □



Pembelajaran dan pengenalan tanaman TOGA oleh peserta didik

Menaruh Asa dari Sekolah Desa

Misi sosial kemasyarakatan masih tetap dijalankan oleh pengurus SMA Purnama Trimurjo sejak berdiri pada 1986, meski kondisinya tertatih-tatih. Tapi prinsip pendiri, sekolah tak boleh ditutup untuk memberi kesempatan kepada anak-anak desa di sekitar sekolah agar mendapatkan pendidikan yang layak.

Berbicara dengan para siswa SMA Purnama Trimurjo, Metro, Lampung Tengah, kental sekali bahasa Jawa Tengah-nya. Bahkan mereka lebih sering berkomunikasi dalam bahasa Jawa ketimbang bahasa Indonesia, meski lokasi sekolah mereka ada di Lampung. Ternyata wilayah Notoharjo, Trimurjo adalah kawasan yang hampir seluruh penduduknya berasal dari Pulau Jawa. Nama SMA Purnama pun asalnya diambil dari tiga nama desa di sana, yaitu Purwodadi- Notoharjo-Untoro, maka jadilah Purnomo atau Purnama.





Suasana pembelajaran di dalam kelas (kiri), tenaga pendidik dan tim manajemen SMA Purnama Trimujo (atas)

Lokasi sekolah nun jauh di desa, di Jl. Kyai Nusin, Notoharjo, dengan pemandangan khas di Pulau Jawa di mana sepanjang kiri dan kanan jalan dipenuhi persawahan penduduk. Sejak dibuka pada tahun 1986, sekolah ini menjadi tumpuan harapan anak-anak desa untuk mendapatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMA. Karena di daerah ini hanya ada satu SMA negeri yang belum lama dibuka, tapi jaraknya jauh, daya tampung terbatas dan tak terjangkau secara ekonomi. Maklum, pekerjaan orangtua siswa sebagian besar petani, sopir dan buruh.

Menurut Widodo, Kepala Sekolah SMA Purnama Trimurjo, latar belakang dibukanya jenjang SMA setelah ada pemikiran dari para sesepuh desa yang peduli dengan pendidikan, yaitu para kepala sekolah SD dan lurah setempat. “Saat itu ayah saya yang menjadi kepala sekolah SD, bersama sesepuh desa memikirkan masa depan pendidikan anak-anak di desa setelah lulus SD dan SMP. Kebetulan sudah ada sekolah yang didirikan yaitu SD dan SMP Purnama, maka mereka pun sepakat membuka SMA yang lokasinya sementara menumpang di sekolah SMP,” kenang Widodo. Nyatanya, meski statusnya masih menumpang di kelas SMP, justru SMA Purnama membuka kelas di pagi hari sementara kelas SMP memulai kegiatan belajar mengajar siang hari. Pertimbangannya lebih karena



Perpustakaan dan laboratorium komputer sekolah

sebagian besar guru yang mengajar di SMP adalah guru SD yang kegiatan belajarnya mengajarnya pagi hari.

MENGEMBAN MISI SOSIAL

Mengingat sejak awal misi sekolah adalah sosial kemasyarakatan, manajemen sekolah rela membebaskan biaya bagi siswa kelas X. Sementara untuk kelas XI dan XII dikenakan biaya Rp175.000 per bulan. Itu pun bagi siswa yang mampu. Artinya, ada kemungkinan sekolah membebaskan pula siswa yang tidak mampu membayar SPP. Tentu dana sebesar ini jauh dari cukup untuk membiayai operasional sekolah dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 27 orang termasuk kepala sekolah, 1 penjaga sekolah dan 1 petugas keamanan.

Pernah juga ada insentif dari kabupaten Rp50.000 per bulan namun tidak berlanjut. Sempat terlintas dari pengurus yayasan dan pengelola, untuk menutup sekolah ini karena kesulitan pendanaan. Namun para pendiri bertekad mengupayakan agar sekolah tetap jalan agar anak desa mendapatkan pendidikan yang layak. Beruntung kemudian ada dana BOS serta bantuan dari komite sekolah serta dana lain yang sumbernya sah dan tidak mengikat. Sementara bantuan sarana dan prasarana diperoleh dari provinsi dan kabupaten. "Karena sekolah ini milik yayasan, jadi sekolah memiliki kewenangan sendiri dalam pengelolaannya, baik dalam hal pengembangan kurikulum, pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan serta pengembangan sarana dan prasarannya," tambah Widodo.

Sesuai dengan kondisi sekolah dan kemampuan akademik siswa, manaje-

Peserta didik SMA Purnama Trimurjo

men SMA Purnama Trimurjo pun memberi penekanan lebih pada bidang olahraga dan kewirausahaan. Namun belakangan, bidang kewirausahaan yang berjalan. Produk yang sudah bisa dihasilkan oleh siswa di antaranya ada cukil gigi, roti tape, dan selai pisang. Produk ini sudah



dititip ke warung-warung di lingkungan dekat sekolah. Ke depan, Widodo berencana memanfaatkan kios kecil miliknya di dekat sekolah untuk menampung dan menjual semua produk siswa.

Dengan fasilitas seadanya tak membuat siswa menjadi patah semangat. Mereka tetap disiplin dalam menaati peraturan sekolah, mulai dari jam masuk kelas pk 7.15 dengan diawali kegiatan mengaji yang dibimbing guru kelas. Dalam waktu satu minggu siswa harus sudah menghafal dua surat Al-Quran dan saat sholat Dzuhur wajib berjamaah di masjid dekat sekolah. Saat ini sekolah membuka enam rombel sementara jumlah ruang kelas hanya ada lima sehingga satu rombel memakai ruangan laboratorium MIPA. Masing-masing rombel, yakni kelas X ada 27 siswa, kelas XI ada 29 siswa dan kelas XII ada 50 siswa dengan peminatan IPA dan IPS. Sementara kurikulum yang dilaksanakan adalah Kurkilum 2013. SMA Purnama Trimurjo juga telah melaksanakan UNBK walaupun baru memiliki 14 komputer.

Apa pun kondisinya, yang pasti siswa masih menaruh harapan besar kepada sekolah ini. Sebut saja Rionaldo, siswa kelas XII IPS yang memilih SMA Purnama Trimurjo untuk menimba ilmu karena pertimbangan dekat dengan rumah. Selain itu sekolah ini menerapkan disiplin yang kuat dalam hal melaksanakan ibadah salat wajib. "Guru-gurunya juga enak cara mengajarnya," tambahnya. Pun begitu dengan Ica Aristia, siswa kelas XII IPA yang rumahnya dekat dengan sekolah. Menurutnya, cara mengajar guru-guru mudah dicerna dan pergaulan dengan teman juga baik. Tetap semangat Nak, jangan mengalah dan berkeluh kesah pada keterbatasan, semoga cita-citamu tercapai kelak. □



SMAN 1 PULAU BURU - MALUKU

Kedisiplinan Pembawa Keberhasilan

Di bawah kepemimpinan Kepala Sekolah Misiani Tomui, SMAN 1 Pulau Buru makin berkibar. Namun, persoalan pengelolaan dana yang terbatas menjadi kewajiban utama seorang kepala sekolah untuk menyelesaikannya. Berbagai cara pun dilakukan.

Tiga tahun lalu adalah awal sekolah ini memberlakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) menjadi satu shift. Sebelumnya, sekolah memberlakukan KBM dua shift. Saat itu, keterbatasan ruangan yang menjadi kendala. Padahal, sebagai sekolah favorite di Kabupaten Buru, animo peserta didik membanjir. Dan, atas tuntutan masyarakat sekolah pun menerima saja. Meski melelahkan,



Wajah dan bangunan SMAN 1 Pulau Buru (kiri), salah satu sudut sekolah (atas)

membutuhkan banyak tenaga pendidik, pun upaya yang tak ringan.

“Kami lelah dengan pola dua shift. Kami bertekad untuk menjadikan satu shift,” begitu kenang Misiani Tomui, kepala sekolahnya. “Kami para pendidik, harus mengajar dari pagi hari hingga sore. Rumah tangga jadi berantakan. Pola ini terlalu berat terutama untuk guru wanita yang sudah memiliki anak,” lanjut Kepala Sekolah yang sangat disiplin dalam mendidiknya.

Tapi, membangun gedung sekolah itu tak murah. Mereka tahu itu. Untuk mendapatkan dana dari pemerintah, juga tak seperti membalik telapak tangan. Semua risiko dan rintangan siap mereka hadapi dengan kesungguhan. Lalu, upaya dilakukan. Sekolah yang telah berdiri sejak 35 tahun lalu ini melakukan banyak upaya mewujudkan niatan. Antara lain berkoordinasi dengan Propinsi Maluku dan Kementerian Pendidikan. Perlahan dana mengalir. Dari dinas pusat, dinas propinsi maupun pemerintah daerah.

MENGUBAH POLA KBM

Tiga tahun lalu, tepatnya pada 2015, SMAN 1 Buru memberlakukan kegiatan belajar mengajar satu shift. “Kami hanya menerima siswa sesuai dengan kemampuan fasilitas yang ada. Jumlah rombel tidak menjadi prioritas. Yang penting siswa belajar dengan nyaman dan guru mengajar dengan efektif,” kata Misiani. Hasilnya, prestasi akademik dan non-akademik membanjiri sekolah itu. Sede-



Salah satu sudut dan mading sekolah

ret prestasi diukir oleh siswanya. Tak hanya di lingkup Kabupaten Buru, pun di tingkat Provinsi Maluku. Tak hanya antarsekolah menengah atas, tapi juga di antara peserta umum. Prestasi ini didukung oleh fasilitas dan bimbingan para guru yang bersungguh-sungguh dalam mengeksplorasi potensi siswa.

Keberhasilan SMAN 1 Buru adalah pada kedisiplinan. Kepala sekolah dan seluruh pembina kegiatan siswa tak mau memilih salah satu. Kalau mau hebat di ekstrakurikuler, juga harus hebat di akademik. Hal ini ditekankan oleh Misiani. Tak ada tawar-menawar. “Karena, kesempatan sekolah di SMAN 1 berarti menyingkirkan kesempatan siswa lain bersekolah di sini,” begitu ungkap Muhammad Nur, guru pembimbing siswa. Seperti hendak menegaskan kekompakan pendidik dalam proses pembelajaran di sekolah itu. “Tanpa prestasi akademik yang baik, seorang siswa memiliki keterbatasan dalam peluang berikutnya,” lanjut Muhammad Nur.

Perilaku disiplin ini tentu menjadi konsekuensi bagi para siswa. Mereka sadar dan patuh pada konsep pembelajaran di sekolah. Hal ini diungkap oleh Muhamad Ilhamsyah Watiheluw, siswa kelas 11 IPA 3. “SMAN 1 Buru memiliki kedisiplinan yang kuat,” ujar Ketua OSIS ini. Diakuinya pula, SMAN 1 Buru memiliki mutu pen-



Piala dan piagam
SMAN 1 Pulau Buru

didikan terbaik. Ini pula alasan Muhammad Ilhamsyah memilih bersekolah di sini. Meski begitu, ia merasakan ketegangan dalam kegiatan belajar mengajar

di kelas. Guru seperti memiliki beban untuk membuat siswa mengerti. “Padahal, seharusnya ada cara belajar yang lebih menyenangkan,” ujarnya.

Prestasi juga terus ditunjukkan. Tahun ini SMAN 1 Buru menjadi sekolah rujukan. Tak hanya itu. Sekolah pun menjadi sekolah model dan pelaksana penuh Kurikulum 2013. Prestasi yang membanggakan juga ditunjukkan oleh alumni. Jabatan penting diemban oleh mereka, termasuk pejabat Bupati Kabupaten Buru adalah alumnusnya. Proses memang tak akan mengingkari hasil, begitu keyakinan mereka.

Di Kabupaten Buru, seluruh sekolah menerapkan pendidikan gratis. Biaya operasional sekolah, termasuk gaji guru, diperoleh dari dana BOS. Baik dari BOS pusat maupun BOS daerah. Komite sekolah juga menekankan hal itu. Karenanya, kemampuan mengelola dana yang terbatas menjadi kewajiban utama seorang kepala sekolah. “Kami akan sangat repot, kalau dana BOS terlambat cair,” keluh Misiani. Ungkapan itu bukan tanpa sebab. Beberapa kali, dana yang diharapkan terlambat cair. Kesulitan sekolah menjadi beban di luar kendali manajemen sekolah. Kalau sudah begini, “Kami harus berutang untuk membayar operasional sekolah,” lanjut Misiani sambil tersenyum.

Kemampuan manajerial Misiani dan para guru masih diuji. Perjalanan masih panjang. Banyak target prestasi yang masih jadi impian. Kesungguhan dan konsistensi mewujudkannya menjadi kunci keberhasilan. Semoga angan mereka menghasilkan lulusan terbaik dapat diwujudkan. □



SMAN 1 HALMAHERA SELATAN - MALUKU UTARA

Manajemen Kemandirian

SMAN 1 Halmahera Selatan atau dikenal dengan Nama SMAN 1 Bacan merupakan sekolah lanjutan atas pertama di Pulau Bacan Kabupaten Halmahera Selatan. Sekolah yang dikepalai oleh Abd. Rahim Umawaitina ini menjadi salah satu sekolah idaman di Bacan karena prestasi dan pengalaman mendidik yang baik.

Sejak dikenalkan program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), SMAN 1 Bacan juga menerapkan sejumlah hal dalam mengembangkan sekolah dengan menyesuaikan kondisi sekolah, kearifan lokal, budaya setempat, kemampuan sumber daya manusia yang ada dan potensi daerahnya. Sebagaimana dipahami bersama bahwa MBS dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggungjawab) lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas atau keluwesan kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orangtua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan,

pengusaha, dan sebagainya.), untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan otonomi tersebut, sekolah diberikan kewenangan dan tanggungjawab untuk mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan tuntutan sekolah serta masyarakat atau stakeholder yang ada. Meski demikian, MBS yang diterapkan oleh sekolah tetap tidak dibenarkan jika menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Keberadaan MBS membuat sekolah terdorong untuk lebih mandiri, tentu saja kemandirian yang dimaksud harus didukung oleh sejumlah kemampuan sekolah,” ungkap Abd. Rahim. Kemampuan sekolah meliputi kemampuan dalam mengambil keputusan yang terbaik, kemampuan bermusyawarah serta menghargai perbedaan pendapat, kemampuan memobilisasi sumberdaya yang ada, kemampuan memilih cara pelaksanaan yang terbaik, kemampuan berkomunikasi dengan cara yang efektif, kemampuan memecahkan persoalan-persoalan sekolah, kemampuan adaptif dan antisipatif, kemampuan bersinergi dan berkolaborasi, dan kemampuan memenuhi kebutuhannya sendiri.

“Sebagai sekolah yang sudah tua, hampir 40 tahun, beberapa bangunan sekolah sudah dalam kondisi layak direvitaliasasi, apalagi lahan sekolah ini kan bekas rawa yang diuruk, sehingga jika hujan datang, halaman sekolah kami banjir, tidak bisa melakukan aktivitas upacara dan olahraga di luar ruangan. Bahkan tidak ada hujan pun kondisinya lembab, ruangan mudah berjamur. Tapi ini hanyalah dinamika sekolah, semoga banyak yang peduli, sehingga sekolah tetap berjalan,



Bangunan dan suasana SMAN 1 Halmahera Selatan (kiri), suasana ruang guru (atas)



Aula dan masjid sekolah (atas) Salah satu sudut bangunan sekolah (kanan)

anak-anak tetap belajar dan guru mengajar,” ungkap Kepala Sekolah.

Benar saja, sejauh ini, SMAN 1 Halsel atau Smansa Bacan ini masih terus menjadi sekolah tujuan masyarakat. Bahkan sejumlah prestasi sekolah di bidang akademik dan non akademik sudah diakui oleh masyarakat setempat. Bersama 25 rombongan belajar (Rombel) dengan total siswa hampir 900, menunjukkan bahwa sekolah memiliki kepercayaan dari masyarakat. Bagi SMAN 1 Bacan, masyarakat adalah unsur terpenting dalam mendukung manajemen sekolah yang diterapkan. Keterlibatan masyarakat dalam Komite Sekolah menjadi sumber masukan dalam merealisasikan sejumlah program kerja sekolah.

“Saya senang bersekolah di sini, ini sekolah favorit, sekolahnya sering menjadi juara baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Siswanya juga banyak yang pandai, sehingga saya terpacu sekolah di sini. Sekolah juga keamanannya baik, seluruh gurunya juga baik dalam mendidik kami semua. Orangtua juga sering diundang ke sekolah untuk didengarkan pendapatnya,” ujar Suci Prasasti Albizia Achmad, Siswa SMAN 1 Bacan Kelas XII IPA.

PENTINGNYA KEMANDIRIAN

Mandiri itu baik, dengan kemandirian, maka sekolah menjadi lebih tangguh dan tertantang mengukir prestasi serta menghasilkan siswa-siswi yang bermasa de-

pan baik pula. Kemandirian sekolah tentu bukanlah dalam ukuran kemandirian keuangan, pasalnya sekolah milik pemerintah masih banyak bergantung pada anggaran pemerintah baik APBD dan APBN. Meski demikian, ketika sekolah di-bolehkan menerima bantuan sukarela dari Komite Sekolah, maka dana bantuan inilah yang dimanfaatkan untuk melakukan sejumlah kegiatan kemandirian.

“Nilainya tidak banyak, cenderung sangat minim dibandingkan jumlah seluruh siswanya. Namun apa yang ada kami gunakan untuk mendukung kegiatan sekolah dengan baik, kami ingin juga suatu hari ada alumni yang sudah menjadi profesional, pejabat, PNS dan pengusaha pun peduli dengan sekolah sehingga ikut membangunnya,” ungkap Abd. Rahim.

Demi terwujudnya manajemen sekolah yang berorientasi pada masyarakat atau khususnya siswa, maka SMAN 1 Bacan pun sigap dan responsif dalam mengajak seluruh elemen sekolah bekerja bersama. Semua unsur sekolah siap untuk mengklarifikasikan visi, misi, tujuan, sasaran, rencana dan program-program penyelenggaraan MBS yang tepat arah.

Kejelasan visi, misi, sasaran, rencana dalam aplikasi program kerja sekolah merupakan hal penting yang akan membawa sekolah berjalan sesuai arah. Fleksibilitas yang memungkinkan untuk dilakukan oleh sekolah dengan MBS membuat sekolah siap menjalankan aktivitas yang inovatif dan kreatif menyongsong era digital saat ini. □





SMA KATOLIK VILLANOVA - PAPUA BARAT

Giatkan MBS agar Sekolah lebih Otonom

Penerapan MBS bagi sekolah dengan asrama ini sangat dibutuhkan demi pencapaian sekolah yang lebih otonom, mandiri, dan lebih berdaya. Dan, sejak SMA ini berdiri, sebenarnya penerapan manajemen berbasis MBS telah dilakukan, meski sebutannya berbeda.

Bagi SMA Katolik Villanova Manokwari, Papua Barat, kegiatan manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan kegiatan baru di lingkungan mereka. Namun sejauh ini, penerapan MBS tersebut secara bertahap dilakukan dan menjadi bagian dari sistem pengelolaan sekolah yang selama ini berbasis pada unit kerja, ketika rektor membawahi sekolah dan unit asrama. Sekolah ini memang merupakan sekolah yang memiliki unit asrama bagi para siswanya. Meskipun tidak seluruhnya tinggal di asrama, ada sebagian siswa yang tinggal di asrama, terutama para siswi yang berasal dari daerah yang cukup jauh.

“Memang, sejauh ini kegiatan MBS di SMA kami masih belum berjalan sepenuhnya. Namun, secara bertahap kami lakukan karena kegiatannya sangat membantu dalam hal pengelolaan sekolah,” ungkap Adam Wospakrik, kepala sekolah SMA Katolik Villanova Manokwari. “Secara manajemen, sejak SMA ini berdiri, sebenarnya sebagian penerapan berbasis MBS telah dilakukan. Tetapi sebutannya saja yang berbeda. Karena harus diakui, sosialisasi MBS di Papua Barat masih sangat baru,” tambah Adam.

MENUJU KEMANDIRIAN

Dalam hal kemandirian, SMA Villanova telah menerapkannya pada pengelolaan keuangan sekolah dan tenaga pendidik. Pemenuhan kebutuhan finansial sekolah yang bersumber dari uang sekolah, dana BOS, dan donatur, dikelola tanpa campur tangan pihak lain. Se-

Tampak depan dan suasana SMA Katolik Villanova (kiri) dan suasana dari sudut berbeda (kanan dan bawah)





Salah satu sudut bangunan sekolah (atas dan kanan)

cara otonom sekolah juga dapat mencari donatur serta memaksimalkan dana BOS sebagai sumber keuangan sekolah. Selain itu, kemandirian juga diterapkan dalam perekrutan pegawai tetap yayasan, tenaga pendidik kontrak maupun guru tambahan yang merupakan PNS.

“Hanya dalam pengembangan kurikulum saja SMA ini masih bisa dikatakan belum mandiri. Sebab, pengembangan kurikulum selama ini masih mengikuti kurikulum yang diterapkan pemerintah. Namun secara garis besar, manajemen berbasis sekolah di SMA Katolik Villanova Manokwari berjalan secara bertahap demi tujuan kemandirian sekolah yang lebih otonom,” jelas Merry, salah satu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Sementara dalam hal pembelajaran, SMA Katolik Villanova secara mandiri dapat menentukan sendiri jadwal, rombel, dan pengadaan evaluasi pembelajaran.

Meskipun pengelolaan sekolah SMA Katolik Villanova Manokwari kian terbuka dan otonom, ada yang menjadi kewenangan sekolah yang tidak bisa diintervensi oleh pihak luar. Seperti mengubah misi dan visi sekolah, kegiatan yang berkenaan dengan spiritualitas di lingkungan sekolah, dan pengelolaan keuangan sekolah, kecuali dana BOS. Ini merupakan ketentuan rapat dewan yang merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan di SMA Katolik Villanova Manokwari.

SEKOLAH IDAMAN

Menurut salah seorang siswanya, Jennifer, sekolahnya punya reputasi yang baik di Papua Barat, khususnya Manokwari. Apalagi dengan kegiatan ekstrakurikuler

seninya yang mengukir prestasi. Karena itulah Jennifer tertarik untuk sekolah di SMA Katolik Villanova. “Bukan saja orangtua yang mendukung, pun guru les saya menganjurkan saya untuk sekolah di tempat ini,” ujar Jennifer yang pernah merasakan sekolah di Negeri Kangguru ini.

Senada diungkapkan oleh Arie, yang sejak SMP sudah mengidam-idamkan sekolah dengan unit asrama ini. “Saya tahu dari orangtua kalau di Manokwari ada sekolah bagus dan berasrama. Makanya saya berada di sini sekarang,” cerita Arie yang berasal dari distrik Bintuni. Namun, Arie masih merasakan ada beberapa fasilitas sekolah yang kurang memadai. Sebagai siswa jurusan IPS, Arie mengakui kalau SMA tempatnya belajar tidak memiliki laboratorium atau hal-hal yang menjadi penunjang pelajaran Geografi. “Globetidak ada dan kami masih menggunakan peta-peta lama,” ungkap Arie. Senada dengan Arie, Jennifer yang jurusan IPA pun mengungkapkan hal yang sama.

“Sebagai wakil kepala sekolah, saya menyadari masih banyak yang belum memadai di sekolah ini. Dan untuk itulah kami mengimbau agar pemerintah maupun pihak luar lebih peduli dan dapat membantu. Terutama untuk penunjang proses belajar mengajar.” kata Merry. Sementara untuk penerapan MBS, Merry berharap pemerintah juga lebih giat bersosialisasi dan memberikan penghargaan, supaya sekolah yang jauh seperti SMA Katolik Villanova ini tidak ketinggalan dengan sekolah di daerah lain. “Kalau MBS telah maksimal diterapkan, tentu saja SMA Katolik Villanova Manokwari ini bisa makin berkembang dan lebih otonom.” ucapnya. □





SMAN 9 PEKANBARU - RIAU

Buah Manis ‘Sekolah Artis’

Tiga puluh dua tahun sudah SMAN 9 Pekanbaru berdiri. Sekolah yang kaya pengalaman ini telah menjadi SMA yang mandiri serta berhasil memompa prestasi dan karya dalam bentuk acara yang terselenggara atas kerja sama dengan seluruh warga sekolahnya.

Bangunan bernuansa hijau, cukup meneduhkan saat hendak masuk lingkungan SMAN 9 Pekanbaru. Ikon tulisan nama sekolah yang besar berwarna kuning, kontras menyambut siapa pun yang tiba di depan gerbang sekolah. Kesan asri cukup terasa dari sekolah yang berlokasi di Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ini. Pepohonan yang rindang berjejer dari depan gerbang hingga ke bagian dalam sekolah. Maka tidak heran bila SMAN 9 Pekanbaru meraih gelar sekolah Adiwiyata Nasional sejak 2016.

Namun, tidak selalu untuk mencapai keberhasilan itu hanya tertumpu pada satu sumber. Justru, memanfaatkan segala sumber yang ada di sekitar, ada kalanya bisa lebih meningkatkan kualitas. Hanya, akan menjadi persoalan jika segala sumber itu kurang terkelola dengan rapi dan profesional. Di sinilah perlunya penerapan manajemen yang berbasis pada kemampuan diri sendiri dalam mengelola lingkungannya.

Seperti halnya penerapan manajemen di SMAN 9 Pekanbaru. Di sekolah ini, hasil penerapan manajemen yang terkelolanya dapat terlihat dari acara yang kerap



Wajah SMAN 9 Pekanbaru (kiri), pengurus dan pembina osis sedang melakukan rapat koordinasi (atas)

digarap oleh warga sekolahnya. Tak hanya karena peran guru dan manajemen sekolahnya, tapi juga berkat antusiasme dan kerja sama dari seluruh para siswanya. Sebagai contoh, acara yang biasa diadakan setiap semester yang diikuti oleh setiap perwakilan kelas, yang mereka labeli 'Rampai Melayu'.

Acara yang menyajikan bentuk budaya masyarakat suku Melayu ini merupakan bentuk pelestarian dan penguatan budaya Melayu yang menjadi visi sekolah. Dalam acara tersebut para siswa menampilkan budaya dan adat Melayu seperti prosesi pernikahan. Bahkan, literasi pun dijadikan digiatkan oleh SMAN 9 Pekanbaru. Berkat kemandirian serta kerja sama seluruh warga sekolah, mereka berhasil menggelar acara Festival Literasi pada tahun 2017. Acara yang direncanakan menjadi acara tahunan ini menampilkan karya literasi darisiswa.

Hal menarik terlihat dari setiap persiapan acara. "Setiap ada acara sekolah, guru di sini sampai rela menginap di sekolah demi kelancaran acara," ungkap Irna. Senada dengan Irna, Ketua OSIS SMAN 9 Pekanbaru, Hadi, yang saat ini duduk di kelas XI IPA 4 mengungkapkan bahwa kerja sama seluruh pengurus osis, para perwakilan ekstrakurikuler, dan kelas cukup nyata. Kesuksesan acara Festival Literasi tahun 2017 menjadi acuan untuk mempersiapkan kegiatan berikutnya.



Peserta didik yang sedang membersihkan dan membawa sampah kelas untuk dikumpulkan ke bank sampah sekolah (atas), suasana ruang guru (bawah)

KERJA SAMA BERBUAH MANIS

Dari total 47 anggota pengurus OSIS, yang terdiri atas 33 siswa kelas X dan 14 siswa kelas XI, Pahlauddin selaku pembina, selalu memberikan bimbingan serta

memantau perkembangan kegiatan OSIS. Terlebih saat persiapan acara Festival Literasi yang akan diselenggarakan bulan November 2018. “Untuk mengganti suasana, mereka biasanya melakukan rapat pertemuan di sudut taman sekolah membahas persiapan acara,” ungkap Pahlauddin.

Irna menambahkan, tidak jarang di setiap acara yang diselenggarakan oleh warga SMAN 9 Pekanbaru turut dihadirkan artis dan musisi sebagai bintang tamu. “Karena itulah sekolah kami dijuluki sebagai ‘sekolah artis’,” ungkap Irna sambil tersenyum. Para pengurus OSIS pun dinilai sangat mandiri saat melakukan persiapan kegiatan. “Mereka berinisiatif mengajukan proposal kegiatan ke sekolah, menyampaikan tema kegiatan, dan kami pengurus hanya membantu untuk berdiskusi saja,” lanjutnya.

Kerja sama yang dilakukan sekolah tidak sebatas pada internal warga sekolah



Suasana pembelajaran di ruang kelas

saja. “Tapi lebih dari itu kami juga aktif melakukan pertemuan dengan komite sekolah saat ada pembahasan yang perlu disampaikan, baik berupa perkembangan sekolah, siswa, dan hal lain,” tambah Ibnu, wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Karena itu sekolah menyediakan ruang konseling komite sekolah sebagai sarana komunikasi antara sekolah dengan wali murid sekaligus menampung masukan dan keluhan demi perkembangan sekolah yang lebih baik.

“Sekolah kami juga melakukan kerja sama dengan Polsek Limapuluh untuk pengamanan siswa. Mereka sering menjadi pembina upacara, menyampaikan tentang lalu lintas, bahaya narkoba dan lainnya,” ungkap Irna. Selain itu Korem 031/Wira Bima yang jaraknya dekat dengan sekolah juga sering melakukan kerja sama dengan SMAN 9 Pekanbaru. Salah satunya saat latihan dasar kepemimpinan siswa.

Semua kegiatan yang berlangsung di SMAN 9 Pekanbaru, tak lepas dari pengawasan pihak sekolah. Karena, bagaimanapun semua itu merupakan aset berharga sekolah yang perlu dijaga. Dengan manajemen yang terkontrol, baik, sungguh-sungguh, bukan tidak mungkin segala aset berharga ini akan membuahkanyangmanis. Dan, tak hanya warga sekolah, masyarakatsekitarpun dapat ikut mencicipinya. □



SMAN 1 TAPALANG - SULAWESI BARAT

Ikhtiar Tingkatkan Mutu Pendidikan

MBS yang telah diterapkan oleh SMA Negeri 1 Tapalang banyak melahirkan program untuk pengembangan sekolah. Pendanaan masih jadi kendala. Dan berbagai upaya pun terus dilakukan demi peningkatan mutu pendidikan.

Saat memasuki pintu gerbang SMAN 1 Tapalang, tampak pepohonan besar mengelilingi halaman depan sekolah. Halaman itu sendiri dijadikan tempat parkir kendaraan siswa dan guru. Dan, saat masuk ke area sekolah, pemandangan serupa pun cukup terasa. Maklum, sekolah ini memiliki luas lahan hampir dua hektare. Terlihat banyak siswa yang sedang beraktivitas. Ada yang sedang memanfaatkan beberapa tempat sudut baca dengan membaca buku, ada pula yang sedang bermain karena saat itu sedang jam istirahat.

SMAN 1 Tapalang sendiri berdiri sejak 1996. Awalnya proses pembelajaran siswanya menumpang di SMP Negeri 1 Tapalang. Hal tersebut dikarenakan pembangunan gedung SMA Negeri 1 Tapalang belum selesai. Awal 1997 gedung sekolah ini sudah rampung dan mulai digunakan. Pada mulanya sekolah hanya menerima siswa sebanyak 92 orang yang dibagi dalam tiga kelas dan diasuh oleh 16 orang pendidik, yang terdiri atas satu kepala sekolah dan lima belas orang guru.



Tampak depan SMAN 1 Tapalang (kiri), suasana pembelajaran di dalam kelas (atas)

Hingga saat ini, SMA Negeri 1 Tapalang memiliki 642 siswa dengan 19 rombongan belajar yang terdiri atas kelas X tujuh rombel, kelas XI enam rombel, dan kelas XII enam rombel, dengan pilihan program studi IPA dan IPS, yang dibimbing oleh 54 orang pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS dan non-PNS.

CIPTAKAN KEMANDIRIAN SEKOLAH

SMA Negeri 1 Tapalang terus berupaya tingkatkan mutu pembelajaran yang dikelola secara otonom sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan tuntutan zaman, dan tentunya tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku. Dilengkapi dengan sarana prasarana yang cukup memadai, sekolah ini telah menjelma menjadi sekolah favorite bagi masyarakat Kecamatan Tapalang. “Sekolah ini merupakan sekolah yang memiliki cukup banyak prestasi baik untuk tingkat kabupaten, provinsi, bahkan pernah masuk ke tingkat nasional. Kegiatan pembelajaran di sekolah ini cukup menyenangkan,” ujar Hamdi, salah seorang siswa kelas XI.

Respons positif yang disampaikan siswa itu, tentu tidak terlepas dari baiknya tata kelola di sekolah yang dipimpin oleh Lukman Mustafa, S.Pd. ini. “Manajemen pengelolaan sekolah secara mandiri sudah sejak lama diterapkan di SMA Negeri 1 Tapalang. Kira-kira sejak tahun 2006,” ujar Lukman, yang juga sudah menjadi salah seorang guru dari awal SMAN 1 Takalang berdiri hingga sekarang menjadi kepala sekolahnya.

Dalam hal ini, kepala sekolah diberi kewenangan untuk menggali segala potensi



Tenaga pendidik SMAN 1 Tapalang

yang ada di sekolah. “Salah satu bentuk kemandirian yang diterapkan di sekolah adalah dalam hal pembuatan program seperti Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Dalam penentuan RKAS sekolah sepenuhnya mandiri sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa bentuk kemandirian sekolah yang mutlak dan tidak bisa diintervensi pihak lain di antaranya dalam hal kenaikan kelas, kelulusan, dan siapa saja yang bisa diterima bersekolah di SMA Negeri 1 Tapalang. Seluruh pengambilan keputusan dalam setiap program sekolah selalu dimusyawarahkan kepada semua pemangku kepentingan sekolah,” ulas Lukman Mustafa.

Sebagai sekolah milik pemerintah, secara keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan di SMA Negeri 1 Tapalang tidak ada yang berbeda dengan kebanyakan sekolah negeri lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran SMA Negeri 1 Tapalang saat ini telah menerapkan Kurikulum 2013 dengan enam hari sekolah dimulai dari jam 07.30 sampai dengan 14.00. Mayoritas keyakinan warga sekolah SMA Negeri 1 Tapalang 98% beragama Islam, namun pihak sekolah tidak menyediakan mushola untuk tempat beribadah. Ketiadaan mushola tersebut dikarenakan telah tersedianya masjid milik masyarakat sekitar sekolah yang letaknya berdampingan dengan gedung sekolah. Maka segala aktivitas keagamaannya dilakukan di masjid tersebut.

Secara keseluruhan bentuk kemandirian dalam pengelolaan sekolah belum-



Peserta didik yang sedang membaca di sudut baca sekolah

lah seratus persen. Salah satu kendalanya adalah pendanaan. Sekolah belum mampu menghimpun dana dari pihak luar. Sumber penerimaan sekolah masih berasal dari dana bantuan pemerintah. Alokasi penggunaan dana tersebut tentunya berdasarkan aturan yang berlaku. Sekolah tidak bisa mengalokasikan anggaran bantuan pemerintah tersebut sesuai kehendak sekolah.

Sesuai dengan rencana kerja, berbagai program kegiatan rutin dilaksanakan, baik terkait kurikulum maupun pemenuhan sarana prasarana sekolah dan keuangan. "Terkait dengan sarana prasarana sekolah saat ini sudah cukup lengkap. Akan tetapi ada beberapa yang perlu diperbarui karena beberapa bangunan gedung sekolah ini merupakan bangunan lama dan tampak sudah tua," ucap Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana.

Untuk efektifnya program yang sudah dirancang tentunya harus didukung sumber pendanaan yang cukup. "Kami tidak bisa berharap dari sumbangan masyarakat, karena sebagian besar siswa yang bersekolah disini berasal dari kalangan keluarga menengah ke bawah," ujar Lukman Mustafa.

Tapi ini bukan berarti sekolah harus mengalah pada situasi seperti itu. Segala upaya bisa terus dilakukan. Membuka jejaring dengan berbagai pihak, baik secara perorangan maupun perusahaan, dapat dilakukan. Sebab, tak hanya pemerintah. Masyarakat, sekolah, pun punya kewajiban memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan di wilayahnya. □



SMAN 5 GOWA - SULAWESI SELATAN

Sekolah Sehat Prestasi Meningkatkan

SMAN 5 Gowa berhasil menarik minat para siswa dan orangtua karena alasan ini. Fasilitas yang memadai, asrama yang nyaman, dan kondisi alam yang sangat asri membuat aktivitas di sekolah berasrama ini sangat kondusif.

Kesan pertama: indah. Meski lokasinya cukup jauh dari kota Gowa, dan melewati jalan meliku, perjalanan ke SMAN 5 Gowa memang memberikan kesan menantang, bahkan boleh dibilang cocok untuk *refresing*.

SMAN 5 Gowa yang beralamat di Jalan Poros Makassar Malino KM 62 Tinggi Moncong, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa, telah dibuka sejak tahun 1997. Sekolah ini masih menjadi tumpuan harapan anak-anak Gowa untuk mendapatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMA. Kemudian, pada tahun 2004, SMAN 5 Gowa menjadi sekolah RSBI yang mengharuskan adanya penerapan MBS di sekolah. Selain itu, sekolah pun mendapatkan dukungan dari Yayasan Pendidikan Latimojong agar berani berinovasi dan berkembang.

Kepala Sekolah SMAN 5 Gowa Sudarman menjelaskan, walau sudah tiga kali ganti nama sekolah, anak-anak dan penduduk Gowa lebih mengenal SMAN 5 Gowa dengan sebutan Smudama (SMU Andalan Malino). Tak hanya itu, walau



Salah satu bangunan SMAN 5 Gowa (kiri), lorong sekolah yang rapih dan bersih (atas) Plang nama SMAN 5 Gowa

berstatus sekolah negeri, SMAN 5 Gowa memiliki sumber pendanaan lain, yakni dari dana sharing Yayasan Pendidikan Latimojong. Dana



ini digunakan untuk pengelolaan asrama di mana seluruh siswa SMAN 5 Gowa akan tinggal di asrama dari pertama kali masuk hingga lulus.

Salah satu bentuk penerapan MBS yang telah dilakukan Smudama yakni dengan adanya pembentukan Kelompok Pecinta Mata Pelajaran/Smudama Science Club (SSC). Smudama merupakan sebuah kelompok belajar berdasarkan minat dan bakat siswa. Siswa dapat menekuni bidang yang disukai dan mendiskusikan semua materi terkait bidang tersebut di SSC. Hingga kini, jumlah anggotanya meningkat di setiap kelompok mata pelajaran. Selain itu, SMAN 5 Gowa pun telah menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) di mana program ini merupakan program yang masih terbilang jarang diterapkan di jenjang SMA. Selain itu, SMAN 5 Gowa pun merupakan sekolah sehat dan meraih prestasi sekolah sehat terbaik kedua di tingkat nasional tahun 2018.

SEPAK TERJANG SMUDAMA

SMAN 5 Gowa dikenal dengan siswanya yang berprestasi karena sering memenangkan perlombaan pada berbagai even kejuaraan. Prestasi yang kerap



Suasana makan siang bersama dan peserta didik yang sedang membaca mading sekolah

dicapai itu bukan semata-mata karena kemampuan siswa yang mumpuni, melainkan juga karena manajemen yang baik dan konsisten yang diterapkan oleh pihak sekolah. Melihat potensi yang dimiliki para siswa, pihak sekolah kemudian mengembangkan SSC.

Tujuan dibentuknya SCC ini adalah untuk mengelompokkan dan membina siswa dengan minat dan bakat tertentu, sehingga siswa bisa mengasah kemampuan akademiknya. Selain itu, SSC dihadirkan untuk mempersiapkan para siswa jika ada kompetisi akademik seperti olimpiade. Maka, jika terdapat kesempatan tersebut para siswa sudah memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk bersaing. Kesuksesan SSC baru-baru ini dibuktikan dengan prestasi yang diraih oleh Bilal dalam kompetisi OSN (Olimpiade Sains Nasional) yang diselenggarakan oleh Kemendikbud di Padang pada Oktober 2018. Pada OSN ini Bilal meraih medali perunggu sebagai buah manis dari penerapan SSC di SMAN 5 Gowa.

Belakangan pun SMAN 5 Gowa menjadi pemenang dalam kompetisi sekolah sehat yang diselenggarakan oleh Kemendikbud dan Kemenkes. OSIS SMAN 5 Gowa berperan penting dengan program Hari Bersih, yang diselenggarakan setiap hari Jumat. Dengan dibagi ke dalam beberapa kelompok, para siswa ditempatkan pada titik-titik yang telah ditentukan untuk melakukan kegiatan pembersihan lingkungan. Asrama, gedung belajar, masjid, kantin, dan pojok-pojok sekolah lainnya menjadi tempat yang wajib tampak bersih dan sehat.

Ada sanksi yang mendidik agar para siswa lebih peduli dan lebih disiplin. Bukan hanya itu, di lorong-lorong sekolah terdapat banyak informasi terkait kesehatan yang disajikan dengan unik, seperti mading kreatif atau pop up sederhana yang ditempel di tiang lorong sekolah.

Urusan infrastruktur jangan diragukan lagi. SMAN 5 Gowa berhasil menarik minat para siswa dan orangtua murid karena alasan ini. Fasilitas yang memadai, asrama yang nyaman, dan kondisi alam yang sangat asri membuat aktifitas di sekolah berasrama ini sangat kondusif.

Sebuah kebanggaan tampak pada raut wajah seluruh warga sekolah. Baik guru dan siswa bangga dengan apa yang telah diupayakan oleh semua pihak dalam mengawal proses pembelajaran di SMAN 5 Gowa. Saat ditanyai mengenai harapan terhadap sekolah, seorang siswa mengungkapkan “Saya berharap agar fasilitas IT ditingkatkan sehingga bisa terus mengikuti perkembangan zaman, terutama untuk komputer pemrograman agar kami bisa mempelajari hal itu juga,” Semangat yang pantas untuk diapresiasi. Dan bukan harapan yang berlebihan pula bagi seluruh perangkat sekolah jika mereka ingin mewujudkan cita-citanya membangun sekolahnya menjadi lebih baik. □



Barisan piala prestasi peserta didik SMAN 5 Gowa



SMAN 1 KOLAKA - SULAWESI TENGGARA

Gerak Bersama Meraih Prestasi

Pengelolaan manajemen sekolah secara mandiri yang dilakukan oleh SMAN 1 Kolaka mencakup manajemen keuangan, kurikulum dan program pengajaran, serta tenaga administrasi. Segala upaya tersebut dilakukan semata-mata demi meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.

SMAN 1 Kolaka merupakan sekolah mandiri yang menerapkan manajemen berbasis sekolah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan semangat otonomi. Otonomi daerah sebagai kebijakan politik makro akan memberi imbas terhadap otonomi sekolah sebagai subsistem pendidikan.

Dengan adanya kebijakan itu, maka pengelolaan pendidikan dilakukan secara otonom. Manajemen berbasis sekolah sendiri merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi, dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah.

PENERAPAN KEBIJAKAN

Adapun penerapan pola MBS yang dilakukan SMAN 1 Kolaka, menurut Ustad Ahmad selaku kepala SMA Negeri 1 Kolaka, merupakan bentuk keputusan par-



Tampak depan SMAN 1 Kolaka (kiri), prestasi peserta didik di bidang kewirausahaan pada acara FIKSI (Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia) (kanan)

tisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orangtua siswa, dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.

Alasan menerapkan MBS selain dari peningkatan kualitas lulusan, juga memiliki tujuan untuk memberdayakan sekolah dalam menetapkan berbagai kebijakan internal sekolah yang mengarah pada peningkatan mutu dan kinerja sekolah secara keseluruhan. Peningkatan mutu dapat diperoleh, antara lain, melalui partisipasi orangtua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah. Peningkatan pemerataan antara lain diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Salah satu realisasinya, setiap awal tahun pelajaran sekolah membuat rencana dengan mengevaluasi tingkat relevansi visi dan misi sekolah sesuai kebutuhan. Misi ini memiliki kontribusi yang besar terhadap fungsi dan efektivitas sekolah, karena dengan misi ini warga sekolah dapat mengembangkan budaya organisasi sekolah yang tepat, membangun komitmen yang tinggi terhadap sekolah, dan mempunyai insiatif untuk memberikan tingkat layanan pendidikan yang lebih baik.

Gambaran kegiatan otonomi sekolah pada SMA Negeri 1 Kolaka antara lain, pada manajemen keuangan, manajemen kurikulum dan program pembelajaran, disusun kurikulum 2013 SMA Negeri 1 Kolaka secara mandiri. Semua dihimpun dalam buku I dan buku II. Kemudian melakukan perencanaan





pembelajaran dan memiliki kewenangan dalam memilih pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran. Manajemen tenaga administrasi melakukan analisis kebutuhan guru, membuat pembinaan kedisiplinan untuk guru di sekolah dan tata usaha, menetapkan deskripsi tugas pokok dan fungsi guru serta membuat deskripsi kerja tata usaha berdasarkan latar belakang pendidikan dan keterampilan yang dimiliki.

Dalam hal mengelola kesiswaan, dilakukan analisis kebutuhan siswa, seleksi penerimaan siswa, pembinaan kedisiplinan, dan pembimbingan kegiatan keagamaan serta pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler mulai tingkat kabupaten sampai dengan tingkat internasional. Manajemen keuangan dan pembiayaan telah melakukan perencanaan, dan menyusun RKAS/RAPBS dalam hal ini Kepala sekolah menyusun sendiri dengan melibatkan warga sekolah. Kemudian, pelaporan pertanggungjawaban untuk dana BOS, dilakukan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan jumlah dana yang telah digunakan.

Di bidang sarana dan prasarana, kepala sekolah melakukan analisis kebutuhan, kemudian menetapkan prioritasnya. Gambaran fleksibilitas, transparansi, dan akuntabilitas SMA Negeri 1 Kolaka terlihat sebagai berikut. Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa terkait persiapan mengajar guru, menunjukkan bahwa sebagian besar guru di SMA Negeri 1 Kolaka secara mandiri telah melakukan perencanaan program pembelajarannya.

Dalam penyusunan rencana pembelajaran, setiap guru menyusun berdasarkan standar kompetensi Kurikulum 2013 kemudian mengembangkannya sesuai dengan kondisi sekolah. Dalam proses belajar mengajar guru berusaha memunculkan kreativitas siswa dalam belajar. Siswa diberi kesempatan



Beragam aktivitas peserta didik di SMAN 1 Kolaka

untuk mengungkapkan dan menggali informasi sebanyak-banyaknya. Walaupun masih terlihat ada beberapa yang masih monoton dengan metode ceramah dan tidak menggunakan media pembelajaran, pembelajaran tetap efektif.

PENINGKATAN KUALITAS GURU

Terkait dengan pengembangan kompetensi, profesionalisme, dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, kepala sekolah memiliki kebijakan beberapa hal yaitu mengutus guru dalam kegiatan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pengembangan kurikulum 2013, kegiatan penyusunan karya tulis ilmiah, mengikutsertakan guru dalam berbagai diklat. Selanjutnya memberikan motivasi bagi guru dan tenaga tata usaha yang menunjukkan kinerja yang baik dan sebaliknya akan diberi sanksi jika menunjukkan kinerja yang buruk. Sekolah juga memfasilitasi dalam melakukan pembinaan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan prestasi, minat dan bakat melalui organisasi atau lembaga-lembaga di sekolah.

Apa yang diusahakan SMAN 1 Kolaka membuahkan hasil. Segudang prestasi telah diraih oleh sekolah. Antara lain, penghargaan yang diraih oleh salah seorang siswanya, Putri, kelas XII IPA pada Festival Inovasi & Kewirausahaan Siswa Indonesia (Fiksi), Hotel Sahid Yogyakarta. Ia mendapatkan medali perak dengan uang pembinaan enam juta rupiah dan acara ini diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Apa yang kita tanam, itulah yang kita petik. Kerja keras, konsisten, dan sadar akan kemampuan diri, bisa jadi motor untuk terus mengejar mimpi, dan tentu pun prestasi. □

Menuju Kemandirian dengan Beragam Kerja Sama

Keputusan tidak melulu harus ditentukan dari atas. Namun sudah mulai dicoba dari bawah. Atau yang lebih dikenal dengan istilah *bottom up*. Metode inilah yang sedang dicoba untuk dikembangkan di SMAN 1 BolaangMongondow.

Penerapan manajemen berbasis sekolah tentunya berbeda di setiap tempat. Belum ada ketentuan secara tertulis dan pasti bagaimana dan seperti apa idealnya pengelolaan sekolah secara mandiri itu diterapkan. Setiap sekolah masih mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah sesuai dengan kondisi dan potensi sekolah. Begitu pun yang dilakukan oleh SMAN 1 Bolaang Mongondow.

Pengelolaan manajemen berbasis sekolah yang diterapkan oleh SMAN 1 Bolaang Mongondow adalah mengembangkan pengelolaan sekolah yang transparan. Segala bentuk keputusan tidak lagi ditentukan oleh pihak atas. Namun dicoba dibuat dari bawah atau yang lebih dikenal dengan istilah *bottom up*.

“Manajemen berbasis sekolah sudah diterapkan sejak tahun 2000,” ujar Potutu,





Salah satu sudut sekolah (kiri), suasana di perpustakaan sekolah (atas)

kepala SMAN 1 Bolaang Mongondow. Setelah menerapkan manajemen berbasis sekolah, dampak yang dirasakan oleh sekolah yakni terbentuknya hubungan kekeluargaan antarwarga sekolah baik itu guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan stakeholder yang berjalan dengan baik.

KEMANDIRIAN DALAM BEBERAPA ASPEK

Namun, dalam pelaksanaannya kadang-kadang selalu terdapat beberapa rintangan. Contohnya saja saat itu, pihak sekolah sempat berbenturan dengan ombudsman karena sekolah meminta bantuan kepada komite sekolah untuk pendanaan pengembangan sekolah seperti membuat dan pengerasan jalan.

Tidak hanya mengandalkan komite, pihak sekolah pun mendapatkan bantuan dari alumni dalam pengembangan sekolah. “Alumni 2002 membantu pengecoran jalan, dananya dari iuran mereka dan termasuk pengerjaan proyeknya. Alumni 1985 juga ingin menyumbangkan WC wanita serta program sanitasi,” ujar Potutu. Ia mengaku segala upaya ia kerahkan untuk mendapatkan bantuan dari pihak luar. Karena dana BOS tidak bisa digunakan selain dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Upaya pemenuhan finansial sekolah lain yang telah dilakukan yakni turut melibatkan masyarakat setempat. Masyarakat turut serta dalam hal pengelolaan kantin sekolah dan memberikan pemasukan ke sekolah sebanyak Rp5.000 per hari.



Suasana pembelajaran di ruang kelas (atas) Taman dan sudut sekolah (bawah)

Kemandirian lain yang telah dilakukan oleh sekolah yakni dalam hal penentuan nilai dan kenaikan kelas. Kebijakan ini sepenuhnya mutlak milik sekolah yang didasarkan pada buku panduan satu dan hal tersebut merupakan hasil dari rapat komite. “Contoh kasus dalam hal kenaikan kelas, sekolah tegas mengikuti pedoman yg disepakati oleh sekolah. Buku satu itu memuat aturan yang digunakan selama pengelolaan satu tahun,” tegas Potutu.

Kemudian dalam soal aturan kehadiran siswa, sekolah memiliki aturan khusus.

Bila siswa tidak hadir selama 20 hari maka sekolah berhak memutuskan untuk tidak menaikkannya. Atau siswa tersebut dapat naik kelas dengan catatan pindah sekolah. Tentunya keputusan ini seluruhnya merupakan hasil musyawarah yang telah dilakukan dalam rapat guru dan stakeholder. Tidak hanya memberikan dampak bagi para siswa, manajemen berbasis sekolah pun memberikan pengaruh positif pada kehadiran guru yang harus mencapai 95%. “Kalaupun tidak hadir itu karena sakit atau keperluan mendesak,” ujarnya.

Sistem pembelajaran yang dilakukan di sekolah ini juga cukup mandiri. Kemandirian pembelajaran dilakukan dengan membuat aturan yang tegas dan membangun kesadaran. Memberikan *reward and funishment*. “Misal ada jam belajar yang digantikan oleh guru lain, maka yang mengajarlah yang berhak atas insentif yang diberikan sekolah.

Kebutuhan guru sebanyak 56 guru termasuk guru BK dan TIK. Saat ini ada 48, terdiri dari ASN 28 orang, THL Provinsi yang digaji provinsi sebanyak delapan orang dan tujuh orang dibiayai oleh sekolah (komite sekolah),” terang Potutu. Selain itu, sekolah ini memiliki keunikan tersendiri dalam pengelolaan organisasi siswa. “Ada pengkaderan atau pelatihan dasar organisasi intrasekolah, begitupun Pramuka,” ujar Potutu.

Sekolah pun melaksanakan kerja sama dalam berbagai kegiatan dengan beberapa pihak. Seperti kepolisian untuk program pembinaan siswa. Lalu dengan kampus seperti Universitas Negeri Manado dalam hal program penerimaan mahasiswa baru. “Ke depannya tentunya saya berharap sekolah ini dapat berkembang menjadi lebih baik. Karena ini adalah sekolah tua. Jadi sudah saatnya fokus pada mutu,” ujarnya.

Maka, segala aspek perlu dibenahi untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi sekolah selama ini. Seperti tidak searahnya guru dengan kepala sekolah, sarana dan prasarana yang dinilai sudah tua dan butuh perbaikan. “Banyak yang harus dibenahi. Harapannya dapat bantuan revitalisasi. Kan penggunaan dana BOS harus mengikuti APBD, sekolah tidak leluasa memanfaatkan untuk pengembangan sekolah,” pungkas Potutu. □



SMAN 1 SOLOK - SUMATERA BARAT

Tiga Pilar Penunjang Keberhasilan

Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMAN 1 Solok melibatkan tiga aktor utama: guru, orangtua, dan pemerintah. Keselarasan dan kerja sama yang apik dari ketiga komponen inilah yang menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan MBS di sekolah.

Sejatinya, pelaksanaan MBS di sekolah dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang didasari kemampuan sekolah bersangkutan dalam mengoptimalkan semua sumber daya yang ada. Berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan ini, Kepala Sekolah SMAN 1 Solok Ujang Sayuti, M.Pd., menyatakan, ada tiga pilar penting dalam menunjang peningkatan mutu pendidikan ini. "Pertama," ujarnya, "menetapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan. Kedua, peningkatan efisiensi pengelolaan, dan ketiga, peran komite sekolah yang meliputi perencanaan, implementasi, monitoring, serta evaluasi program kerja sekolah."

Untuk menerapkan ketiga pilar itu, diperlukan sumber daya pendukung. Dan

ini sudah tentu harus melibatkan peran guru, orangtua, dan pemerintah. “Sejak diundangkan UU Otonomi Daerah dalam bidang pendidikan, peranan guru serta peserta didik, orangtua (komite sekolah), pun pemerintah daerah sebagai pengawas, sangat diperlukan,” kata Wakasek Jufrial Ara, SAg., MSi.

SMAN 1 Solok mulai menerapkan MBS tahun 2004 lalu. Menurut Ujang Sayuti, MBS di sekolahnya menjadi keharusan. Jika pola manajemen dalam sebuah lembaga pendidikan baik maka dapat dipastikan lembaga pendidikan tersebut bermutu. “Kemandirian sekolah itu dapat dibuktikan bahwa kami menerapkan istilah ‘naik berjenjang turun bertanggung’. Jadi setiap masalah yang ada di sekolah dapat diselesaikan berdasarkan besar atau tidaknya masalah itu. Ada satu atau dua kasus yang dapat diselesaikan oleh guru, kemudian wali kelas, kemudian kepala sekolah. Itulah kemandirian yang kami terapkan di sini dan tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun,” ungkapnya.

PENERAPAN MBS

Dalam menerapkan MBS di sekolahnya, menurut Ujang Sayuti, sekolah dituntut secara mandiri untuk menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber baik kepada masyarakat maupun pemerintah. “Dalam hal ini ada beberapa ke-



Tampak depan dan wajah SMAN 1 Solok (kiri dan atas)



Suasana ruang guru

bijakan atau peraturan sekolah yang kami buat demi tercapainya mutu pendidikan akademis yang kami rencanakan yang pihak luar tidak bisa melakukan intervensi,” tegasnya. Inilah yang menjadi karakter MBS di SMAN 1 Solok.

Kebijakan ini tentu menghasilkan kemandirian dalam pengelolaan sekolah, tak selalu harus bergantung pada bantuan pemerintah. “Dalam beberapa hal yang kami terapkan di sekolah ini tentu kemandirian itu ada. Maka kami libatkan beberapa komponen yang salah satunya adalah orangtua siswa di mana perannya akan sangat membantu dalam hal pemenuhan kebutuhan keuangan.”

Kemudian peranan alumni pun dimaksimalkan. Dalam berbagai even kegiatan sekolah, alumni selalu diberi tempat. Tujuannya antara lain agar mereka mengetahui, seberapa jauh perkembangan sekolahnya ini. Pun dalam pendanaan kegiatan mereka terlibat. Misalnya, untuk mengikuti lomba atau kegiatan lain yang diadakan di provinsi atau nasional. Kami dahulu sering juga mendapatkan sumbangan dana dari para alumni untuk pembangunan masjid sekolah,,” kata Ujang Sayuti.

Kebijakan ini pun berbuah manis. Kerja sama dengan berbagai pihak, terutama kampus juga telah terjalin. Peranan masyarakat dan pemerintah sudah sesuai porsi. Para siswa bangga dengan sekolahnya. Farhan Noor, siswa kelas XII IPA-3 mengatakan, ia dan teman-temannya mendukung kegiatan atau program



Etalase piala dari prestasi peserta didik

sekolahnya. Begitu pula dengan orangtua mereka. “Sarana dan prasarana sekolah untuk siswa sudah bagus karena semuanya sudah dapat mendukung kami untuk meningkatkan kualitas dan mengembangkan bakat dan minat,” katanya.

Senada dengan Farhan, Zahwa Aliftifa Dinata, siswa kelas XII mengatakan, “Sekolah sudah menyediakan fasilitas bagi kami untuk berprestasi. Sebelum mengikuti lomba kami melakukan latihan di sekolah dan terbukti kami bisa menjuarai lomba GenRe dan Wawasan Kebangsaan di Bogor pada Maret lalu,” jelasnya.

Parenting pun diterapkan oleh orangtua siswa dalam hal pengawasan dan pembentukan karakter siswa di sekolah ini. Dengan perguruan tinggi terjalin pula kerja sama sebagai pengabdian mereka kepada masyarakat, khususnya sekolah. Ada beberapa dosen yang datang dan mengajar di sini tanpa berbayar. Ada juga mahasiswa yang melakukan penelitian yang respondennya para siswa. Dan SMAN 1 Solok pun berfungsi juga sebagai sekolah unggulan dan rujukan bagi sekolah lain di sekitarnya.

Ya, sudah seharusnya mereka bangga dengan sekolahnya. Sarana tersedia, lengkap, kerja sama perangkat sekolah berjalan baik, manajemen sekolah tertata, jadi untuk alasan apa lagi jika mereka tak mau belajar dan berprestasi maksimal. □



SMAN 6 PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

Unggul dalam Prestasi dan Imtaq

Menjadi sekolah unggulan yang menekankan pada iman dan taqwa, membawa konsekuensi logis bagi guru dan siswa SMAN 6 Palembang. Sekolah bersama komite memberikan sarana dan fasilitas yang mendukung penguatan bidang imtaq. Karakter terbentuk, prestasi pun teraih.

Suatu hari, ada orangtua murid mendatangi ruang Maryati, kepala sekolah SMAN 6 Palembang, untuk diskusi soal perkembangan putranya yang menjadi siswa di sekolah ini. Inti cerita, orangtua ini merasa bangga dengan perubahan yang terjadi pada putranya, terutama dalam hal ibadah. Bahkan dia merasa malu karena di rumah, orangtua tak sempat mendidik anak untuk beribadah. Sepenggal cerita yang memiliki makna dalam, bahwa sekolah ini telah berhasil mendidik dan menanamkan kesadaran beribadah.

Predikat sebagai sekolah unggulan dengan penekanan ke imtaq, menjadikan sekolah ini harus memfasilitasi melalui progam dan kegiatan. Sejak SMAN 6 Palembang mendapat SK sebagai sekolah unggulan pada tahun 2010, manajemen sekolah harus taat pada peraturan. Sementara manajemen sekolah sejak awal ingin ada penguatan di bidang imtaq. “Sejak saya menjadi kepala sekolah di sini, yaitu pada tahun 2015, sekolah menyusun program berdasarkan rencana dari para wakil kepala sekolah untuk diimplementasikan sesuai dengan



Tampak depan SMAN 6 Palembang (kiri atas), lobby sekolah (tengah atas), absen peserta didik dengan sistem finger print (kanan atas)

kebutuhan siswa,” jelas Maryati. Saat ini ada 6 wakil kepala sekolah yang bertanggung jawab pada bidang kurikulum, kesiswaan, sarana, humas, manajemen mutu dan imtaq. Wakil kepala sekolah bidang imtaq ini yang menjalankan program yang telah disusun.

PENGUATAN IMTAQ

Untuk mendorong penguatan di bidang imtaq, menurut Maryati, sekolah kerap memanggil narasumber dari luar, bisa alumni dan juga ustadz yang memberikan materi Pendidikan Agama Islam (PAI) yang tidak diajarkan di kelas dan tidak masuk dalam kurikulum pembelajaran. Sekaligus juga dalam kegiatan itu ada mentoring. Di sekolah ini kegiatan imtaq di luar jam belajar terbilang banyak. Ada majelis taklim, pesantren kilat, bahkan sekolah pernah mengundang perwakilan dari ESQ untuk menguatkan kecerdasan, mental, dan spiritual. “Kebetulan komite sekolah sangat mendukung karena sejak awal sudah tahu mengapa memilih sekolah di sini, apa tujuannya, dan apa harapan kepada anaknya kelak setelah lulus,” tambah Ibu Kepsekini.

Kepala sekolah mengakui sampai saat ini sekolah masih belum memiliki kemandirian sepenuhnya, terutama dalam hal pendanaan dan peralatan, karena masih tergantung pada bantuan pemerintah dan swasta. Kecuali, yang terkait dengan peraturan dan kebijakan sekolah. Untuk pendanaan misalnya, sekolah pernah mendapat bantuan dana dari pemerintah sebesar Rp200 juta untuk pembelian 27 komputer PC dan 1 server untuk menunjang pelaksanaan UNBK. Karena sekolah melaksanakan UNBK dalam 3 sesi, sehingga diperlukan 115 komputer, komite sekolah yang membelinya.

Terkait dengan kebijakan, Maryati mengatakan bahwa sampai saat ini sekolah masih memiliki kewenangan yang besar untuk menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Sebut saja salah satu contohnya adalah soal peringkat. SMAN 6 Palembang menetapkan peringkat tertinggi di angka 72 untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB), di saat sekolah lain di Sumsel menetapkan angka tertinggi 70. Kemudian ketika sekolah lain menaikkan angka tertinggi 75, SMAN 6 Palembang sudah di angka 78. Tahun ini bahkan SMAN 6 Palembang berani menetapkan angka 80 untuk kelulusan PPDB sementara sekolah lain tetap di 75. "Ternyata masih banyak juga siswa yang mendaftar melebihi daya tampung. Ini mungkin karena masyarakat percaya dengan sekolah kami," tutur Maryati.

Selain itu sekolah juga tegas dalam hal intervensi dari pihak luar, terutama saat penerimaan siswa baru. Kalaupun ada pengecualian, paling tidak syarat minimal bisa terpenuhi, misalnya nilai akademik masih bisa masuk. Bahkan sekolah mengeluarkan kebijakan menerima siswa tanpa tes bagi anak yang sudah hafiz Al-Quran.

Ke depan, Maryati punya harapan menerapkan sistem baru dalam PPDB, yang mengadopsi sistem yang dipakai di SMAN 2 Sekayu. Meskipun seleksi masuk sudah online, tapi tetap ada tes masuk lagi. Dan semua dibuat serba transparan sehingga diharapkan tidak terjadi keberatan dan masalah di belakang. Hal ini penting karena peminat sekolah ini selalu di atas kapasitas dan latar belakang orangtua beragam, ada pejabat pemerintah, direktur bank, pengusaha, yang bisa saja mereka melakukan intervensi melalui jabatannya.

SMAN 6 Palembang membuka 30 rombongan belajar, yang terbagi untuk kelas X, XI dan XII dan menerapkan Kurikulum 2013 dengan peminatan IPA dan IPS.





Kepala sekolah dan pendidik SMAN 6 Palembang (atas). Suasana mengaji dan pembelajaran agama di luar kelas (kiri dan tengah bawah), Ruang Unit Kesehatan Sekolah (kanan bawah)

Jumlah tenaga guru dan pendidik 76 orang. Melalui visi: unggul dalam iman, ilmu dan budaya islami yang berwawasan lingkungan, sekolah telah berhasil menorehkan prestasi melalui berbagai ajang kegiatan siswanya. Beberapa catatan prestasinya adalah Juara I Pentas PAI tingkat nasional di Aceh pada tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Tahun 2018, juara I lomba MTQ tingkat SMA di Palembang, juara II lomba Tahfiz tingkat SMA Palembang, Juara I Lomba Debat Konstitusi tingkat provinsi sampai juara I lomba cerdas cermat tingkat SMA di Palembang. □





SMA LAKSAMANA MARTADINATA MEDAN - SUMATERA UTARA

Meningkatkan Mutu Lewat MBS

Manajemen sekolah yang kuat tidak akan terwujud tanpa dukungan seluruh warga sekolah. Terutama guru yang handal, berintegritas, dan memiliki kemauan tinggi.

Berada di pusat kota Medan yang multietnis, merupakan tantangan tersendiri bagi SMA Laksamana Martadinata. Namun, itu semua tak menjadi hambatan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada siswa. Sebagai contoh, siswa diberi kebebasan dalam melakukan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan sekolah pun menyediakan fasilitas berupa ruang khusus bagi siswa untuk melaksanakan ibadahnya.

Sesuai dengan namanya, SMA Laksamana Martadinata yang beralamat di Jalan Pertempuran No. 125, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat

dan berdiri pada 23 Oktober 1984 ini, pun meniru semangat dan perjuangan Pahlawan Nasional Laksamana TNI (Anumerta) Raden Eddy Martadinata, dalam mengelola sekolahnya. Jumlah peserta didik saat ini sebanyak 1.240 siswa yang terbagi menjadi 33 rombel. Dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 55 orang dan 9 orang pegawai, tentunya sekolah harus memiliki manajemen yang baik. Pengelolaan sekolah yang baik akan menciptakan pelayanan yang maksimal terhadap semua warga sekolah.

SMA Laksamana Martadinata berdiri di atas lahan seluas 7.046 meter persegi. Tidak luas namun bangunan sekolah cukup representatif. Lokasi bangunan tertata baik, sarana dan prasarana yang memadai inilah yang menjadi alasan Nurul Najwa siswa kelas XII IPA yang bercita-cita menjadi desainer dan apoteker ini memilih bersekolah di SMA Laksamana Martadinata. Selain itu, penerapan aturan dan tata tertib sekolah yang konsisten menjadi alasan bagi para siswa lainnya bersekolah di SMA Laksamana Martadinata.

KERJA SAMA JADI UTAMA

Irfan Harahap, Kepala SMA Laksamana Martadinata, yang baru menjabat beberapa bulan ini menuturkan bahwa manajemen sekolah yang sudah dibangun ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan dari seluruh warga sekolah. Terutama guru yang andal, berintegritas, dan memiliki kemauan yang tinggi. “Guru merupakan faktor kunci keberhasilan peningkatan mutu pendidikan di sekolah kami,” ujarnya.



Tampak depan bangunan sekolah (kiri), kegiatan upacara bendera oleh tim paskibra sekolah (atas)



Kegiatan Pentas Seni Laksta (SMA Laksamana Martadinata)

“Dengan melaksanakan MBS, sekolah makin menunjukkan jati diri kemandiriannya. Artinya sekolah memiliki hal-hal yang menjadi kewenangan sekolah yang tidak bisa diintervensi oleh pihak luar,” ujar Sutego, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sekaligus penanggung jawab pelaksanaan MBS. Beberapa hal yang berada di bawah kewenangan sekolah yakni kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri sesuai dengan driven demand principle, pengelolaan unit produksi dalam menunjang kualitas SDM dan memberdayakan lingkungan sekolah dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala SMA Laksamana Martadinata.

Dalam setiap pengambilan keputusan, sekolah selalu melaksanakannya melalui rapat dewan guru dan lembaga terkait. Kemandirian yang merupakan misi dari sekolah ini harus senantiasa terwujud. Hal ini tercermin pada kegiatan-kegiatan proses pembelajaran siswa. Para guru menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan. Siswa diberikan kebebasan untuk mengembangkan minat dan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini terbukti dengan banyaknya prestasi yang diraih oleh SMA Laksamana Martadinata seperti, Juara 1 Kyorugi Junior Puteri U.59 pada kejuaraan taekwondo “Open Tournamen” MENHAN CUP 2017 se-Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret s.d. 02 April 2017 di Gor POPKI – Cibubur Jakarta atas nama Shela Bela Sitopu, Juara 1 sepak takraw pada kompetisi olahraga antarpelajar kota Medan tahun 2015 atas nama Putri Handayani, Ridha Anzani, Fitriani, dan Juara 1 ajang pemilihan Putri Pelajar Kota Medan tahun 2017 atas nama Nurul Najwa.

SMA Laksamana Martadinata pun menjalin kerja sama dengan institusi dan lembaga lain seperti Universitas Medan dan Universitas Sumatera Utara dalam



mewujudkan cita-cita setiap siswanya demi melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. “Mereka sering memberikan bimbingan kepada siswa dan mempermudahkan jalur masuk kuliah dengan mendapatkan bidik misi,” tutur Irfan Harap.

Sinergi yang terjalin antarwarga sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan pun kian kokoh. Tidak hanya itu, terbentuk pula paguyuban orangtua murid di tiap-tiap kelas. Setiap paguyuban memiliki program kerja masing-masing. Pelaksanaan RTL di sekolah mampu menciptakan komunikasi dua arah antara sekolah dan orangtua. Sehingga mereka mendapatkan informasi utuh mengenai pembelajaran anaknya. Semoga SMA Laksamana Martadinata menjadi sekolah menengah yang mampu berbicara di kancah global sesuai dengan visi dan misi sekolahnya. □



Suasana SMA Laksamana Martadinata



BAB V PENUTUP



MBS merupakan sebuah basis pengelolaan sekolah di mana pihak sekolah mendapat otonomi yang luas untuk mengelola pendidikan yang sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Melalui pemberian kewenangan dalam pengelolaan satuan pendidikan, diharapkan akan menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan sekolah. Penerapan MBS akan meningkatkan partisipasi warga sekolah dalam proses pelaksanaan pendidikan sehingga pada gilirannya akan meningkatkan mutu sekolah.

Melalui MBS, sekolah dapat mengarah pada kemandirian dan peningkatan mutu. Oleh karena itu, model implementasi manajemen berbasis sekolah harus terus didorong pada semua satuan pendidikan, khususnya SMA. Dengan demikian akan muncul kekhasan sekolah dalam mengelola pendidikan.

Berdasarkan profil sekolah yang ditampilkan, diperoleh berbagai contoh implementasi MBS yang berbeda-beda di tiap sekolah. Setiap satuan pendidikan dapat menentukan kebijakan sendiri untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dengan mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah dalam membentuk pribadi peserta didik. Pendekatan manajemen ini, merupakan satu sistem pengelolaan yang luas dalam berbagai aspek.

Dari contoh implementasi MBS di sekolah juga dapat diketahui kondisi satuan pendidikan yang ada atas dasar pengelolaan yang berbeda-beda. Melalui pola



Suasana kebersamaan warga sekolah

ini diharapkan terjadi peningkatan mutu pendidikan seperti yang diharapkan. Juga dapat memunculkan kepedulian dan tanggungjawab masyarakat terhadap satuan pendidikan. Selain ini dapat memicu kompetisi yang sehat dalam pencapaian mutu pendidikan.

Implementasi MBS di setiap sekolah selanjutnya terus didorong untuk menghasilkan sekolah yang mandiri dan berdaya saing

Daftar Pustaka

- Dananjaya, U. 2005. Sekolah Gratis. Esai-Esai Pendidikan yang Membebaskan. Jakarta. Paramadina.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2001. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Jakarta: Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Umum, Departemen Pendidikan Nasional.
- DePorter, B., dan Hernacki, M. 2009. Quantum Learning, Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan (Abdurahman, A. Pentj). Bandung: Penerbit Kaifa
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Dewey, J. 2009. Pendidikan Dasar Berbasis Pengalaman (Pontoh, I.V. Pentj.). Jakarta: Indonesia Publishing.
- Johnson, E.B. 2010. Contextual Teaching and Learning: Menjadikan Kegiatan Belajar Mengajar Mengasyikkan dan Bermakna (Setiawan, I. Pentj). Bandung: Kaifa).
- Kim, W.C., dan Mauborgne, R. 2006. Blue Ocean Strategy. Ciptakan Ruang Pasar Tanpa Pesaing dan Biarkan Kompetisi tak Lagi Relevan (Wahono, S. Pentj.). Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Lickona, T. 2012. Educating for Character, Mendidik untuk Membentuk Karakter (Wawaungo, JA, Pentj). Bandung: Bumi Aksara.
- Pink, D.H. 2006. Misteri Otak Kanan Manusia. (Rusli, Pentj). Jogjakarta: Penerbit Think.
- Rusman. 2011. Model-model Pembelajaran, Mengembangkan Profesionalisme Guru. Jakarta: Rajawali Press
- Tirtarahardja, U, dan La Sulo, S.L. 2005. Pengantar Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

Trianto. 2010. Pengembangan Model Pembelajaran Tematik. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Trianto. 2011. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif progresif, Konsep, landasan dan Implementasinya pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Jakarta: Prenada Media

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Sekolah Menengah Atas Dari Masa ke Masa. Jakarta: Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._ADMINISTRASI_PENDIDIKAN/197106092005011-DEDY_ACHMAD_KURNIADY/Pengelolaan_Pendidikan_Teori/MANAJEMEN_BERBASIS_SEKOLAH.pdf

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._ADMINISTRASI_PENDIDIKAN/197203211999031-ASEP_SURYANA/MANAJEMEN_BERBASIS_SEKOLAH_1_%26_2.pdf



DIREKTORAT PEMBINAAN SMA
DITJEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

